



AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH

Penulis :

**Novia Rizki, Sri Rahayu, Ika Wulandari, Donny Indradi, Reny Dany Merliyana,
Eha Nugraha, Putri Ayu Wulandari, Sev Rahmiyanti, Muhammad Fahmi,
Rizal Zaelani, Wedia Hastuti, Sabarudin, Frisky Jeremy Kasingku,
Nenny Syahreenny, Denara Akmal**

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH

**Novia Rizki
Sri Rahayu
Ika Wulandari
Donny Indradi
Reny Dany Merliyana
Eha Nugraha
Futri Ayu Wulandari
Sev Rahmiyanti
Muhammad Fahmi
Rizal Zaelani
Weddia Hastuti
Sabarudin
Frisky Jeremy Kasingku
Nenny Syahrenny
Denara Akmal**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH

Penulis :

Novia Rizki
Sri Rahayu
Ika Wulandari
Donny Indradi
Reny Dany Merliyana
Eha Nugraha
Futri Ayu Wulandari
Sev Rahmiyanti
Muhammad Fahmi
Rizal Zaelani
Weddia Hastuti
Sabarudin
Frisky Jeremy Kasingku
Nenny Syahreenny
Denara Akmal

ISBN : 978-623-125-216-6

Editor : Ari Yanto., M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Akuntansi Keuangan Menengah ini.

Buku Ini Membahas Akuntansi Keuangan Dan Nilai Mata Uang, Standar Akuntansi Dan Sistem Informasi Akuntansi, Kas Dan Piutang, Perolehan Dan Pelepasan Aset Tetap, Properti Investasi Dan Aset Tak Berwujud, Aset Tidak Lancar, Serta Kemungkinan Untuk Dijual, Sekuritas Dilusian Dan Laba Per Saham, Akuntansi Pajak Penghasilan Dan Akuntansi Sewa, Penyusutan, Penurunan Nilai, Serta Deplesi, Penilaian Persediaan Dan Penilaian Tambahan, Liabilitas Jangka Pendek Dan Liabilitas Jangka Panjang, Waktu Uang Dan Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas Dan Laporan Posisi Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Serta Perubahan Perubahan Estimasi Akuntansi, Isu-isu Di Seputar Akuntansi Keuangan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 AKUNTANSI KEUANGAN DAN NILAI	
MATA UANG.....	1
1.1 Perbandingan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.....	1
1.2 Laporan Akuntansi Keuangan	2
1.3 Standar Akuntansi Keuangan.....	7
1.4 Nilai Mata Uang dalam Akuntansi Keuangan.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	11
BAB 2 STANDAR AKUNTANSI DAN SISTEM	
INFORMASI AKUNTANSI	13
2.1 Standar Akuntansi.....	13
2.2 Pilar Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia....	14
2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi	17
2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	17
2.5 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi.....	18
2.6 Kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	20
2.7 Strategi Mengatasi Kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi.....	22
2.7 Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 3 KAS DAN PIUTANG	27
3.1 Pengertian Kas.....	27
3.2 Rekonsiliasi Bank.....	31
3.3 Piutang Usaha.....	38
3.4 Penghapusan Piutang Usaha	39
DAFTAR PUSTAKA.....	46
BAB 4 PEROLEHAN DAN PELEPASAN ASET.....	47
4.1 Pendahuluan.....	47
4.2 Aset Tetap.....	49
4.2.1 Pengertian dan Pentingnya Aset Tetap.....	49
4.2.2 Penggolongan aset tetap.....	51

4.2.3 Perolehan Aset Tetap	53
4.2.4 Pelepasan Aset Tetap	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
BAB 5 PROPERTI INVESTASI DAN ASET	
TAKBERWUJUD	71
5.1 Pendahuluan.....	71
5.2 Properti Investasi	72
5.3 Aset Takberwujud	75
5.3.1 Hak Paten	77
5.3.2 Hak Cipta dan Merk Dagang	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
BAB 6 ASET TIDAK LANCAR SERTA KEMUNGKINAN	
UNTUK DIJUAL.....	83
6.1 Pendahuluan.....	83
6.2 Jenis Aset Tidak Lancar	83
6.3 Akuntansi Aset Tidak Lancar	85
6.4 Penurunan Nilai dan Pelepasan Aset Tidak Lancar	87
6.5 Kemungkinan Penjualan Aset Tidak Lancar	89
6.6 Studi Kasus	91
6.7 Rangkuman	93
6.8 Latihan Soal.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
BAB 7 SEKURITAS DILUSIAN DAN LABA	
PER SAHAM	97
7.1 Pendahuluan.....	97
7.2 Sekuritas Dilusian.....	98
7.2.1 Hutang dan Modal (Ekuitas).....	99
7.2.2 Obligasi Konvertibel (<i>Convertible Bonds</i>).....	100
7.2.3 Saham Preferen Konversi (<i>Convertible preference share</i>).....	105
7.2.4 Waran Saham	106
7.3 Laba Per Saham	109
DAFTAR PUSTAKA.....	114
BAB 8 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN DAN	
AKUNTANSI SEWA	115
8.1 Akuntansi Pajak Penghasilan	115
8.1.1 Konsep Akuntansi.....	115

8.1.2 Konsep Akuntansi Perpajakan.....	115
8.1.3 Prinsip Akuntansi Pajak.....	116
8.2 Akuntansi Pajak Penghasilan.....	116
8.2.1 Prinsip Akuntansi Pajak Penghasilan.....	117
8.2.2 Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46.....	118
8.2.3 Pencatatan dan Penyajian.....	119
8.3 Akuntansi Sewa.....	120
8.3.1 Sewa.....	120
8.3.2 Pengakuan Sewa.....	121
8.3.3 Proses Sewa.....	121
8.3.4 Keuntungan Serta Kerugian Sewa.....	122
8.3.5 Jurnal.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
BAB 9 PENYUSUTAN, PENURUNAN NILAI, SERTA DEPLASI.....	125
9.1 Penyusutan.....	125
9.2 Penurunan Nilai.....	129
9.3 Depleksi.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	135
BAB 10 PENILAIAN PERSEDIAAN DAN PENILAIAN TAMBAHAN.....	137
10.1 Penilaian Persediaan.....	137
10.2 Penilaian Tambahan.....	141
10.2.1 Nilai Realisasi Lebih Rendah Biaya atau Bersih / <i>LOWER-OF-COST-OR-NET</i> <i>REALIZABLE VALUE (LCNRV)</i>	141
10.2.2 Dasar Penilaian.....	145
10.2.3 Metode Laba Kotor Untuk Mengestimasi Persediaan.....	147
10.2.4 Metode Persediaan Eceran.....	149
10.2.5 Penyajian Dan Analisis.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	154
BAB 11 LIABILITAS JANGKA PENDEK DAN LIABILITAS JANGKA PANJANG.....	155
11.1 Pendahuluan.....	155
11.2 Pengertian Liabilitas.....	156
11.3 Perbedaan Liabilitas dan Beban.....	157

11.4 Membandingkan Kewajiban dan Hutang.....	158
11.5 Jenis-Jenis Liabilitas	158
11.5.1 Liabilitas Jangka Panjang	159
11.5.2 Liabilitas Jangka Pendek	164
11.6 Implikasi Liabilitas pada Keuangan Perusahaan .	170
11.7 Kesimpulan.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	173
BAB 12 NILAI WAKTU UANG DAN LAPORAN	
KEUANGAN.....	175
12.1 Pendahuluan	175
12.2 Konsep Nilai Waktu Uang	175
12.2.1 Future Value (Nilai Waktu Masa Depan)	176
12.2.2 Present Value (Nilai Waktu Sekarang)	177
12.2.3 Anuitas.....	177
12.3 Laporan Keuangan.....	180
12.3.1 Pengertian Laporan Keuangan	181
12.3.2 Arti Penting Laporan Keuangan	181
12.3.3 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan.....	183
12.3.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan....	184
12.3.5 Jenis dan Unsur Laporan Keuangan.....	186
DAFTAR PUSTAKA.....	188
BAB 13 LAPORAN ARUS KAS DAN LAPORAN	
POSISI KEUANGAN.....	189
13.1 Pendahuluan	189
13.2 Laporan Posisi Keuangan.....	189
13.2 Laporan Arus Kas.....	198
DAFTAR PUSTAKA.....	203
BAB 14 KEBIJAKAN AKUNTANSI, SERTA	
PERUBAHAN-PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI... 205	
14.1 Pendahuluan	205
14.2 Kebijakan Akuntansi (<i>Accounting Policy</i>).....	206
14.2.1 Perlakuan Akuntansi Akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	208
14.2.2 Konflik Kepentingan Kebijakan Akuntansi ...	209
14.2.3 Pengungkapan.....	210
14.3 Estimasi Akuntansi.....	212
14.3.1 Perubahan Estimasi Akuntansi.....	212

DAFTAR PUSTAKA.....	216
BAB 15 ISU-ISU DI SEPUTAR AKUNTANSI	
KEUANGAN	219
15.1 Urgensi Akuntansi Keuangan	219
15.2 Isu Kontemporer Akuntansi Keuangan	221
15.3 Standar Akuntansi Keuangan	223
15.4 Akuntansi Keuangan di Masa Depan	225
DAFTAR PUSTAKA.....	229
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Laporan Rekonsiliasi Bank PT. CAHAYA....	35
Gambar 3.2. Laporan Rekonsiliasi Bank PT. SUNDA	38
Gambar 5.1. Frekuensi atas Pengungkapan Aset takberwujud studi pada 70 Perusahaan di Indonesia yang dikompilasi oleh penulis	76
Gambar 7.1. Ringkasan penjelasan bab 7.....	96
Gambar 7.2. Identifikasi komponen yang digunakan dalam metode <i>with and without</i>	99
Gambar 8.1. Akuntansi Pajak Penghasilan	118
Gambar 13.1. Laporan Posisi Keuangan.....	193
Gambar 13.2. Laporan Arus Kas Metode Langsung.....	201
Gambar 13.3. Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung.....	202

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. PT. XYZ Metode Garis Lurus.....	61
Tabel 4.2. PT. XYZ Metode Saldo Menurun Berganda	62
Tabel 4.3. PT. XYZ Metode Jumlah angka tahun.....	64
Tabel 4.4. PT. XYZ Metode Jumlah unit produksi	65
Tabel 4.5. PT. XYZ Metode JAM KERJA MESIN.....	67
Tabel 5.1. Perbandingan Aset Tak Berwujud.....	79
Tabel 7.1. Perhitungan Amortisasi Obligasi Metode Bunga Efektif.....	102
Tabel 13.1. Sumber daya Ekonomik dan Klaim	190
Tabel 13.2. Klasifikasi Elemen-Element Laporan Posisi Keuangan.....	194
Tabel 14.1. Perbandingan nilai Akumulasi dan Beban Penyusutan.....	214

BAB 1

AKUNTANSI KEUANGAN DAN NILAI

MATA UANG

Oleh Novia Rizki

1.1 Perbandingan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen

Ilmu akuntansi sesungguhnya dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan keduanya cukup signifikan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut (Mowen et al., 2017):

1. Pengguna

Akuntansi keuangan berfokus untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak eksternal, yaitu investor, pemerintah, auditor dan Masyarakat umum lainnya. Sementara akuntansi manajemen berfokus untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pihak internal, yaitu manajemen di dalam perusahaan baik top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Setiap tingkatan manajemen mungkin saja membutuhkan informasi yang berbeda-beda.

2. Masukan dan Proses

Masukan dan proses akuntansi keuangan harus berdasarkan aturan akuntansi yang berlaku umum yang telah ditetapkan oleh SEC dan FASB. Semua aktivitas ekonomi memiliki perlakuan dan penyajian masing-masing yang sudah jelas. Sementara akuntansi manajemen menggunakan masukan dan proses yang tidak ditentukan oleh Lembaga tertentu, tidak terdapat format isi maupun aturan tertentu dalam penyusunan laporan akuntansi manajemen, sehingga format dan isi dari laporan manajemen setiap perusahaan akan berbeda-beda.

3. Informasi

Akuntansi keuangan akan menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi. Hal ini memungkinkan setiap orang dapat membaca laporan akuntansi keuangan dari perusahaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang tersebut. Sementara akuntansi manajemen menyajikan informasi yang bersifat subjektif berupa informasi keuangan dan non keuangan. Tidak semua orang dapat mengakses dan mengerti isi dari informasi tersebut.

4. Waktu

Akuntansi keuangan membuat laporan berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah lalu sehingga disebut berorientasi historis. Akuntansi manajemen terkadang juga menyajikan informasi masa lalu, namun lebih berfokus pada kejadian atau prediksi masa depan. Hal ini diperlukan untuk mengambil keputusan serta perencanaan perusahaan kedepannya.

5. Agregasi

Akuntansi keuangan berkonsentrasi pada kinerja perusahaan seluruhnya dan lebih bersifat umum. Sementara akuntansi manajemen menyediakan laporan internal guna melakukan evaluasi atas kinerja manajemen, dari segi produk, departemen, dan manajemen sehingga akuntansi manajemen harus menyajikan laporan yang lebih detail.

6. Cakupan

Akuntansi manajemen mencakup berbagai bidang ilmu yang menunjukkan aspek-aspek manajerial, teknik industri, dan bidang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi perusahaan, sementara akuntansi keuangan lebih sempit dan bersifat mandiri.

1.2 Laporan Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan lebih kepada menyajikan informasi yang objektif berupa aktivitas ekonomi perusahaan yang dituangkan dalam angka-angka dan menggunakan prinsip akuntansi yang berterima umum yang telah dirumuskan oleh

Lembaga yang berwenang. Informasi akuntansi keuangan digunakan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan saling terhubung satu sama lain sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

Laporan ini menyajikan informasi pendapatan yang dikurangi oleh beban secara akrual, sehingga untuk pendapatan dan beban yang bukan merupakan milik periode berjalan tidak dapat diakui pada periode ini. Laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, dagang dan manufaktur agak sedikit berbeda untuk pengelompokan biayanya. Laporan laba rugi untuk perusahaan jasa lebih sederhana dibandingkan laporan laba rugi perusahaan dagang dan manufaktur. Laporan laba rugi perusahaan jasa hanya mengurangi pendapatan dengan beban yang dikeluarkan, sedangkan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang harus menyelipkan perhitungan harga pokok pembelian barang dan beban penjualan sebelum beban umum dalam operasional perusahaan. Perusahaan manufaktur memiliki perhitungan laba rugi yang lebih kompleks, dimana perusahaan harus memperhitungkan harga pokok produksi atas barang yang terjual dengan metode yang sesuai untuk mendapatkan biaya produksi yang paling akurat per unit atau per *batch*. Pendapatan dalam perusahaan manufaktur harus dikurangi dengan biaya produksi atas barang yang terjual, lalu mengurangnya dengan beban umum dalam perusahaan. Contoh format Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

PT XYZ

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain yang berakhir pada 31 Desember 20X2
(dalam ribuan rupiah)

	20X1	20X2
Pendapatan	xxx	xxx
Pendapatan lainnya	xxx	xxx
Beban-beban	xxx	xxx
Laba sebelum pajak	xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	xxx	xxx
Laba tahun berjalan	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain	xxx	xxx
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	xxx	xxx
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	xxx	xxx
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain:	xxx	xxx
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx	xxx
Lindung nilai arus kas		
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	xxx	xxx
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disusun setelah mengetahui laba tahun ini untuk diakumulasikan dengan ekuitas akhir tahun lalu. Ekuitas tahun lalu akan ditambahkan dengan ekuitas yang diterbitkan tahun ini (jika ada), ditambahkan dengan saldo laba tahun ini yang sudah dikurangi dengan dividen yang didistribusikan kepada pemegang saham. Dividen adalah *return* yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang biasanya diumumkan dan dibagikan akhir tahun. Perusahaan dapat membagi dividen lebih kecil dari laba yang dihasilkan, sama dengan laba yang dihasilkan, maupun lebih besar dari laba yang dihasilkan tahun ini (harus terdapat kelebihan saldo laba tahun sebelumnya). Kadangkala, perusahaan juga tidak membagikan dividen sesuai dengan tahun dihasilkannya laba, sehingga diakumulasi untuk tahun-tahun berikutnya.

3. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas akhir perusahaan setelah diakumulasi dengan hasil operasional tahun ini berupa laba dan rugi dan mempengaruhi ekuitas perusahaan. Laporan posisi keuangan akan memisahkan aset dan liabilitas dalam kelompok masing-masing dan mengelompokkan dalam aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas lancar dan tidak lancar.

Contoh Format Laporan Posisi Keuangan

PT XYZ Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam ribuan rupiah)		
	31 des 20X1	31 des 20X2
ASET		
Aset Lancar: Kas dan setara kas	xxx	xxx

Piutang usaha	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
Aset lancar lain	XXX	XXX
Total Aset Lancar	XXX	XXX
Aset Tidak Lancar:		
Aset tetap	XXX	XXX
Aset tidak berwujud Lain	XXX	XXX
Goodwill	XXX	XXX
Total Aset Tidak Lancar	XXX	XXX
Total Aset	XXX	XXX
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek:	XXX	XXX
Utang usaha dan utang lain	XXX	XXX
Bagian pinjaman jangka panjang	XXX	XXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXX	XXX
Liabilitas Jangka Panjang:	XXX	XXX
Pinjaman jangka panjang	XXX	XXX
Pajak tangguhan		
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXX	XXX
Total Liabilitas	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX
Modal saham		
Saldo laba	XXX	XXX
Komponen ekuitas lain		
Total Ekuitas		
Total Liabilitas dan Ekuitas		

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan penggunaan dan penghasilan kas dan setara kas yang ada diperusahaan. Laporan arus kas berguna untuk mengetahui perubahan aset neto, struktur keuangan, serta melakukan analisis atas kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan perubahan dan peluang yang terus berubah. Arus kas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas aktivitas operasi terdiri dari aktivitas penghasilan kas dan beban yang dibayarkan dengan kas yang terkait dengan operasi perusahaan yang rutin. Arus kas aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan pada ekuitas dan pinjaman perusahaan. Sementara arus kas aktivitas investasi merupakan aktivitas yang terkait dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lainnya yang bukan setara kas.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan secara umum berisi penjelasan naratif atau pemisahan pos-pos, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi kriteria, yang ada dalam seluruh laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Contohnya dalam catatan atas laporan keuangan disajikan secara rinci nama debitur atas piutang, rincian kreditur atas utang, rincian saldo masing-masing aset dan perhitungan penyusutannya yang saldo keseluruhannya untuk masing-masing akun tersebut sudah tersaji dalam laporan posisi keuangan.

1.3 Standar Akuntansi Keuangan

Terdapat dua standar akuntansi keuangan yang secara umum digunakan dinegara-negara di dunia, yaitu IFRS (*International Financial Report Standard*) yang disusun oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) dan US GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) yang disusun oleh FASB (*Financial Accounting Standard Board*). Indonesia mengadopsi IFRS dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan)

yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dengan mempertimbangkan segala kondisi yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan dalam prinsip akuntansi antara IFRS dan US GAAP, sehingga negara harus menetapkan untuk mengadopsi salah satu standar agar konsistensi akuntansi keuangan tetap terjaga.

Perbedaan antara SAK dan IFRS diharapkan semakin sedikit sehingga manfaat bagi pengguna di Indonesia semakin dapat dirasakan. Dalam penyusunan SAK, IAI menggunakan prinsip *due process procedure* yaitu identifikasi isu, konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK jika diperlukan, riset terbatas, pembahasan materi, pengesahan dan publikasi ED (*Exposure Draft*), *public hearing*, *limited hearing* jika dibutuhkan, pembahasan masukan publik, hingga pengesahan SAK (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Jika IFRS mengalami perubahan pada suatu prinsip atau perlakuan dalam akuntansi keuangan, maka IAI akan mengkaji apakah SAK juga perlu mengalami perubahan.

1.4 Nilai Mata Uang dalam Akuntansi Keuangan

PSAK 221 mengatur Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Perusahaan mungkin saja memiliki aktivitas dalam negeri dan luar negeri. Jika perusahaan memiliki aktivitas luar negeri dan menggunakan mata uang asing sebagai mata uang transaksinya, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk menilai transaksi tersebut sesuai dengan mata uang pelaporan perusahaan agar dapat diakumulasikan dengan transaksi lainnya.

Transaksi dalam valuta asing harus ditranslasi ke dalam mata uang fungsional perusahaan, beberapa kondisi berikut dapat timbul karena beberapa kejadian berikut:

1. Membeli atau menjual barang dan jasa yang dinyatakan dalam valuta asing
2. Utang dan piutang dalam valuta asing
3. Memperoleh atau melepas aset baik dari jual beli atau hibah, memperoleh atau membayar liabilitas dalam valuta asing

Pada akhir periode maka pelaporan atas transaksi dengan valuta asing disajikan sebagai berikut:

1. Pos moneter disajikan dengan kurs penutup.
2. Pos nonmoneter yang diukur pada biaya historis dalam valuta asing menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
3. Pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan dengan kurs pada tanggal ketika nilai wajar tersebut diukur.

Kurs penutup adalah kurs pada akhir periode, jika akhir periode laporan keuangan adalah 31 Desember maka kurs yang digunakan adalah 31 Desember. Contohnya adalah pengakuan piutang yang awalnya menggunakan kurs pada saat terjadi, maka harus diukur dan disajikan kembali dengan kurs 31 Desember. Sementara kurs historis adalah kurs pada tanggal terjadinya transaksi, seperti pengakuan aset (nonmoneter) harus dinilai pada saat pembelian aset dan tidak perlu diukur kembali dengan kurs pada akhir periode pelaporan.

A. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional atau mata uang yang digunakan sebagai transaksi utama perusahaan dapat didasarkan pada lingkungan ekonomi dimana perusahaan tersebut beroperasi. Faktor-faktor berikut dapat dipertimbangkan untuk menentukan mata uang fungsional perusahaan:

1. Yang paling mempengaruhi harga jual dan harga beli dari bahan baku dan barang yang dijual oleh perusahaan. Misalnya perusahaan Indonesia yang berada di Singapura dimana mereka membeli bahan baku di Singapura dan menjual produk di Singapura, maka sebaiknya perusahaan menggunakan dollar Singapura sebagai mata uang fungsionalnya.
2. Dari negara yang paling mempengaruhi persaingan dan peraturannya paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, seperti dollar Amerika dan Yen Cina. Terdapat beberapa faktor tambahan juga yang bisa menjadi pertimbangan seperti mata uang aktivitas pendanaan, mata uang aktivitas operasi, dan lain sebagainya.

Jika terjadi pencampuran beberapa indikator, maka manajemen perusahaan harus melakukan pertimbangan yang lebih komperhensif sehingga mata uang fungsional menjadi jelas dan tidak mengalami perubahan. Mata uang fungsional harus dapat mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi relevan dari perusahaan.

B. Mata Uang Penyajian

Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Umumnya di Indonesia, mata uang penyajian adalah Rupiah. Jika perusahaan memiliki banyak cabang diluar negeri dengan banyak mata uang yang berbeda, maka laporan keuangan dari seluruh cabang harus disajikan dalam mata uang yang sama sehingga laporan konsolidasi dapat disusun.

Penyajian laporan keuangan dalam mata uang penyajian dengan mata uang fungsional yang berbeda dari negara yang tidak mengalam hiperinflasi dapat disajikan sebagai berikut sesuai dengan PSAK 221:

- a. Aset dan liabilitas disajikan dengan kurs penutup.
- b. Penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi disajikan dalam kurs historis atau kurs pada tanggal transaksi.
- c. Selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih kurs dapat dihasilkan dari penjabaran penghasilan dan beban pada kurs historis serta aset dan liabilitas pada kurs penutup, dan juga dari penjabaran saldo awal aset neto karena perbedaan kurs penutup saat ini dengan kurs penutup periode sebelumnya.

Menurut PSAK 221 jika perusahaan menggunakan mata uang fungsional yang berbedaa dengan mata uang penyajian, perusahaan harus mengungkapkan fakta tersebut dan memberikan alasan. Jika perusahaan melakukan perubahan atas mata uang fungsional yang digunakan sehingga memberikan pengaruh yang signifikan, maka perusahaan juga harus mengungkapkan fakta dan alasan yang mendasari perubahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 224 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*.
- Mowen, Maryanne M.; Hansen, Don R.; & Heitger, Dan L. (2017). *Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial Edisi 5*.

BAB 2

STANDAR AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Oleh Sri Rahayu Syah

2.1 Standar Akuntansi

Pada praktiknya, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berperan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang mengatur aliran informasi keuangan agar tetap pada koridor yang benar, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. SAK merupakan seperangkat prinsip, prosedur, dan panduan yang diadopsi oleh para profesional dalam bidang akuntansi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan aturan digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya prinsip keterbukaan dan konsistensi. Apabila perusahaan membuat laporan keuangan dengan caranya sendiri atau sesuai keinginan para Akuntan, akan mengakibatkan informasi yang disajikan dari laporan keuangan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan berkaitan erat dengan penyajian yang dilakukan oleh Akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan tidak mencerminkan kesesuaian informasi keuangan sehingga tidak dapat ditelusuri bukti transaksinya maka dapat berakibat rendahnya kualitas laporan keuangan. Penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku akan mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang kurang baik dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Firmansyah dkk, 2022).

Akuntan diwajibkan menyusun Laporan keuangan berdasarkan SAK untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yang mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang dapat ditelusuri bukti transaksinya. Laporan keuangan yang berkualitas baik akan memberikan informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan dan tidak menyesatkan penggunaannya.

SAK Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, selama tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK (Indonesia, 2023).

Seiring dengan kebutuhan dunia bisnis dan regulasi global yang dinamis, SAK senantiasa bertransformasi dengan melakukan revisi dan memperbarui pedomannya. SAK merupakan refleksi dari praktik terbaik yang telah diuji oleh waktu dan pengalaman di bidang akuntansi. Dengan penerapan SAK, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, menjaga integritas informasi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan transparan.

2.2 Pilar Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dirancang untuk memenuhi kebutuhan akuntansi yang spesifik dari berbagai sektor sesuai dengan jenis entitasnya. Berikut penjelasan dari jenis empat pilar SAK di Indonesia (Indonesia, 2023):

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK Internasional)

SAK Internasional berlaku bagi perusahaan dengan akuntabilitas publik berdasarkan peraturan regulator pasar

modal yang berlaku atau perusahaan juga dapat memilih SAK Internasional sebagai dasar pelaporan keuangannya.

SAK Internasional adalah PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang mengadopsi penuh IFRS *Accounting Standards* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) yang terdiri dari:

- a. Standar Pelaporan Keuangan Internasional
 - b. Standar Akuntansi Internasional
 - c. Interpretasi *International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC).
 - d. Interpretasi *Standing Interpretations Committee* (SIC).
2. **Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK Indonesia)**

SAK Indonesia berlaku bagi perusahaan dengan akuntabilitas publik yang tidak memiliki hak untuk memilih SAK Internasional sebagai dasar pelaporan keuangannya. SAK Indonesia juga berlaku bagi perusahaan yang memiliki hak namun memilih untuk tidak menggunakan SAK Internasional sebagai dasar pelaporan keuangannya.

3. **Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

SAK EP/SAK ETAP merupakan SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang digunakan oleh perusahaan privat atau perusahaan tanpa akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan keuangan. SAK Indonesia untuk EP akan berlaku efektif 1 Januari 2025. Penerapan lebih awal atau sebelum tanggal 1 Januari 2025 tetap diperkenankan. Mulai tanggal 1 Januari 2025 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

4. **Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM)**

SAK EMKM merupakan SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang digunakan untuk entitas mikro, kecil dan

menengah. SAK EMKM digunakan oleh Perusahaan privat atau Perusahaan tanpa akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode palaporan keuangan.

Perusahaan dapat memilih menggunakan SAK EP/SAK ETAP atau menggunakan SAK EMKM sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangannya apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh DSAK IAI.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan ISAK Syariah

Perusahaan syariah menggunakan PSAK Syariah yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangannya. Perusahaan syariah yaitu Perusahaan yang menjalankan bisnis syariah.

Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha dengan menyediakan produk atau jasa untuk memperoleh laba dengan berlandaskan pada prinsip Al-Quran dan Hadist yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Bisnis syariah yang sesuai dengan syariat Islam bukan sekedar mengutamakan laba pada aktivitas jual beli barang atau jasa yang harus dicatat namun mengutamakan konsep halal, prinsip etika dan akhlak dalam bermuamalah, produk yang diperjualbelikan dan akad dalam menjalankan usaha.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia di Indonesia berfungsi sebagai pedoman dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Transformasi jenis-jenis SAK di Indonesia menunjukkan kewajiban Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor usaha. Hal ini memperkuat kerangka keuangan publik, namun juga menjunjung potensi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditetapkannya pedoman ini, seluruh pihak, mulai dari UMKM hingga unsur pemerintah, dapat mengambil pilihan yang lebih terdidik dan cerdas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan keuangan dan bisnis di Indonesia.

2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016).

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan (Romney & Steinbart, 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan hasil perpaduan antara proses akuntansi dengan teknologi informasi yang saling berhubungan untuk mempermudah mengumpulkan, pengolahan data, pengelolaan data, penyajian data, serta pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan. Tujuan utamanya untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan pekerjaan manusia dalam suatu Perusahaan.

2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Setelah memahami dasar-dasar Sistem Informasi Akuntansi, kini melangkah lebih jauh untuk menyelidiki tujuan dasar yang dilakukan oleh kerangka ini. Tujuan-tujuan ini membentuk landasan bagi para eksekutif untuk mendapatkan informasi keuangan yang baik, yang secara signifikan mempengaruhi cara organisasi menjalankan tugasnya dan mengambil keputusan. Kita harus melihat sejenak pentingnya setiap tujuan utama Sistem Informasi Akuntansi yang memainkan peran penting dalam meningkatkan administrasi keuangan suatu perusahaan.

1. Mengelola Data Keuangan dengan Efisiensi.

Sistem Informasi Akuntansi berarti mengawasi informasi moneter dengan cara yang lebih produktif. Dengan menggunakan inovasi data, kerangka ini memungkinkan pencatatan, penanganan, dan perincian informasi moneter dengan cepat dan tepat.

2. Menyediakan Informasi yang Relevan dan Akurat.

Sistem Informasi Akuntansi dimaksudkan untuk memberikan data moneter yang signifikan dan tepat. Melalui siklus yang terkomputerisasi, kerangka ini menjamin bahwa data yang dibuat dapat dipercaya arahnya

3. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat.

Salah satu tujuan mendasar dari Sistem Informasi Akuntansi adalah untuk membantu menyesuaikan dinamika dalam perusahaan. Dengan memberikan informasi yang terorganisir dan terkoordinasi, kerangka kerja ini memungkinkan pimpinan mengambil pilihan yang lebih baik.

4. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Sistem Informasi Akuntansi juga berarti bekerja pada produktivitas fungsional organisasi. Dengan mempercepat siklus pembukuan dan mengurangi kesalahan manusia, kerangka kerja ini membantu Perusahaan untuk bekerja dengan lebih efisien.

5. Menjamin Keamanan Data Keuangan

Alasan lain dibuatnya Sistem Informasi Akuntansi adalah untuk menjaga keamanan informasi moneter. Melalui pengaturan kontrol akses yang sesuai, kerangka kerja ini berupaya melindungi data sensitif dari akses yang tidak disetujui.

2.5 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Setelah melihat tujuan mendasar dari Sistem Informasi Akuntansi, penting untuk melangkah lebih jauh dan menyelidiki pekerjaan utama yang menjadi landasan kerangka ini. Kemampuan ini menjadikan pembentukan administrasi moneter yang kuat, membentuk titik awal yang kuat bagi kemajuan Perusahaan dalam memahami dan meningkatkan proses pembukuan mereka. Pimpinan perusahaan perlu menggali lebih jauh bagaimana masing-masing kemampuan Sistem Informasi Akuntansi membawa perubahan dan memberikan perubahan besar dalam pengawasan informasi

moneter dalam suatu perusahaan. Berikut ini fungsi Sistem Informasi Akuntansi:

1. Pencatatan Transaksi yang Terstruktur.

Pencatatan transaksi yang terstruktur merupakan inti dari Sistem Informasi Akuntansi. Pencatatan yang dimaksud yaitu mengatur setiap transaksi keuangan secara menyeluruh, mulai dari pembelian, transaksi, hingga aktivitas keuangan lainnya. Melalui pencatatan yang terorganisir, Sistem Informasi Akuntansi melakukan tinjauan signifikan dan menjamin integritas informasi moneter.

2. Pengolahan Data yang Akurat.

Sistem Informasi Akuntansi mengolah data dengan cermat. memproses informasi dengan hati-hati. Sistem penanganan ini mencakup perhitungan, penggabungan informasi, dan pembuatan laporan moneter yang memberikan data berharga kepada para eksekutif dan pihak terkait.

3. Penyajian Informasi yang Relevan.

Titik fokus utama Sistem Informasi Akuntansi adalah memperkenalkan data moneter yang mudah dipahami. Melalui laporan keuangan yang terorganisir, sistem ini memberikan ikhtisar kegiatan keuangan perusahaan berupa laporan keuangan.

4. Manajemen Inventaris yang Efisien.

Sistem Informasi Akuntansi juga mencatat perubahan persediaan barang untuk manajemen inventaris yang efisien. Hal ini mencakup pencatatan persediaan barang dagang, kualitas persediaan barang dagang, dan perubahan persediaan barang dagang secara mendalam. Ini membantu manager dalam mengawasi jumlah persediaan barang dagang dan mengambil pilihan terkait persediaan barang dagang.

5. Pengendalian Keamanan Data yang Ketat.

Keamanan informasi pada dasarnya penting dalam Sistem Informasi Akuntansi. Kerangka kerja ini dilengkapi dengan kontrol akses yang ketat untuk melindungi data keuangan dari bahaya digital dan akses yang tidak disetujui, menjamin privasi dan integritas informasi.

6. Analisis Kinerja Keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi mencatat data dan mengolah data untuk menghasilkan informasi dengan memberikan analisis mendalam terkait kinerja laporan keuangan perusahaan. Manajer dapat membedah kinerja laporan keuangan perusahaan. Untuk mengambil keputusan penting yang lebih baik. Kapabilitas ini merupakan institusi yang secara signifikan berdampak pada cara perusahaan mengawasi dan memanfaatkan informasi moneter. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, perusahaan dapat meningkatkan administrasi moneter dan mengambil pilihan yang lebih baik.

2.6 Kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

1. Sulitnya Mengintegrasikan Sistem

Pada praktiknya, tidak mudah memadukan Sistem Informasi Akuntansi yang baru dengan system yang lama atau dengan budaya/kebiasaan yang ada di perusahaan. Hal ini membuat perubahan yang membuat pengguna beralih dari manual menggunakan system untuk menghasilkan informasi yang lebih baik, cepat dan akurat.

2. Biaya Implementasi yang Tinggi

Dalam merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi dibutuhkan biaya yang besar. Bagi perusahaan skala kecil, biaya implementasi pengembangan sistem, terkait biaya pembuatan sistem operasi (perangkat lunak), relative tinggi dan memberatkan perusahaan.

3. Pelatihan Karyawan yang Menantang

Selain biaya implementasi yang besar dalam membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam memberikan pelatihan kepada karyawan dalam menggunakan sistem akuntansi yang baru. Selain biaya, perusahaan membutuhkan waktu agar karyawan di perusahaan dapat mengerti dan mampu mengoperasikan system yang baru dengan baik. Pada umumnya kendala

yang dihadapi oleh perusahaan yaitu, seorang individu tidak menyukai adanya perubahan karena sudah nyaman dengan system yang berjalan saat ini. Namun demi menghasilkan informasi yang dan pengambilan keputusan yang lebih baik, perusahaan perlu melakukan perubahan.

4. Kesulitan Migrasi Data

Beralih dari system yang lama menuju Sistem Informasi Akuntansi yang baru bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh perusahaan. Biasanya ada kendala yang dihadapi, diantara masih belum menguasai Sistem Informasi Akuntansi yang baru dan kesulitan dalam migrasi data sehingga membutuhkan pendampingan dari seorang konsultan.

5. Keamanan Data yang Perlu Perhatian

Sistem Informasi Akuntansi perlu security yang tinggi agar data perusahaan dapat terjaga dan aman. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terkait keamanan data perusahaan, sebaiknya perusahaan menyiapkan backup data agar semua data disimpan di tempat yang aman dan menyiapkan username dan password agar tidak semua orang dapat mengakses data yang bersifat penting dan rahasia.

6. Ketergantungan pada Teknologi Informasi

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, manusia menjadi sangat bergantung pada teknologi informasi tersebut. Biasanya setiap system operasi yang digunakan memerlukan update agar tetap relevan bagi penggunanya.

7. Kesesuaian dengan Kebutuhan Bisnis

Dalam merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi, perlu merancang sistem operasi (perangkat lunak) sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya Sistem Informasi Akuntansi untuk perusahaan jasa berbeda dengan Sistem Informasi Akuntansi untuk perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. lebih spesifik lagi misalnya sistem operasi (perangkat lunak) yang digunakan di Perhotelan biasanya berbeda dengan sistem operasi (perangkat lunak) yang digunakan dengan di Perbankan atau di Rumah Sakit. Karena perusahaan tersebut membutuhkan detail detail yang cukup rumit.

2.7 Strategi Mengatasi Kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

1. Perencanaan yang Teliti

Langkah pertama sebelum implementasi Sistem Informasi Akuntansi yaitu perancangan dan pengembangan system informasi Akuntansi. Dalam hal ini perlu memahami system dan prosedur serta SOP yang ada diperusahaan sebagai dasar dalam merancang dan membangun system sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan perlu menentukan *time line* yang realistis, menyiapkan anggaran yang tepat untuk menghindari biaya yang terlampau tinggi dan membuat analisis SWOT (*strengths/kekuatan*), *weaknesses/kelemahan*, *opportunities/ peluang*, dan *threats/ancaman*) untuk menghindari risiko proyek yang bisa saja terjadi.

2. Pelatihan Berkesinambungan

Pelatihan kepada karyawan tidak hanya diberikan di awal pada saat implementasi Sistem Informasi Akuntansi yang baru, pelatihan kepada karyawan perlu dibuatkan jadwal agar terjadi secara berkelanjutan dan dapat mengembangkan keterampilan secara berkelanjutan. Pelatihan kepada karyawan focus untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem operasi (perangkat lunak) secara optimal.

3. Pendekatan Bertahap

Eksekusi tahap demi tahap membatasi risiko dan mempertimbangkan transformasi yang lebih lancar. Memulai dengan modul kecil mempertimbangkan penilaian tanpa henti dan perubahan yang tepat.

4. Pengujian Mendalam

Meninjau dan menguji kerangka kerja sebelum peluncuran penuh adalah hal yang mendasar. Siklus ini mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum kerangka kerja digunakan secara umum.

5. Peningkatan Keamanan

Berpusat pada upaya keamanan yang kuat seperti enkripsi informasi, akses ketat kepada para eksekutif, dan pengamatan dinamis. Informasi perlindungan keamanan yang diperbarui secara konsisten dari kemungkinan bahaya.

6. Konsultasi Profesional

Melibatkan spesialis atau pakar berpengalaman membawa sedikit pengetahuan baru dan pengaturan terbaik. Seorang spesialis atau pakar berpengalaman dapat menjadi konsultan yang dapat mendampingi perusahaan serta memberikan pengetahuan penting ke dalam strategi dan sistem terbaik.

7. Evaluasi Berkala dan Penyesuaian

Selain tahap perencanaan dan implementasi sistem, hal yang tidak kalah penting yaitu evaluasi sistem secara berkala dan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadwal penilaian kerangka kerja membantu dalam mengidentifikasi masalah dan perubahan yang mungkin timbul. Interaksi ini menjamin kerangka kerja ini dapat diterapkan dan berhasil.

2.7 Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi

Memfaatkan Sistem Informasi Akuntansi bukan hanya tentang pencatatan, pemrosesan dan penyajian informasi moneter. Hal ini mempunyai konsekuensi yang signifikan bagi perusahaan Mulai dari ketepatan informasi hingga arahan independen, kerangka kerja ini secara mendasar mempengaruhi produktivitas dan kualitas administrasi moneter perusahaanyang tak tergoyahkan. Berikut ini dampak signifikan yang ditimbulkan oleh Sistem Informasi Akuntansi:

1. Peningkatan Akurasi Data Keuangan

Sistem Informasi Akuntansi membantu menjamin informasi moneter yang lebih tepat. Melalui komputerisasi proses pencatatan dan pengumuman, kesalahan manusia dapat dibatasi, dengan mempertimbangkan pilihan yang lebih tepat.

2. Efisiensi Operasional

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi meningkatkan siklus moneter organisasi. Dari pencatatan pertukaran hingga menyiapkan laporan, kerangka kerja ini mempercepat dan meningkatkan proses, sehingga mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan.

3. Peningkatan Transparansi

Sistem Informasi Akuntansi memberikan pemahaman yang lebih penting ke dalam pameran keuangan suatu perusahaan. Hal ini membantu para eksekutif dan mitra untuk lebih siap mengetahui laporan keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Dengan informasi moneter yang tepat dan laporan yang terorganisir, pengawas dapat mengambil pilihan yang lebih terdidik dan terukur. Ini membantu dalam persiapan kunci dan strategis perusahaan.

5. Kepatuhan dan Ketaatan Hukum:

Sistem Informasi Akuntansi menjamin bahwa perusahaan tetap mematuhi pedoman dan prinsip pembukuan yang relevan. Hal ini mengurangi pertaruhan pemberontakan dan menjauhi persetujuan yang sah.

6. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik

Sistem Informasi Akuntansi ini membantu dalam membedakan bukti, penilaian, dan moderasi risiko moneter. Dengan pemeriksaan yang lebih baik, organisasi dapat mengurangi risiko keuangan yang tidak diinginkan.

7. Peningkatan Produktivitas dan Penghematan Biaya

Mekanisasi siklus keuangan membantu meningkatkan efisiensi pekerja dan mengurangi biaya manajerial yang terkait dengan pengawasan informasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181-197.
- Indonesia, I. A. (2023). Kode etik akuntan Indonesia. *Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Marshall, B., & Romney, P. J. (2021). Accounting Information Systems, 15th Global Edition (15 Ed.). Pearson.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 3

KAS DAN PIUTANG

Oleh Ika Wulandari

3.1 Pengertian Kas

Kas adalah uang tunai dan yang setara dengan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan untuk operasionalnya. Kas adalah harta lancar yang paling likuid (lancar) sehingga paling mudah diselewengkan (Hans, 2016). Sedangkan menurut (Hery, 2017) Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel pos (kiriman uang lewat pos; money orders), dan deposito. Oleh karena itu harus ditangani dengan seksama dengan menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi. Namun untuk transaksi tunai yang jumlahnya kecil dapat menggunakan kas yang ada dengan membentuk sistem dana kas kecil.

Berikut adalah kelompok kas atau setara dengan kas (Nuh, 2014) :

1. Uang Tunai
Merupakan alat pembayaran yang sah yang fungsinya untuk menukar barang, jasa dan lain sebagainya
2. Wesel Pos
Merupakan salah satu layanan dari pengiriman dan penerimaan uang dari Pos Indonesia baik secara nasional maupun internasional yang prosesnya cepat, tepat dan aman
3. Simpanan uang di Bank
Merupakan dana yang dipercaya masyarakat untuk disimpan di bank baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan jenis lainnya
4. Cek
Merupakan dokumen yang berfungsi untuk membayar sejumlah uang ke pihak mana pun/ perintah bayar yang diberikan dari nasabah ke bank yang bisa dicairkan secara tunai

5. Bilyet Giro
Merupakan dokumen yang berfungsi untuk membayar sejumlah uang kepihak mana pun/ perintah bayar yang diberikan dari nasabah ke bank yang tidak bisa dicairkan secara tunai tetapi harus melalui pemindahanbukuan ke rekening penerima
6. Surat perintah bayar (*Money Order*)
Merupakan surat yang diperoleh dari satu kantor lain, agen suatu bank, kantor pos atau lembaga keuangan lainnya yang berisi perintah untuk melakukan pembayaran uang kepada penerima
7. *Traveller Check*
Merupakan alat pembayaran bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri, bertujuan untuk mendanai perjalanan selama diluar negeri
8. Wesel Bank
Instrument pembayaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan perbankan

Uang tunai/ kas memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah :

1. Langsung bisa digunakan sebagai alat pembayaran
2. Bentuknya kecil dan sangat ringan
3. Sangat mudah ditukar dengan barang lain
4. Nilai uang yang terdapat diuang tunai tersebut lebih tinggi dari pada bahan pembuata uang tunai tersebut

Kas dapat dibagi menjadi dua (Kieso, 2014):

1. Kas ditangan (*Cash On Hand*)
Merupakan sejumlah uang tunai yang masih berada di perusahaan dan belum disetor ke bank, kas ditangan ini terbagi 2, yaitu:
 - a. Kas dalam mata uang rupiah/ mata uang asing, merupakan sejumlah uang kas baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing yang ada diperusahaan selain uang kas kecil
 - b. Kas kecil (*Petty Cash*), merupakan sejumlah uang kas yang disisihkan/ dicadangkan oleh perusahaan yang

bertujuan membayar keperluan rutin operasional perusahaan dalam jumlah kecil

Pengelolaan dana kas kecil biasanya langsung dipegang oleh bagian kasir atau sekretaris yang ditunjuk oleh perusahaan. Kas kecil ini khusus untuk pengeluaran rutin setiap hari perusahaan yang nilainya kecil, sehingga pada saat pengeluaran tidak perlu otorisasi dari pimpinan. Tujuan dilakukannya pemisahan antara pengeluaran yang jumlahnya kecil dan rutin dengan pengeluaran yang jumlahnya besar dan tidak rutin adalah untuk membuat sistem pengendalian yang baik agar pengeluaran kas kecil bisa di kontrol dengan baik dengan cara :

- 1) Menetapkan batas pengeluaran maksimal, bisa perhari atau perminggu
- 2) Menetapkan satu rekening khusus untuk petty cash
- 3) Menetapkan adanya otorisasi pada saat permintaan dana kas kecil, penggunaan dana kas kecil dan pengesahan laporan kas kecil
- 4) Membuat formulir yang harus digunakan untuk transaksi kas kecil

Ada dua metode pencatatan kas kecil yang bisa digunakan oleh perusahaan (Murniati, 2022) :

a. Sistem Dana Tetap (*Imprest Fund System*)

Merupakan sistem pencatatan dana kas kecil yang jumlahnya selalu tetap

Karakteristik sistem dana tetap :

- 1) Dana kas kecil jumlahnya tetap
- 2) Pengisian dana kas kecil akan dilakukan sebanyak bukti-bukti pengeluaran
- 3) Bukti bukti pengeluaran kas kecil diserahkan oleh pengelola kas kecil kepada pemegang jurnal
- 4) Dibuat pencatatan jurnal dari pengeluaran yang terjadi

Jurnal yang diperlukan jika menggunakan sistem dana tetap

- 1) Pembentukan dana kas kecil :

- | | | |
|--------------------------|----|----|
| Kas Kecil | xx | |
| Kas ditangan/kas di Bank | | xx |
- 2) Pengisian kembali dana kas kecil :
- | | | |
|------------------------|----|----|
| Biaya Listrik | xx | |
| Biaya Bensin | xx | |
| Biaya Perlengkapan | xx | |
| Kas ditangan/ Kas Bank | | xx |
- b. Sistem Dana Berubah (*Fluctuating Fund System*)
 Pengisian dana kas kecil yang jumlahnya tidak selalu sama dengan saldo awal pengisian dana kas kecil
 Karakteristik sistem dana berubah :
- 1) Pembentukan dana kas kecil tergantung pada kebutuhan perusahaan yang nilainya bisa besar/kecil
 - 2) Pencatatan oleh bagian akuntansi mengikuti perubahan kas kecil sesuai dengan tanggal dan jumlah bukti pemakaian dana kas kecil
 - 3) Dilakukan pencatatan jurnal
- Jurnal yang diperlukan jika menggunakan sistem dana berubah :
- 1) Pembentukan dana kas kecil :

Kas Kecil	xx	
Kas ditangan/kas di Bank		xx
 - 2) Pengisian kembali dana kas kecil :

Biaya Listrik	xx	
Kas ditangan/kas di bank		xx
Biaya Bensin	xx	
Kas ditangan/kas di Bank		xx
Biaya Perlengkapan	xx	
Kas ditangan/ Kas Bank		xx

Pelaporan dana kas kecil ke kepala keuangan tergantung dari ketentuan perusahaan, jika perusahaan besar dan pengeluarannya banyak maka pelaporan dana kas kecil dilakukan setiap hari, ada juga yang setiap seminggu sekali yaitu setiap hari sabtu. Tujuan dari pelaporan dana kas kecil ini adalah untuk mencocokkan jumlah dana kas kecil yang

diberikan, dana yang terpakai dengan bukti faktur pembayaran dan sisa uang yang ada.

2. Kas di Bank (*Cash In Bank*)

Merupakan sejumlah uang tunai yang disimpan di bank yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan

Ada tiga jenis simpanan di bank :

a. Tabungan

Merupakan simpanan uang di bank yang bertujuan untuk titipan uang, dan dapat dilakukan penarikan kapan saja dengan syarat tertentu

b. Deposito

Merupakan salah satu produk dari bank, yang merupakan tempat penyimpanan uang, dapat diambil sesuai waktu yang ditentukan dan perjanjian yang telah disepakati yang tujuannya adalah untuk investasi

c. Giro

Merupakan salah satu produk dari bank untuk penyimpanan uang baik untuk individu atau perusahaan, yang penyimpanan dananya dalam jumlah yang banyak yang tujuannya adalah untuk transaksi bisnis

Perusahaan yang memiliki rekening giro harus :

1. Membuat catatan khusus (Buku Bank)
2. Meminta laporan mutasi kas ke bank (Laporan Rekening Koran)
3. Mencocokkan data buku bank dengan rekening koran
4. Membuat Laporan Rekonsiliasi Bank (jika ada ketidakcocokan saldo catatan)
5. Membuat jurnal penyesuaian/koreksi yang diperlukan

3.2 Rekonsiliasi Bank

Merupakan suatu proses melakukan pencocokan penyesuaian antara catatan/ transaksi menurut nasabah dan catatan/ transaksi menurut bank. Menurut (Martani, Dwi. Siregar, Sylvia Veronica, 2016) rekonsiliasi bank merupakan

rangkaian catatan informasi yang menjelaskan adanya perbedaan kas menurut catatan bank dan menurut catatan perusahaan.

Penyebab selisih/ketidacocokan saldo antara catatan nasabah (buku kas bank) dengan catatan menurut Bank (Laporan Rekening Koran) :

1. Pendapatan Bunga Bank

Pendapatan bunga bank ini biasanya diberikan oleh pihak bank sekali dalam sebulan, untuk itu maka perusahaan akan menambahkan nilai sejumlah pendapatan bunga yang diterima. Maka pendapatan bunga akan dicatat sebagai penambah di catatan nasabah

2. Salah Catat yang dilakukan perusahaan/nasabah

a. Penerimaan terlalu besar

Perusahaan dalam mencatat penerimaan piutang dari nasabah tercatat lebih besar dari nilai yang diterima. Karena mencatat lebih besar dari angka sebenarnya, maka perusahaan harus mencatat selisihnya di pengurangan catatan perusahaan agar sesuai dengan angka sebelumnya

b. Penerimaan terlalu kecil

Perusahaan dalam mencatat penerimaan piutang dari nasabah tercatat lebih kecil dari nilai yang diterima. Karena mencatat lebih kecil dari angka sebenarnya, maka perusahaan harus mencatat selisihnya di penambahan catatan perusahaan agar sesuai dengan angka sebelumnya

c. Pembayaran terlalu besar

Perusahaan melakukan pembayaran hutang atau pembayaran lainnya tercatat lebih besar dari total pembayaran yang sebenarnya. Karena mencatat lebih besar dari angka sebenarnya, maka perusahaan harus mencatat selisihnya di penambahan catatan perusahaan agar sesuai dengan angka sebelumnya

d. Pembayaran terlalu kecil

Perusahaan melakukan pembayaran hutang atau pembayaran lainnya tercatat lebih kecil dari total pembayaran yang sebenarnya. Karena mencatat lebih

kecil dari angka sebenarnya, maka perusahaan harus mencatat selisihnya di pengurangan catatan perusahaan agar sesuai dengan angka sebelumnya

3. Cek Kosong

Tagihan yang diterima nasabah dalam bentuk cek, dan nasabah sudah mencatat sebagai penambah saldo uang yang ada di rekening. Setelah cek disetor ke bank ternyata cek tersebut kosong untuk itu nasabah harus mengurangi catatan uang masuk tadi, karena dananya kosong

4. Biaya Bank

Biaya bank ini biasanya dipotong langsung oleh bank ke rekening kita di bank, nasabah baru mengetahuinya setelah mengecek rekening koran perusahaan. Maka biaya bunga akan dicatat sebagai pengurang di catatan nasabah

5. Setoran dalam proses

Setoran yang dilakukan oleh perusahaan ke bank, tapi belum masuk ke bank, biasanya hal ini sering terjadi pada saat akhir bulan. Untuk itu jumlah nilai penyetoran akan ditambahkan ke catatan bank

6. Salah catat yang dilakukan oleh bank

Ada 4 kesalahan yang bisa terjadi yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu :

a. Penerimaan terlalu besar

Bank dalam mencatat penerimaan piutang dari nasabah melalui bank tercatat lebih besar dari nilai yang diterima. Karena mencatat lebih besar dari angka sebenarnya, maka bank harus mencatat selisihnya di pengurangan catatan bank agar sesuai dengan angka sebelumnya

b. Penerimaan terlalu kecil

Bank dalam mencatat penerimaan piutang dari nasabah melalui bank tercatat lebih kecil dari nilai yang diterima. Karena mencatat lebih kecil dari angka sebenarnya, maka bank harus mencatat selisihnya di penambahan catatan bank agar sesuai dengan angka sebelumnya

c. Pembayaran terlalu besar

Bank melakukan pencatatan atas pembayaran yang dilakukan perusahaan, tercatat lebih besar dari total pembayaran yang sebenarnya. Karena mencatat lebih besar dari angka sebenarnya, maka bank harus mencatat selisihnya di penambahan catatan bank agar sesuai dengan angka sebelumnya

d. Pembayaran terlalu kecil

Bank melakukan pencatatan atas pembayaran yang dilakukan perusahaan, tercatat lebih kecil dari total pembayaran yang sebenarnya. Karena mencatat lebih kecil dari angka sebenarnya, maka bank harus mencatat selisihnya di pengurangan catatan bank agar sesuai dengan angka sebelumnya

7. Cek yang masih beredar

Perusahaan mengeluarkan cek yang digunakan untuk membayar hutang ke supplier atau untuk pembayaran lainnya, tapi sampai akhir bulan, yang menerima cek belum melakukan pencairan cek, sehingga saldo rekening perusahaan belum berkurang. Untuk itu nilai sejumlah cek akan dikurangi di bank

8. Piutang Perusahaan yang langsung masuk rek. Bank Perusahaan

Bank menerima pembayaran piutang oleh langganan perusahaan, sehingga menyebabkan saldo rekening bank milik perusahaan menjadi bertambah. Perusahaan baru mengetahuinya setelah melihat rekening koran bank. Untuk itu nilai sejumlah penerimaan piutang ditambahkan di catatan perusahaan

Contoh soal 1 dan pembahasan :

1. Berikut ini informasi yang berhubungan dengan kas PT. CAHAYA pada tanggal 31 September 2023 :

Saldo rekening kas menurut Laporan Bank BRI Rp. 11.662.650, sedangkan saldo kas menurut laporan perusahaan Rp. 12.365.000, Perbedaan tersebut disebabkan oleh :

a. Biaya admin bank untuk bulan September Rp. 55.000,.

- b. Setoran yang dilakukan perusahaan pada tanggal 30 September 2023 belum tampak dalam laporan rekening Koran Bank Rp. 2.500.000,.
- c. Bank telah menerima piutang perusahaan dari PT.XYZ Rp. 600.000, dan belum tampak dalam laporan Perusahaan .
- d. Pendapatan bunga dari bank Rp.215.650,.
- e. Cek beredar untuk bayar hutang pada Toko OZI dan Toko Sinar dengan nomor cek 0052 Rp. 500.000, dan 0053 Rp. 825.000,.
- f. Perusahaan telah melakukan salah pencatatan dalam menerima piutang dari Toko Mery Rp.365.000, tercatat oleh perusahaan dalam buku bank Rp. 653.000,.

Buatlah Rekonsiliasi Bank PT.CAHAYA bulan September 2023

REKONSILIASI BANK					
SALDO MENURUT PERUSAHAAN		12.365.000	SALDO MENURUT BANK		11.662.650
□ (+)			(+)		
c PIUTANG		600.000	SETORAN		
d JASA GIRO		<u>215.650</u>	b TUNAI		<u>2.500.000</u>
		<u>815.650 (+)</u>			<u>2.500.000 (+)</u>
		13.180.650			14.162.650
(-)			(-)		
a ADMIN BANK		55.000	e CEK BEREDAR		<u>1.325.000</u>
f SALAH CATAT		<u>288.000</u>			<u>1.325.000 (-)</u>
		<u>343.000 (-)</u>			12.837.650
		12.837.650			12.837.650

Gambar 3.1. Laporan Rekonsiliasi Bank PT. CAHAYA

- a. Biaya admin bank yang memotong adalah pihak bank, oleh karena itu catatan menurut perusahaan harus dikurangi sebesar nilai administrasi bank Rp. 55.000,.
- b. Perusahaan melakukan setoran ke bank senilai Rp. 2.500.000, pada akhir periode, belum tampak di rekening bank karena biasanya bank setiap akhir periode melakukan tutup buku, jadi setoran yang dilakukan akan masuk pada

hari berikutnya. Jadi untuk rekonsiliasi bank ini harus ditambahkan ke bank sebesar Rp. 2.500.000,.

- c. Karena pembayaran piutang melalui rekening bank, maka bank yang duluan mengetahui adanya penerimaan piutang, maka perusahaan akan menambahkan senilai piutang yang diterima Rp. 600.000,.
- d. Pendapatan bunga bank yang memberikan adalah pihak bank, oleh karena itu catatan menurut perusahaan harus ditambah sebesar nilai pendapatan bunga bank Rp. 215.650,.
- e. Cek yang beredar menjelaskan bahwa cek yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran hutang kepada supplier atau pembayaran lainnya, tetapi yang menerima cek sampai akhir bulan belum diuangkan. Oleh karena itu harus dikurang sebesar nilai cek yang belum dicairkan pada periode yang bersangkutan Rp. 1.325.000,.
- f. Pembayaran piutang dari Toko Mery sudah dicatat perusahaan sebagai uang masuk, tetapi ada kesalahan pencatatan yang dicatat terbesar dari nilai sebenarnya yaitu Rp.288.000, (Rp.653.000,. - Rp. 365.000,.)

Contoh soal 2 dan pembahasan :

Buatlah Rekonsiliasi Bank PT.SUNDA bulan Desember 2020 berdasarkan data dibawah ini :

PT. SUNDA , Buku Besar Kas Bank, Desember 2020				
Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Saldo awal			321.500.000
3	Transfer masuk	23.546.700		345.046.700
7	Setoran tunai	29.000.000		374.046.700
8	Penarikan cek 2215		17.444.500	356.602.200
12	Setoran tunai	20.000.000		376.602.200
15	Penarikan cek 2216		10.500.000	366.102.200
18	Setoran cek 2551	21.400.000		387.502.200
22	Transfer masuk	8.200.000		395.702.200
24	Penarikan cek 2217		8.500.000	387.202.200
26	Setoran cek 3555	4.200.000		391.402.200
29	Transfer masuk	13.500.000		404.902.200
30	Setoran tunai	32.000.000		436.902.200

BANK BCA, Rekening Koran untuk PT. SUNDA, Desember 2020				
Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Saldo awal			321.500.000
1	Setoran tunai		28.700.000	350.200.000
3	Transfer masuk		32.456.700	382.656.700
7	Setoran Tunai		29.000.000	411.656.700
8	Penarikan cek 2215	14.777.500		396.879.200
12	Setoran Tunai		20.000.000	416.879.200
18	Setoran cek 2551		21.400.000	438.279.200
22	Transfer masuk		8.200.000	446.479.200
24	Penarikan cek 2217	8.500.000		437.979.200
29	Transfer Masuk		13.500.000	451.479.200
30	Penarikan cek 2218	5.000.000		446.479.200
30	Biaya administrasi	140.000		446.339.200
31	Jasa giro		197.000	446.536.200

3. Piutang lain-lain (*Other Receivable*)

Piutang yang timbul bukan karena terjadinya penjualan barang atau jasa secara kredit

Pencatatan jurnal sebagai berikut :

Piutang lain-lain	xx	
Kas		xx

3.4 Penghapusan Piutang Usaha

Penghapusan piutang usaha dapat terjadi karena piutang usaha diyakini tidak dapat tertagih lagi

Dasar perhitungan besarnya piutang tidak tertagih :

1. Dari saldo akhir piutang usaha
2. Dari saldo penjualan kredit
3. Analisa umur piutang

Metode Pencatatan Penghapusan piutang usaha (Murniati, 2022) :

1. Metode Langsung (*Direct Method*)

Metode ini digunakan dengan menghapus piutang pada saat diketahui piutang tidak dapat ditagih (dengan otorisasi khusus)

Jurnal metode langsung :

05/05/21 Debitur A meninggal dunia, piutang usaha Rp. 2.500.000.

Beban Penghapusan Piutang	2.500.000	
Piutang Usaha		2.500.000

07/05/21 Debitur B bangkrut jumlah piutang usaha Rp. 5.000.000,

Beban Penghapusan Piutang	5.000.000	
Piutang Usaha		5.000.000

22/12/21 Keluarga debitur A yang meninggal dunia, melunasi hutang

Kas	2.500.000	
Beban Penghapusan Piutang	2.500.000	

15 /2/22 Debitur B datang melunasi hutangnya

Kas	5.000.000	
Pendapatan Lain Lain		5.000.000

2. Metode Tidak Langsung/ Cadangan (*Indirect/ Allowance Method*)

Metode ini digunakan dengan membuat taksiran piutang yang tidak dapat ditagih pada tahun berikutnya dan membebankan biayanya pada tahun berjalan (tahun terjadinya piutang usaha)

Jurnal metode tidak langsung :

31/12/21 Ditaksir untuk tahun 2022 piutang usaha yang tidak dapat tertagih sebesar Rp. 10.000.000,.

Beban Penghapusan Piutang 10.000.000

Cadangan penghapusan piutang 10.000.000

05/03/22 Menghapus piutang usaha Rp. 4.000.000,.

Cadangan Penghapusan Piutang 4.000.000

Piutang Usaha 4.000.000

10/09/22 Menghapus piutang usaha Rp 5.500.000,.

Cadangan Penghapusan Piutang 5.500.000

Piutang Usaha 5.500.000

31/12/22 Ditaksir untuk tahun 2023 piutang usaha yang tidak dapat tertagih Rp. 12.000.000,.

Beban Penghapusan Piutang 11.500.000

Cadangan penghapusan piutang 11.500.000

=Rp.12.000.000-(10.000.000-(4.000.000+5.500.000))=Rp. 11.500.000,.

06/02/23 Menghapus piutang usaha Rp. 10.000.000,.

Cadangan Penghapusan Piutang 8.000.000

Piutang Usaha 8.000.000

10/04/23 Menerima kembali piutang yang dihapus tgl 05/03/22

Kas 4.000.000

Cadangan Penghapusan piutang 4.000.000

08/07/23 Menghapus piutang usaha Rp. 7.000.000,.

Cadangan Penghapusan Piutang 10.000.000

Piutang Usaha 10.000.000

31/12/23 Ditaksir untuk tahun 2024 piutang usaha yang tidak dapat tertagih sebesar Rp. 12.000.000,.

Beban Penghapusan Piutang 14.000.000

Cadangan penghapusan piutang 14.000.000

$$= \text{Rp. } 12.000.000 - (12.000.000 - 8.000.000 + 4.000.000 - 10.000.000) = \text{Rp. } 14.000.000,.$$

Dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan besarnya piutang tak tertagih :

1. Dari saldo akhir piutang usaha

Ditetapkan berdasarkan pengalaman tahun lalu, berapa persen yang tidak dapat tertagih dari saldo akhir piutang usaha

Contoh : Jika tahun 2023 saldo piutang usaha Rp. 150.000.000, (D) dan saldo cadangan penghapusan piutang diakhir tahun Rp. 300.000, (K) Taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman tahun 2022 sebesar 2% dari saldo akhir piutang usaha. Maka perhitungannya :

$$\text{Taksiran piutang tak tertagih } (2\% * \text{Rp. } 150.000.000) = \text{Rp. } 3.000.000,.$$

$$\text{Saldo lebih cadangan penghapusan piutang} = \text{Rp. } 300.000, (-)$$

$$\text{Beban Penghapusan piutang} = \text{Rp. } 2.700.000,.$$

Jurnal yang diperlukan :

$$\text{Beban penghapusan piutang} \quad 2.700.000,.$$

$$\quad \text{Cadangan penghapusan piutang} \quad 2.700.000,.$$

2. Dari saldo penjualan kredit

Ditetapkan berdasarkan pengalaman tahun lalu, berapa persen yang tidak dapat tertagih dari saldo penjualan kredit

Contoh : Jika tahun 2023 jumlah penjualan kredit Rp. 800.000.000, (K) dan saldo cadangan penghapusan piutang diakhir tahun Rp. 200.000, (D) dan piutang ditaksir tidak tertagih sebesar 1% dari penjualan kredit. Maka perhitungannya :

$$\text{Taksiran piutang tak tertagih } (1\% * \text{Rp. } 800.000.000) = \text{Rp. } 8.000.000,.$$

$$\text{Saldo kurang cadangan penghapusan piutang} = \text{Rp. } 200.000,.$$

(+)

$$\text{Beban Penghapusan piutang} = \text{Rp. } 8.200.000,.$$

Jurnal yang diperlukan :

Beban penghapusan piutang 8.200.000,.

Cadangan penghapusan piutang 8.200.000,.

3. Analisa umur piutang

Analisa umur piutang digunakan untuk memisahkan piutang berdasarkan umurnya dan memberikan persentase taksiran piutang tak tertagih berdasarkan kelompok dari umur hari berapa lamanya piutang tak tertagih. Semakin lama piutang belum tertagih maka persentasenya semakin besar. Persentase dari taksiran piutang tak tertagih ditetapkan oleh perusahaan masing masing.

Contoh soal dan pembahasan :

Data Piutang Usaha PT. JUJUR per 31 Desember 2023 =

NO	PELANGGAN	JUMLAH	TANGGAL FAKTUR
1	Toko Alan	Rp. 2.350.000,.	25 - 10 - 2023
2	Toko Lucky	Rp. 5.100.000,.	20 - 09 - 2023
3	Toko Berkah	Rp. 8.211.000,.	15 - 04 - 2023
4	Toko Senang	Rp. 7.650.000,.	08 - 02 - 2023
5	Toko Indah	Rp. 9.880.000,.	15 - 12 - 2023

Syarat pembayaran : n/45

Berdasarkan pengalaman tahun yang lalu besarnya persentase taksiran kerugian piutang PT.JUJUR sebagai berikut :

NO	UMUR KETERTUNGGAHAN PIUTANG	% PENGHAPUSAN
1	Belum jatuh tempo	1 %
2	Lewat jatuh tempo antara 1-90	2 %
3	Lewat jatuh tempo antara 91-180	3 %
4	Lewat jatuh tempo antara 181 - 250	6 %
5	Lewat jatuh tempo > 251	8 %

Buatlah Laporan penyisihan piutang tak tertagih dari data diatas :

Pembahasan :

1. Toko Alan

Perhitungan umur ketertunggakan atas piutang Toko Alan senilai Rp. 2.350.000, tanggal faktur 25 Oktober 2023 adalah :

Oktober	: 31-25	= 6
November	: 30	= 30
Desember	: 31	= 31 (+)
Jumlah		= 67
Syarta pembayaran		= 45 (-)
Umur Ketertunggakan		= 22 hari

Hal ini menjelaskan bahwa Toko Alan jumlah piutang Rp. 2.350.000, batas waktu pelunasan sudah lewat 22 hari dari tanggal yang ditetapkan. Umur ketertunggakan 22 hari ini masuk dalam poin 2 yaitu diantara 1-90 hari dengan persentase penghapusan piutang sebesar 2%

2. Toko Lucky

Perhitungan umur ketertunggakan atas piutang Toko Lucky senilai Rp. 5.100.000, tanggal faktur 20 September 2023 adalah :

September	: 30-20	= 10
Oktober	: 31	= 31
November	: 30	= 30
Desember	: 31	= 31 (+)
Jumlah		= 102
Syarta pembayaran		= 45 (-)
Umur Ketertunggakan		= 57 hari

Hal ini menjelaskan bahwa Toko Lucky jumlah piutang Rp. 5.100.000, batas waktu pelunasan sudah lewat 57 hari dari tanggal yang ditetapkan. Umur ketertunggakan 57 hari ini masuk dalam poin 2 yaitu diantara 1-90 hari dengan persentase penghapusan piutang sebesar 2%

3. Toko Berkah

Perhitungan umur ketertunggakan atas piutang Toko Berkah senilai Rp. 8.211.000,, tanggal faktur 15 April 2023 adalah :

April	: 30-15	=15
Mei	: 31	= 31
Juni	: 30	= 30
Juli	: 31	= 31
Agustus	: 31	= 31
September	: 30	= 30
Oktober	: 31	= 31
November	: 30	= 30
Desember	: 31	= 31 (+)
Jumlah		= 260
Syarta pembayaran		= 45 (-)
Umur Ketertunggakan		= 215 hari

Hal ini menjelaskan bahwa Toko Berkah jumlah piutang Rp. 8.211.000,, batas waktu pelunasan sudah lewat 215 hari dari tanggal yang ditetapkan. Umur ketertunggakan 215 hari ini masuk dalam poin 4 yaitu diantara 181-250 hari dengan persentase penghapusan piutang sebesar 6%

4. Toko Senang

Perhitungan umur ketertunggakan atas piutang Toko Senang senilai Rp. 7.650.000,, tanggal faktur 08 Februari 2023 adalah :

Februari	: 28-08	= 20
Maret	: 31	= 31
April	: 30	= 30
Mei	: 31	= 31
Juni	: 30	= 30
Juli	: 31	= 31
Agustus	: 31	= 31
September	: 30	= 30
Oktober	: 31	= 31
November	: 30	= 30
Desember	: 31	= 31 (+)
Jumlah		= 326
Syarta pembayaran		= 45 (-)

Umur Ketertunggakan = 281 hari

Hal ini menjelaskan bahwa Toko Senang jumlah piutang Rp. 7.650.000, batas waktu pelunasan sudah lewat 281 hari dari tanggal yang ditetapkan. Umur ketertunggakan 281 hari ini masuk dalam poin 5 yaitu >251 hari dengan persentase penghapusan piutang sebesar 8%

5. Toko Indah

Perhitungan umur ketertunggakan atas piutang Toko Alan senilai Rp. 9.880.000, tanggal faktur 15 Desember 2023 adalah :

Desember : 31 - 15 = 16 (+)

Jumlah = 16

Syartha pembayaran = 45 (-)

Umur Ketertunggakan =(29) hari

Hal ini menjelaskan bahwa Toko Indah jumlah piutang Rp. 9.880.000, batas waktu pelunasan adalah tanggal 29 Januari 2024 belum jatuh tempo pembayaran. Karena belum jatuh tempo maka masuk dalam poin 1 yaitu BJT dengan persentase penghapusan piutang sebesar 1%

Daftar Umur Piutang Dagang per 31 Desember 2023						
Langganan	Jumlah	Umur Ketertunggakan Piutang				
		BJT	1 sd 90	91 sd 180	181 sd 250	>251
Toko Alan	Rp2.350.000		Rp2.350.000			
Toko Lucky	Rp5.100.000		Rp5.100.000			
Toko Berkah	Rp8.211.000				Rp8.211.000	
Toko Senang	Rp7.650.000					Rp7.650.000
Toko Indah	Rp9.880.000	Rp9.880.000				
Total	Rp33.191.000	Rp9.880.000	Rp7.450.000		Rp0	Rp8.211.000

Penentuan Besarnya penyisihan Piutang Tak Tertagih			
Umur Piutang	% Kerugian	Saldo Piutang	Taksiran Kerugian
BJT	1%	Rp9.880.000	Rp98.800
Lewat 1 sd 90	2%	Rp7.450.000	Rp149.000
Lewat 91-180	3%	Rp0	Rp0
Lewat 181-250	6%	Rp8.211.000	Rp492.660
Lewat > 251	8%	Rp7.650.000	Rp612.000
Jumlah			Rp1.352.460

DAFTAR PUSTAKA

- Hans, K. (2016) 'CAFB IAI - Modul Akuntansi Keuangan by Ikatan Akuntan Indonesia', *Modul Akuntansi Keuangan*, pp. 1-375.
- Hery (2017) *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kieso, et all. (2014) *Intermediate Accounting*. 2nd edn. Edited by Wiley. IFRS Edition.
- Martani, Dwi. Siregar, Sylvia Veronica, D. (2016) *Akuntansi Keuangan Menengah*. Edited by E.S. Suharsi. Salemba Empat.
- Murniati, S.M. dkk (2022) 'Akuntansi Keuangan Menengah 1', in Bahri, S. (ed.). Bandung: CV. Media Sains Indonesia, p. 218.
- Nuh, M.H. (2014) *Intermediate Accounting*. 5th edn. Edited by T.D. LP3I. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.

BAB 4

PEROLEHAN DAN PELEPASAN ASET

Oleh Donny Indradi

4.1 Pendahuluan

Indonesia adalah negara Industri dengan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reynold menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,05 % dari tahun sebelumnya sebesar 5,31%. (Ronald, 2024). Hal ini diperkuat dengan adanya Indonesia dalam hal ini Kementerian Perindustrian melalui programnya yang bernama Program Peningkatan Penguatan Produk Dalam Negeri (P3DN) dimana ada 13.456 produk Industri dan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar 25% sehingga akan meningkatkan daya saing Perusahaan di Indonesia.(Kemenperin, 2021). Perananan Industri atau perusahaan di Indonesia akan semakin berkembang dan maju hal ini disebabkan karena Pemerintah terus berupaya melindungi dan mendorong Perusahaan untuk maju dan berkembang dengan serangkaian Peraturan yang disediakan untuk hal itu.

Pertumbuhan Ekonomi dan Perusahaan banyak dibutuhkan oleh *stakeholder* (pemilik kepentingan) yaitu Internal (manajemen dan karyawan) dan eksternal Perusahaan (misal Bank, Investor, Pemerintah, akademisi). Pertumbuhan Perusahaan ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang disajikan oleh Perusahaan baik berupa Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berbagai Keputusan dapat diambil dari Laporan Keuangan baik bersifat strategis ataupun praktis diantaranya bagi Manajemen Perusahaan adalah untuk keperluan membeli suatu aset berupa mesin atau membuka cabang baru, bagi Investor misalnya megharapkan *return* baik berasal dari deviden ataupun *capital gain*, bagi Pemerintah misal dari peningkatan Penerimaan Negara dari sisi Pajak, bagi akademisi untuk melakukan sebuah

riset tentang Perusahaan. Salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah adalah melalui Peraturan Pelaksana berupa Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 3 Pasal 35 ayat (3) bahwa kriteria modal: (HAM, 2021)

1. Usaha Mikro, Modal sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan
2. Usaha Kecil, Modal Rp 1.000.000.000,00-5.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan (Lima Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan.
3. Usaha Menengah, Modal Rp 5.000.000.000,00-10.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan.
4. Usaha Besar, Modal lebih dari Rp 10.000.000.000,00-5.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan.

Neraca atau *balance sheet* adalah sebuah hal yang sangat penting yang akan dibaca dan dilakukan evaluasi mengenai kondisi Perusahaan saat ini dan yang akan datang. Dalam Neraca tersebut kita dapat mengetahui tentang Harta (*Aset*) dan hutang (*Liability*) serta modal (*Equity*) dari Perusahaan. Pada ilmu dasar Akuntansi disebutkan bahwa rumusan dari neraca adalah $Aset = Kewajiban + Modal$. Neraca dapat digunakan dan evaluasi apakah Perusahaan tersebut sehat atau tidaknya diantaranya dengan menggunakan rasio keuangan.

Operasional sebuah Perusahaan, selalu membutuhkan yang dinamakan aset tetap seperti mesin, Bangunan kantor, dan lain-lain. Aset Tetap termasuk ke dalam aset berwujud yang urutan dalam neraca adalah termasuk Aset yang tidak mudah untuk dicairkan. Aset Tetap terkendala oleh nilai yang sangat besar dan sebagian besar memerlukan pemeliharaan dan perawatan sehingga timbul adanya pengurang nilai bangunan yang dinamakan penyusutan. Aset Tetap adalah komponen terpenting dalam Laporan Keuangan yang harus diperhatikan karena keterkaitannya dengan Laporan Laba Rugi Perusahaan

dan termasuk dapat menentukan pajak yang harus dibayar oleh Perusahaan. Berhubungan dengan pemaparan di atas maka dapatlah dipelajari tentang cara mendapat Aset Tetap dan bagaimana pelepasan Aset Tetap tersebut.

4.2 Aset Tetap

Keputusan Investasi jangka panjang, yang dilakukan oleh Perusahaan untuk melakukan operasionalnya, memerlukan dana yang besar dan salah satunya diwujudkan dalam bentuk Aset Tetap. Sebaiknya Perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu tentang aset tetap.

4.2.1 Pengertian dan Pentingnya Aset Tetap

Aset tetap yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan dan untuk mencapai tujuan Perusahaan sesuai dengan laba perusahaan memerlukan sarana dan prasarana, peralatan dan infrastruktur. Peralatan dan sarana seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan lain-lain. Pemahaman tentang aset tetap perlu dimulai dari pengertian atau definisi mengenai aset tetap sebagai berikut:.

1. Eddy Purnairawan dan Sunarto dalam bukunya menyampaikan bahwa Aset Tetap adalah harta Perusahaan yang dibeli dan dimiliki tidak untuk dijual belikan sebagai barang dagangan dan digunakan untuk operasional Perusahaan. (Purnairawan, 2021)
2. Skousen & Smith dalam bukunya menjelaskan bahwa Aset Tetap atau *fixed aset* adalah harta tetap berwujud yang digunakan untuk aktivitas perusahaan dan bersifat jangka panjang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin yang tujuan utama digunakan adalah menghasilkan pendapatan bagi Perusahaan. (Skousen, K.F, 2012)
3. Al Haryono Jusup dalam bukunya membahas bahwa Aset Tetap adalah sumber daya Perusahaan dengan kriteria tertentu yaitu 1) Mempunyai wujud 2) Digunakan untuk kegiatan perusahaan 3) mempunyai manfaat jangka panjang 4) tidak untuk dijual belikan. (Jusup, 2014)
4. Juan dan Ersa dalam bukunya memaparkan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud dimana penggunaannya untuk

keperluan produksi penyediaan barang dan jasa, rental kepada pihak lain dan kepentingan administrative yang diharapkan masa manfaatnya lebih dari satu periode (Juan, 2012)

5. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia nomor 216 (PSAK 216) bahwa yang dinyatakan dengan aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dalam proses produksi barang dan jasa dan disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. (Sinaga, 2024)

Berdasarkan definisi dari ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap adalah harta Perusahaan yang :

1. Dimiliki oleh Perusahaan
2. Mempunyai wujud fisik
3. Digunakan untuk Operasional, aktivitas/kegiatan Perusahaan.
4. Dapat digunakan untuk sewa kepada pihak lain
5. Dapat digunakan untuk tujuan administratif.
6. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode
7. Tidak untuk dijual belikan.

Dalam karakteristik terlihat bahwa untuk membedakan antara aset dengan persediaan adalah aset tetap dimiliki oleh Perusahaan untuk menunjang operasional Perusahaan sehingga tidak untuk dijual belikan sedangkan aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual belikan berarti aset tersebut tidak termasuk ke dalam aset tetap karena merupakan barang dagangan. Sebagai contoh kendaraan mobil. Jika mobil tersebut digunakan untuk operasional perusahaan maka termasuk aset tetap tetapi jika mobil pada showroom mobil maka mobil adalah barang dagangan dan bukan merupakan aset tetap. Ada juga aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan untuk jangka panjang tetapi belum digunakan maka dapat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Seperti contoh tanah yang dimiliki oleh perusahaan di suatu lokasi yang lain tetapi didiamkan karena belum terpakai untuk operasional perusahaan maka

tanah tersebut dikategorikan sebagai investasi jangka panjang bukan sebagai aset tetap.

Aset Tetap mempunyai peranan penting dalam perusahaan dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. Modal Kerja atau operasional Perusahaan
2. Biaya Perawatan besar
3. Memerlukan dana besar untuk pengadaannya.

Aset Tetap berperan sangat penting dalam perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan suatu perlakuan atau sistem informasi akuntansi yang dapat mengestimasi masa manfaat, harga perolehan, penyusutan dan biaya-biaya pengeluaran selama perolehan, pelepasan dan lain-lain. Mengingat pentingnya hal tersebut maka pencatatan akuntansi harus dilakukan dengan benar karena jika tidak benar akan berdampak pada penyajian dalam laporan keuangan dan berpengaruh pada neraca dan laba rugi sehingga akan salah dalam mengambil keputusan strategis bagi pengguna laporan keuangan.

4.2.2 Penggolongan aset tetap.

Pemahaman terlebih dahulu mengenai definisi dan pentingnya aset tetap maka beralih kepada penggolongan aset tetap. Adapun penggolongan aset tetap terdapat beberapa pendapat ahli. Menurut pendapat Rudianto dalam bukunya menyatakan bahwa Aset tetap untuk tujuan akuntansi digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan umur yaitu: (Rudianto, 2012)

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah atau lahan yaitu lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila masa manfaatnya sudah selesai dapat dilakukan penggantian aset seperti peralatan kantor, mesin dan bangunan.
3. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas dan apabila masa manfaatnya sudah selesai tidak dapat dilakukan penggantian aset seperti tanah pertambangan dan hutan.

Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa aset tetap dapat dipahami melalui 3 sudut yaitu: (Harahap, 2011)

1. Substansi, dimana aset tetap digolongkan menjadi dua hal yaitu:
 - a. Aset berwujud (*Tangible assets*) seperti Gedung, pabrik, tanah, dan lain-lain
 - b. Aset tidak berwujud (*Intangible assets*) seperti goodwill, patent, merk, dan lain-lain
2. Penyusutan, dimana aset tetap digolongkan menjadi dua hal yaitu:
 - a. Aset tetap yang disusutkan (*Depreciated Plant Assets*), seperti pabrik, Gedung dan mesin
 - b. Aset tetap yang tidak disusutkan (*Undepreciated Plant Assets*), seperti tanah.
3. Jenisnya, dimana aset tetap digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:
 - a. Lahan seperti tanah kosong atau terdapat bangunan.
 - b. Mesin seperti mesin pabrik;
 - c. Bangunan seperti Gedung.
4. Peralatan seperti alat-alat besar yang digunakan oleh Perusahaan seperti Inventaris laboratorium, inventaris pabrik.;
5. Kendaraan seperti semua roda empat, roda dua;
6. Perabot seperti perabot laboratorium, perabot pabrik, dan lain-lain;
7. Sarana dan Prasarana seperti jalan, jembatan, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua aset yang mempunyai wujud fisik dan nilai yang dalam melakukan pembelian perlu adanya pertimbangan khusus (semisal persetujuan Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham) dan masa manfaatnya lebih dari 1 periode biasanya adalah lebih dari 1 tahun dapat ditetapkan menjadi aset tetap. Perusahaan diharapkan mampu untuk menjaga kondisi dari aset tetap selalu dalam keadaan baik, dan melakukan pemeliharaan terhadap aset dan memang jika dirasa perlu melakukan penggantian aset atau menambah aset perusahaan.

4.2.3 Perolehan Aset Tetap.

1. Cara memperoleh Aset Tetap

Aset Tetap yang dimiliki oleh Perusahaan dapat dimiliki dengan berbagai cara. Adapun cara tersebut seperti diungkapkan oleh (Rudianto, 2012) dalam bukunya antara lain:

- a. Pembelian tunai, adalah pembelian yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau transfer rekening antar bank yang dicatat dalam buku sebesar kesepakatan antara penjual dan pembeli ditambah dengan biaya yang ditanggung pembeli seperti biaya angkut, biaya bongkar pasang dan biaya lainnya.
- b. Pembelian angsuran, pembelian dengan cara mengangsur jadi tidak dibayar sekaligus. Adapun bunga yang timbul dan menjadi beban pembeli tidak dimasukkan ke dalam biaya perolehan tetapi dimasukkan ke dalam beban bunga. Harga perolehan adalah total angsuran ditambah dengan beban pengurusan, beban pemasangan dan biaya lainnya.
- c. Ditukar dengan surat berharga. Aset tetap diperoleh dengan cara menukar dengan saham atau obligasi dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
- d. Ditukar dengan aset tetap lainnya, Aset tetap diperoleh dengan cara menukar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan aset tetap yang dimiliki oleh pihak lain. Misal Mesin pabrik ditukar dengan Alat berat.
- e. Diperoleh dengan donasi, jika aset tetap diperoleh dengan sumbangan maka aset tetap diakui sebesar harga pasarnya.

Al Haryono Jusup dalam bukunya menyampaikan bahwa aset tetap diperoleh dengan berbagai cara diantaranya: (Jusup, 2014)

- a. Pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Biasanya untuk pembelian aset dalam jumlah nilai besar sehingga menggunakan uang muka dan sisanya

menggunakan wesel berbunga yang akan cair pada saat jatuh tempo

- b. Pembelian dalam satu paket atau pembelian secara *lump sum*. Pembelian beberapa jenis aset yang dibeli dalam satu transaksi. Seperti Pembelian Pabrik yang meliputi tanah, mesin, perabot dan lain-lain dengan satu transaksi pembayaran.
- c. Perolehan dengan membangun sendiri. Perusahaan terkadang menambah bangunan dengan cara membangun sendiri seperti menambah ruangan kantor pada bangunan kantor dengan cara menggunakan tukang sendiri, material sendiri dan konsep sendiri.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Pembelian tunai
- b. Pembelian dengan angsuran
- c. Ditukar dengan surat berharga
- d. Ditukar dengan aset tetap lainnya
- e. Diperoleh dengan donasi
- f. Pembelian dengan menggunakan wesel berbunga
- g. Pembelian dalam satu paket
- h. Kegiatan membangun sendiri.

2. Harga Perolehan Aset Tetap

Sebelum memasuki pembahasan mengenai harga perolehan atau biaya perolehan maka harus dipahami terlebih dahulu definisi dari harga perolehan tersebut. Definisi harga perolehan menurut Horngren dalam bukunya adalah cara memperoleh aset tetap tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan dan siap dioperasikan oleh Perusahaan. Jika pembelian aset tetap tersebut adalah baru maka yang perlu diperhatikan adalah biaya-biaya yang timbul selama dalam perjalanan, biaya *setting*, biaya pengangkutan dan biaya lainnya harus ditambahkan ke dalam harga beli aset tetap tersebut. Jika pembelian aset tetap tersebut adalah bekas maka harga perolehan adalah biaya beli ditambah dengan biaya dalam perjalanan dan

biaya untuk suku cadang atau peralatan lainnya untuk sampai di lokasi dan siap digunakan. (Horngren, 2012)

Al Haryono Jusup dalam bukunya menyampaikan bahwa harga perolehan adalah seluruh pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan aset tetap baik pengeluaran untuk pembelian maupun pengeluaran ekstra lainnya untuk aset tetap siap digunakan. (Jusup, 2014)

Dari definisi diatas dapatlah dibuat kesimpulan bahwa harga perolehan aset tetap tidak hanya harga pembelian tetapi juga harus ditambah dengan biaya lainnya untuk aset tetap tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan.

Masalah yang timbul dalam mempelajari Aset tetap diantaranya adalah mengenai perolehan aset tetap, masa manfaat, penyusutan dan pelepasan aset tetap. Berikut adalah pemahaman dari PSAK 216 mengenai biaya perolehan adalah

”jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu pada PSAK lain, contohnya PSAK 102 pembayaran berbasis saham“ (Sinaga, 2024)

Sedangkan pengakuan tentang biaya perolehan sesuai PSAK 216 adalah „biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika : (a) kemungkinan besar aset tetap mempunyai manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan (b) biaya perolehannya dapat diukur secara handal.“ (Sinaga, 2024)

Lebih lanjut dipaparkan dalam PSAK 216 paragraf 15 yang termasuk dalam biaya perolehan awal pada aset tetap meliputi:

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
- b. Setiap biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan

agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen

- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. (Sinaga, 2024)

Poin nomor 1 biasa disebut dengan *Purchase Cost*, sedang poin nomor 2 biasa disebut dengan *Directly attributable cost*, Poin nomor 3 biasa disebut dengan *Dismantling Cost*.

Supaya lebih tepat memahami tentang harga perolehan dan mengetahui contoh biaya yang dapat diatribusikan kedalam harga perolehan sesuai dengan PSAK 216 paragraph 17 adalah sebagai berikut:(Sinaga, 2024)

- a. Biaya imbalan kerja (seperti didefinisikan dalam PSAK 24 Imbalan Kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap:
- b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
- c. Biaya penanganan dan penyerahan awal
- d. Biaya instalasi dan perakitan
- e. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (seperti, contoh sampel yang dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji)
- f. Komisi Profesional .

Pemahaman tentang harga perolehan dan mengetahui contoh biaya yang tidak dapat diatribusikan kedalam harga perolehan sesuai dengan PSAK 216 paragraph 19 adalah sebagai berikut: (Sinaga, 2024)

- a. Biaya pembukaan fasilitas baru.
- b. Biaya penanganan produk baru (termasuk biaya iklan dan marketing)

- c. Biaya penyelenggaraan nisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru(termasuk biaya pelatihan staf).
- d. Administrasi dan biaya umum.

Berikut akan disampaikan beberapa contoh unsur-unsur pembentuk harga perolehan:

1) Tanah.

- a) Harga beli
- b) Komisi Profesional
- c) Biaya Notaris
- d) Biaya Agen tanah
- e) Biaya merobohkan bangunan lama
- f) Biaya pembersihan tanah

2) Gedung

- a) Harga beli
- b) Biaya perbaikan sebelum gedung digunakan
- c) Komisi profesional
- d) Biaya notaris

3) Mesin dan peralatan

- a) Harga beli
- b) Biaya notaris
- c) Biaya angkut
- d) Biaya *Install*
- e) Asuransi dalam perjalanan
- f) Biaya lain yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin

4) Kendaraan

- a) Harga beli
- b) Bea balik nama
- c) Biaya asuransi
- d) Biaya profesional;

Sebagai contoh: Seorang Pengusaha membeli sebuah tanah dimana diatasnya berdiri sebuah bangunan tidak

permanen dari triplek dengan harga Rp 500.000.000,00 kemudian merobohkan bangunan tidak permanen tersebut sebesar Rp 500.000,00 dan memberi komisi Profesional kepada agen sebesar Rp2.500.000 dan biaya notaris beserta balik nama sebesar 5.000.000,00 maka berapa besar harga perolehan tanah tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kita pahami bahwa harga perolehan adalah tidak hanya harga beli tetapi harga yang timbul sampai dengan aset tetap tersebut digunakan:

Harga beli tanah	=	Rp 500.000.000,00
Ongkos perobohan bangunan non permanen	=	Rp 500.000,00
Komisi Profesional	=	Rp 2.500.000,00
Notaris dan balik nama	=	Rp 5.000.000,00 +
Harga Perolehan	=	Rp 508.000.000,00

Sebagai contoh: Seorang Pengusaha membeli truk bekas tahun 2010 dimana kondisinya tidak bagus perlu adanya perbaikan dengan harga Rp 70.000.000,00 kemudian biaya bengkel sebesar Rp 10.000.000,00 dan memberi komisi Profesional kepada agen sebesar Rp2.500.000 dan biaya perpanjangan STNK dan balik nama sebesar 7.500.000,00 maka berapa besar harga perolehan tanah tersebut?

Harga beli truk 2010	=	Rp 70.000.000,00
Biaya bengkel	=	Rp 10.000.000,00
Komisi Profesional	=	Rp 2.500.000,00
STNK dan balik nama	=	Rp 7.500.000,00 +
Harga Perolehan	=	Rp 90.000.000,00

Setelah menentukan harga perolehan maka langkah selanjutnya adalah menentukan berapa masa manfaat atau umur manfaat dari sebuah aset tetap. Berdasarkan PSAK 216 paragraph 6 maka masa manfaat atau umur manfaat adalah berkaitan dengan berapa lama aset dapat digunakan oleh entitas dan kuantitas prosduki yang dapat dihasilkan dari sebuah aset tetap tersebut. (Sinaga, 2024)

Kemudian kita perlu juga mengetahui tentang nilai residu atau nilai sisa dari aset tetap tersebut apabila berhenti beroperasi atau tidak dapat digunakan oleh sebuah entitas. Menurut PSAK 216 paragraph 6 menyatakan bahwa nilai residu dari aset adalah kondisi dimana umur manfaat aset berakhir dan berapa nilai sisa dari pelepasan aset setelah dikurangi dengan perkiraan biaya pelepasan. (Sinaga, 2024)

3. Penyusutan

Aset tetap berdasarkan kualifikasinya ada yang mengalami depresiasi atau penyusutan, sesuai dengan PSAK 216 paragraph 6 bahwa depresiasi adalah jumlah secara perhitungan akan mengurangi harga perolehan selama umur manfaat. (Sinaga, 2024)

Menurut Kartikahadi dalam bukunya menyatakan bahwa penyusutan adalah penempatan biaya perolehan secara perhitungan yang akurat yang menempatkan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap tersebut selama umur manfaatnya. (Kartikahadi, 2012)

Jadi dapat dijelaskan bahwa aset tetap mempunyai penyusutan dimana nilainya menggunakan suatu metode perhitungan sepanjang umur manfaat aset tetap untuk mengalokasikan harga perolehan sesuai dengan manfaatnya. Pelaksanaan perhitungan penyusutan dapat dilakukan setelah mengetahui harga perolehan, umur manfaat dan nilai residu dari aset tetap.

Metode penyusutan dalam akuntansi ada 5 diantaranya adalah:

- a. Metode Garis Lurus
- b. Metode saldo menurun berganda
- c. Metode jumlah angka tahun
- d. Metode unit produksi
- e. Metode jam kerja mesin

Berikut penjelasan dari masing-masing metode penyusutan:

a. Metode Garis Lurus (*straight line method*)

Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling mudah, sederhana, praktis dan mudah penggunaannya. Metode ini tidak memperhitungkan manfaat dari aset tetap tapi yang diperhatikan adalah masa manfaat dari aset tetap tersebut. Jadi besaran dari pengalokasian harga perolehan adalah besarnya sama dalam setiap tahunnya. Cara untuk menghitung depresiasi atau penyusutan garis lurus adalah:

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Masa manfaat}}$$

Agar lebih jelas, maka diberikan contoh perhitungan sebagai berikut :

Diketahui Pada 5 Januari 2020 PT XYZ membeli sebuah truk bekas tahun 2010 dengan harga Perolehan sebesar Rp 90.000.000,00 disusutkan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10.000.000,00 maka penyusutan dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{90.000.000 - 10.000.000}{5}$$

$$\text{Penyusutan per tahun} = 16.000.000 \text{ per tahun}$$

Tabel 4.1. PT. XYZ Metode Garis Lurus

Aset Tetap	2020	2021	2022	2023	2024
Harga Perolehan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Penyusutan	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Akumulasi Penyusutan	16.000.000	32.000.000	48.000.000	64.000.000	80.000.000
Nilai Buku	74.000.000	58.000.000	42.000.000	26.000.000	10.000.000

Sumber: data yang diolah

b. Metode saldo Menurun Berganda (*declining balance method*)

Pada metode ini memperhitungkan mengenai kapasitas dari suatu aset tetap sehingga penyusutan semakin tahun semakin turun. Pengalokasian harga Perolehan akan besar di awal umur manfaat dan semakin kecil pada akhir umur manfaat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perhitungan penyusutan per tahun adalah dengan cara mengalikan tarif penyusutan dengan nilai buku (harga perolehan-akumulasi penyusutan). Penyusutan ini sering disampaikan bahwa besarnya adalah dua kali dari metode garis lurus. Cara untuk menghitung depresiasi atau penyusutan saldo menurun berganda adalah:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{100\%}{\text{Taksiran umur manfaat}} \times 2$$

Biaya penyusutan pertahun = tarif penyusutan x nilai buku pada awal tahun.

Agar lebih jelas, maka diberikan contoh perhitungan sebagai berikut :

Diketahui Pada 5 Januari 2020 PT XYZ membeli sebuah truk bekas tahun 2010 dengan harga Perolehan sebesar Rp 90.000.000,00 disusutkan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10.000.000,00 maka penyusutan

dengan metode saldo menurun berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{100\%}{5} \times 2 = 40\%$$

Biaya penyusutan pertahun = lihat pada table 4.2.

Tabel 4.2. PT. XYZ Metode Saldo Menurun Berganda

Aset Tetap	2020	2021	2022	2023	2024
Harga Perolehan	90.000.000	54.000.000	32.400.000	19.440.000	90.000.000
Tarif	40%	40%	40%	40%	40%
Penyusutan	36.000.000	21.600.000	12.960.000	7.760.000	1.664.000
Akumulasi Penyusutan	36.000.000	57.600.000	70.560.000	78.336.000	80.000.000
Nilai Buku	54.000.000	32.400.000	19.440.000	11.664.000	10.000.000

Sumber: data yang diolah

Sehubungan dengan nilai residu adalah 10.000.000 maka perhitungan tahun 2024 penyusutan hanya sebesar 1.664.000

c. Metode Jumlah angka tahun

Pada metode penyusutan ini samadengan metode saldo menurun berganda, dimana memperhitungkan kapasitas dari aset tetap yang semakin menurun tiap tahunnya hingga habis umur manfaatnya. Dalam metode ini adalah terdapat angka pecahan dimana pembilang pada awal umur manfaat adalah sebesar masa manfaat kemudian semakin berkurang hingga habis umur manfaat sedangkan penyebutnya bersifat tetap merupakan faktorial dari masa manfaat. Misal 5 tahun maka jumlah angka tahun adalah $(5+4+3+2+1 = 15)$, sedangkan cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Langkah pertama

Menentukan jumlah angka tahun terlebih dahulu, misal masa manfaat adalah 5 tahun maka jumlah angka tahun adalah $5+4+3+2+1 = 15$

Langkah kedua

Menentukan tarif penyusutan, misal tahun ke 1 adalah $5/15$, tahun ke 2 adalah $4/15$ dan seterusnya

Langkah ketiga

Menentukan biaya penyusutan

Biaya penyusutan pertahun = tarif penyusutan x (harga perolehan-nilai residu).

Agar lebih jelas, maka diberikan contoh perhitungan sebagai berikut :

Diketahui Pada 5 Januari 2020 PT XYZ membeli sebuah truk bekas tahun 2010 dengan harga Perolehan sebesar Rp 90.000.000,00 disusutkan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10.000.000,00 maka penyusutan dengan metode jumlah angka tahun adalah sebagai berikut:

Langkah pertama

Menentukan jumlah angka tahun terlebih dahulu, misal masa manfaat adalah 5 tahun maka jumlah angka tahun adalah $5+4+3+2+1 = 15$

Langkah kedua

Tahun ke 1 sebesar $5/15 = 0,33$

Tahun ke 2 sebesar $4/15 = 0,27$

Tahun ke 3 sebesar $3/15 = 0,2$

Tahun ke 4 sebesar $2/15 = 0,13$

Tahun ke 5 sebesar $1/15 = 0,07$

Langkah ketiga

Menentukan biaya penyusutan

Biaya penyusutan pertahun = lihat tabel 4.3

Tabel 4.3. PT. XYZ Metode Jumlah angka tahun

Aset Tetap	2020	2021	2022	2023	2024
Harga Perolehan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Harga Perolehan-Residu	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Tarif	0,33	0,27	0,2	0,13	0,07
Penyusutan	26.400.000	21.600.000	16.000.000	10.400.000	5.600.000
Akumulasi Penyusutan	26.400.000	48.000.000	64.000.000	74.400.000	80.000.000
Nilai Buku	63.600.000	42.000.000	26.000.000	15.600.000	10.000.000

Sumber: data yang diolah

d. Metode unit produksi

Metode penyusutan ini menghitung berapa unit kapasitas produksi selama umur manfaat dan kemudian menggunakan taksiran unit produksi yang dihasilkan oleh aset tetap selama umur produktifnya. Penyusutan semacam ini sangat cocok untuk perusahaan manufaktur yang menggunakan mesin pabrik. Dalam metode ini adalah terdapat angka pecahan dimana pembilang estimasi kapasitas produksi per tahun sedangkan penyebutnya bersifat tetap merupakan total kapasitas produksi selama masa manfaat. Misal 5 tahun maka total kapasitas produksi adalah 100.000 ton, sedangkan cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Langkah pertama

Menentukan estimasi kapasitas produksi per tahun terlebih dahulu dan total kapasitas produksi selama umur manfaat, misal masa manfaat adalah 5 tahun maka total kapasitas produksi sebesar 100.000 ton. Kemudian estimasi kapasitas produksi tiap tahunnya ditentukan.

Langkah kedua

Menentukan tarif penyusutan, misal tahun ke 1 adalah $15.000/100.000$, tahun ke 2 adalah $22.000/100.000$ dan seterusnya

Langkah ketiga

Menentukan biaya penyusutan

Biaya penyusutan pertahun = tarif penyusutan x harga perolehan.

Agar lebih jelas, maka diberikan contoh perhitungan sebagai berikut :

Diketahui Pada 5 Januari 2020 PT XYZ membeli sebuah truk bekas tahun 2010 dengan harga Perolehan sebesar Rp 90.000.000,00 disusutkan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10.000.000,00 maka penyusutan dengan metode unit produksi adalah sebagai berikut:

Langkah pertama

TOTAL KAPASITAS PRODUKSI = 100.000 TON

TAHUN 2020 = 15.000 TON

TAHUN 2021 = 22.000 TON

TAHUN 2022 = 25.000 TON

TAHUN 2023 = 21.000 TON

TAHUN 2024 = 17.000 TON

Langkah kedua

TAHUN 2020 = 15.000 /100.000 TON= 0,15

TAHUN 2021 = 22.000 /100.000 TON = 0,22

TAHUN 2022 = 25.000 /100.000 TON = 0,25

TAHUN 2023 = 21.000 /100.000 TON = 0,21

TAHUN 2024 = 17.000 /100.000 TON = 0,17

Langkah ketiga

Menentukan biaya penyusutan

Biaya penyusutan pertahun = lihat tabel 4.4.

Tabel 4.4. PT. XYZ Metode Jumlah unit produksi

Aset Tetap	2020	2021	2022	2023	2024
Harga Perolehan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Harga Perolehan-Residu	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Tarif	0,15	0,22	0,25	0,21	0,17
Penyusutan	12.000.000	17.600.000	20.000.000	16.800.000	13.600.000
Akumulasi Penyusutan	12.000.000	29.600.000	49.600.000	66.400.000	80.000.000
Nilai Buku	78.000.000	60.400.000	40.400.000	23.600.000	10.000.000

Sumber: data yang diolah

e. Metode jam kerja mesin

Metode penyusutan ini menghitung berapa jam kerja mesin (*service hour*) selama umur manfaat dan kemudian menggunakan taksiran jam kerja mesin yang dihasilkan oleh aset tetap selama umur produktifnya. Penyusutan semacam ini sangat cocok untuk perusahaan otomotif atau penerbangan yang menggunakan mesin yang menggunakan kilometer jarak tempuh. Dalam metode ini adalah terdapat angka pecahan dimana pembilang estimasi jam mesin per tahun sedangkan penyebutnya bersifat tetap merupakan total jam mesin selama masa manfaat. Misal 5 tahun maka total kapasitas produksi adalah 100.000 jam mesin, sedangkan cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Langkah pertama

Menentukan estimasi kapasitas produksi per tahun terlebih dahulu dan total jam mesin selama umur manfaat, misal masa manfaat adalah 5 tahun maka total kapasitas jam mesin sebesar 100.000 jam. Kemudian estimasi kapasitas jam mesin tiap tahunnya ditentukan.

Langkah kedua

Menentukan tarif penyusutan = (Harga Perolehan-Nilai Residu) / total jam mesin

Langkah ketiga

Menentukan biaya penyusutan

Biaya penyusutan pertahun = tarif penyusutan x harga perolehan.

Agar lebih jelas, maka diberikan contoh perhitungan sebagai berikut :

Diketahui Pada 5 Januari 2020 PT XYZ membeli sebuah truk bekas tahun 2010 dengan harga Perolehan sebesar Rp 90.000.000,00 disusutkan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10.000.000,00 maka penyusutan dengan metode jam mesin adalah sebagai berikut:

Langkah pertama

TOTAL KAPASITAS JAM KERJA = 100.000 JAM KERJA

TAHUN 2020 = 15.000 JAM KERJA
 TAHUN 2021 = 22.000 JAM KERJA
 TAHUN 2022 = 25.000 JAM KERJA
 TAHUN 2023 = 21.000 JAM KERJA
 TAHUN 2024 = 17.000 JAM KERJA

Langkah kedua

Tarif penyusutan = $(90.000.000-10.000.000)/100.000$
 =800

Langkah ketiga

Menentukan biaya penyusutan

Biaya penyusutan pertahun = lihat tabel 4.5.

Tabel 4.5. PT. XYZ Metode JAM KERJA MESIN

Aset Tetap	2020	2021	2022	2023	2024
Harga Perolehan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Harga Perolehan-Residu	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Tarif	800	800	800	800	800
Jam Kerja	15.000	22.000	25.000	21.000	17.000
Penyusutan	12.000.000	17.600.000	20.000.000	16.800.000	13.600.000
Akumulasi Penyusutan	12.000.000	29.600.000	49.600.000	66.400.000	80.000.000
Nilai Buku	78.000.000	60.400.000	40.400.000	23.600.000	10.000.000

Sumber: data yang diolah

4.2.4 Pelepasan Aset Tetap.

Aset Tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dipakai dalam operasional Perusahaan, seperti mesin, kendaraan, pabrik, mess dan lain-lain yang karena beberapa sebab yaitu ketinggalan teknologi, habis umur manfaat, tidak dapat digunakan sebelum masa manfaatnya habis karena rusak, dan lain-lain dapat dihentikan pemakaiannya. Perusahaan terhadap aset yang dalam kondisi aset seperti tersebut, maka Perusahaan dapat melakukan pelepasan aset tetap. Dalam pelepasan aset tetap tersebut, apabila aset tetap tersebut disusutkan sampai habis maka tidak terjadi kerugian apapun tetapi apabila aset tetap tersebut tidak disusutkan sampai habis, tetapi jika aset

tetap tersebut dibuang dan masih mempunyai nilai buku maka nilai buku tersebut dianggap sebagai kerugian.

Cara pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan dijual, dibuang, ditukar. Dalam pelaporan di neraca, harus sudah tidak ada lagi dalam daftar aset tetap karena jika tidak dihapuskan dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyusutan secara rutin padahal aset tetap tersebut sudah dilepas. Akibatnya laba yang dilaporkan semakin kecil.

Sebagai contoh adalah berhubungan dengan Penyusutan diatas (lihat tabel 4.5) jika pada 5 Januari 2024 Truk tidak bisa digunakan. Perusahaan memutuskan untuk tidak digunakan lagi, maka jurnalnya adalah

Rugi Penghapusan Aset tetap	23.600.000
Truk	23.600.000

DAFTAR PUSTAKA

- HAM, Kementerian Hukum (2021) *Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Indonesia: Peraturan Pemerintah no 7.
- Harahap, S.S. (2011) *Akuntansi Aktiva Tetap*. 1st edn. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Horngren, C. et. all (2012) *Pengantar Akuntansi Keuangan*. 6th edn. Edited by S. Sihombing. Jakarta: Erlangga.
- Juan, ng eng dkk (2012) *Panduan praktis standar akuntansi keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusup, A.H. (2014) *Dasar-dasar Akuntansi*. 7th edn. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kartikahadi, H. dkk (2012) *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. 1st edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Kemenperin (2021) *Sektor Manufaktur Tumbuh Agresif di Tengah Tekanan Pandemi, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjar Baru*. Available at: <https://bspjibanjarbaru.kemenperin.go.id/SEKTOR-MANUFAKTUR-TUMBUH-AGRESIF-DI-TENGAH-TEKANAN-PANDEMI/> (Accessed: 29 March 2024).
- Purnairawan, Eddy, dkk (2021) *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ronald, S.G.S.S. (2024) *Dinamika Peretumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan proyeksi tantanga 2024, Sekertaris Kabinet Repubiik Indonesia*. Available at: <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/> (Accessed: 2 April 2024).
- Rudianto (2012) *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.
- Sinaga, R.U. dkk (2024) *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Skousen, K.F, E. al. (2012) *Akuntansi Intermediate*. 9th edn. Jakarta: Erlangga.

BAB 5

PROPERTI INVESTASI DAN ASET TAKBERWUJUD

Oleh Reny Dany Merliyana

5.1 Pendahuluan

Properti investasi, aset tetap dan juga aset takberwujud merupakan ketiga aset yang sangat diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan, yang digunakan dalam operasional bisnis suatu entitas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan menguntungkan bagi perusahaan yang memilikinya.

Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai perbedaan antara properti investasi dengan aset tetap, dan perbedaan properti investasi dengan aset takberwujud.

Properti investasi dan aset tetap memiliki persamaan karena sama-sama berbentuk fisik, digunakan untuk penyewaan/rental yang menghasilkan pendapatan sewa.

Aset tetap merupakan aset yang berwujud fisik yang digunakan dalam kegiatan produksi/penyediaan barang dan jasa, yang bertujuan untuk disewakan kepada pihak lain, ataupun keperluan administratif, yang dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi, contohnya: tanah, struktur bangunan, dan peralatan yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun (Kieso *et al.*, 2017).

Sedangkan, properti investasi diperoleh atau dibeli untuk menghasilkan keuntungan di masa depan dengan cara disewakan kepada pihak lain.

Adapun aset takberwujud merupakan aset yang tidak berbentuk fisik, tidak terlihat dan tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dan menguntungkan perusahaan yang memilikinya.

Yang membedakan antara aset tetap, properti investasi, dan aset takberwujud, yaitu:

- **Aset Tetap:**
 - 1) Aset yang digunakan untuk operasional sehari-hari perusahaan;
 - 2) Aset yang dimiliki untuk keperluan menghasilkan produk dan jasa bagi kelangsungan bisnis perusahaan;
 - 3) mengalami peristiwa depresiasi atau terjadi penyusutan aset seiring penggunaan asetnya.
- **Properti Investasi:**
 - 1) Aset yang dimiliki untuk disewakan agar dapat menghasilkan keuntungan (seperti pendapatan sewa maupun penilaian nilai properti);
 - 2) Aset yang tidak digunakan dalam usaha operasional harian.
- **Aset Takberwujud:**
 - 1) tidak berwujud fisik;
 - 2) sulit diukur karena tidak berwujud;
 - 3) memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan perusahaan yang memilikinya;
 - 4) diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut, kecuali *goodwill*.

5.2 Properti Investasi

Properti investasi diatur dalam *International Accounting Standards* (IAS) 40 mengenai *investment property*, yang kemudian diadopsi di Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 13 tentang properti investasi yang direvisi pada tahun 2007, dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (Hidayat, 2014).

Menurut IAS 40 dalam (Angelo and Nuryani, 2021) properti investasi yaitu suatu investasi yang dimiliki untuk menghasilkan rental, atau untuk kenaikan nilai, dan atau untuk keduanya. Properti investasi menurut PSAK No. 13 (Revisi 2015) dalam (Kahiking *et al.*, 2017) ialah properti berupa tanah/bangunan/bagian dari bangunan/keduanya yang dikuasai pemilik/*lessee*/penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai maupun

keduanya (yang tidak digunakan bagi kegiatan produksi/penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif harian). Jadi, properti investasi berupa suatu properti yang bertujuan untuk disewakan atau yang memiliki peningkatan nilai kegunaan, yang berasal dari kepemilikan sendiri maupun dari hasil sewa pembiayaan.

Contoh properti investasi:

1. Tanah yang dikuasai/dimiliki untuk jangka waktu yang panjang, diperuntukkan bagi kenaikan nilai dan bukan dijual atas kegiatan usaha harian secara jangka pendek. Serta, tanah yang dikuasai saat ini bagi penggunaan masa depan yang belum dapat ditentukan waktunya;
2. Bangunan yang dimiliki entitas yang disewakan kepada pihak lain melalui satu/lebih sewa operasi. Serta, bangunan yang belum dipakai namun disewakan pada pihak lain melalui satu/lebih sewa operasi; dan,
3. Properti dalam proses pembangunan/pengembangan yang digunakan di masa depan sebagai properti investasi. Properti tersebut bukan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, bukan dalam proses pembangunan/pengembangan pihak ketiga, bukan untuk digunakan sendiri, dan bukan yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan (SS, 2018).

- **Pengakuan dan Pengukuran**

Properti investasi dapat diakui sebagai aset, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan yang terkait dengan properti investasi, mengalir ke entitas dan biaya perolehan investasi tersebut dapat diukur secara andal (IAI, n.d.).

Properti investasi suatu entitas dalam PSAK 13 (IAI, n.d.) diukur melalui model biaya dan model nilai wajar, dimana entitas dapat:

- 1) Memilih diterapkan penilaian model nilai wajar atau diterapkan model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan kewajiban, yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan

nilai wajar atau imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi, dan

- 2) Memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain tanpa memperhatikan pilihan, sebagaimana pada point 1.

Properti investasi dimiliki dan diperoleh sang pemilik untuk disewakan dan atau untuk memperoleh kenaikan nilai properti tersebut maupun untuk keduanya, yang menghasilkan kas secara mandiri tanpa bergantung pada aset lain yang dikuasai pemilik. Properti investasi diukur dengan nilai wajar tanpa adanya penyusutan, karena entitas selalu menyajikan nilai wajar pada akhir periode pelaporan keuangan (Hidayat, 2014).

- **Transfer Properti Investasi**

Menurut PSAK 13 tahun 2015 dalam (Kahiking *et al.*, 2017), transfer ke- atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan melalui:

- 1) Dimulainya oleh pemilik, ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri,
- 2) Dimulainya pengembangan untuk dijual, ditransfer dari properti investasi menjadi persediaan,
- 3) Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, ditransfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi,
- 4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

- **Penghentian Pengakuan Properti Investasi**

Pengakuan atas properti investasi dihentikan pada saat kepemilikan atas properti tersebut dilepaskan atau saat sudah tidak digunakan lagi pemiliknya dan atau jika sudah tidak bermanfaat ekonomis di masa depan.

Selisih antara hasil neto atas pelepasan dengan jumlah tercatat aset yang diperoleh, akan menghasilkan keuntungan maupun kerugian yang diperoleh saat penghentian atau pelepasan properti investasi, yang kemudian diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan properti investasi tersebut.

5.3 Aset Takberwujud

Aset takberwujud berdasarkan IAS 38 (PSAK 19) dalam (Warren *et al.*, 2022) merupakan aset non-moneter yang teridentifikasi tidak berbentuk fisik. Aset takberwujud diakui: a) jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Pada umumnya aset takberwujud digunakan bagi operasional perusahaan (tidak untuk dijual).

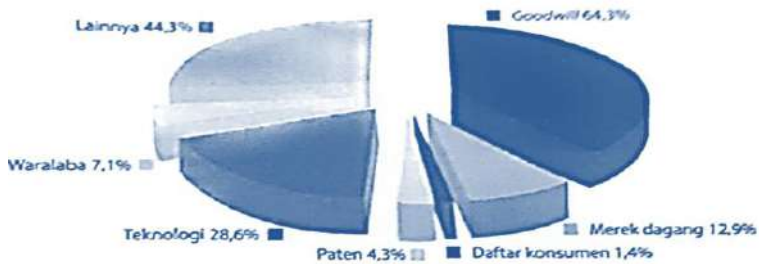
Aset takberwujud atau Aktiva takberwujud merupakan aktiva yang dimiliki perusahaan bagi operasional perusahaan, tidak berbentuk fisik, dan berumur lebih dari 1 tahun, dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehan dan memiliki kegunaan di masa depan (Halim, 2014). Jadi, aset takberwujud (*intangible asset*) yaitu aset yang tidak berwujud fisik yang bernilai ekonomi melalui hak yang melekat pada aset tersebut yang menjadi penentu nilai perusahaan dan berdampak pada kinerja dan kemajuan perusahaan.

Sedangkan, aktiva tetap takberwujud menurut (Halim, 2014), yaitu aktiva yang didapatkan dari pihak lain atau yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan, memberikan hak mutlak dan istimewa yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, dan memiliki masa kegunaan relatif tetap, atau lebih dari satu tahun.

Ketetentuan mengenai aset takberwujud berdasarkan PSAK 19 dalam (Purba, 2013), yaitu:

- **Pengakuan**, harus memenuhi tiga persyaratan:
 - 1) Dapat diidentifikasi (*Identifiability*), ialah kondisi dimana aset tersebut dapat disewakan, ditransfer atau dipertukarkan tersendiri/bersamaan dengan aset lainnya;
 - 2) Dapat dikendalikan (*control*), ialah pengendalian bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan atas kepemilikan aset takberwujud tersebut hanya untuk pemilikinya, tidak bisa digunakan pihak lain;

- 3) Manfaat ekonomi (*economic benefit*), ialah pemilik aset dapat menerima manfaat ekonomi berupa tambahan pendapatan, penghematan biaya dan manfaat lainnya
- **Perolehan**, melalui:
 - 1) **Perolehan secara terpisah** yaitu melalui pembelian, terdiri atas harga beli ditambah biaya-biaya yang diatribusikan langsung pada harga belinya sehingga aset tersebut siap untuk digunakan;
 - 2) **Penciptaan sendiri**, yang dihasilkan melalui riset yang dipatenkan, dimana biaya yang dikeluarkan terbagi menjadi dua yaitu biaya selama fase riset dan biaya fase pengembangan;
 - 3) **Perolehan melalui Kombinasi Bisnis**, aset tak berwujud yang dihasilkan berupa berbagai macam proyek riset dan pengembangan yang sudah dilakukan perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan pemilik, jika sudah memenuhi kriteria sebagai aset dan dapat diidentifikasi maka akan dipisahkan dari *goodwill*, dan dinilai menggunakan nilai wajar;
 - 4) **Hibah Pemerintah**, berupa lisensi, izin penyelenggaraan penyiaran, dan lain-lain yang mengacu pada PSAK 61 (Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan bantuan Pemerintah), dengan ketentuan bahwa aset takberwujud melalui hibah pemerintah tidak dapat dikreditkan langsung dengan kepemilikan usaha;
 - 5) **Goodwill**, yaitu aset takberwujud yang tidak dapat diidentifikasi, diatur dalam PSAK 22. *Goodwill* tidak dapat diamortisasi, tetapi diturunkan nilainya bersama aset tetap lain melalui mekanisme penurunan nilai aset.



Gambar 5.1. Frekuensi atas Pengungkapan Aset takberwujud studi pada 70 Perusahaan di Indonesia yang dikompilasi oleh penulis (Sumber: hasil olah penulis buku dalam (Warren *et al.*, 2022)).

5.3.1 Hak Paten

Hak paten ialah hak istimewa yang dimiliki entitas untuk menghasilkan dan menjual barang dengan satu keunikan atau lebih, yang diterbitkan oleh pemerintah yang berlaku selama 20 tahun umur manfaat. Entitas dapat membeli hak paten dari pihak lain, atau memperolehnya dengan mengembangkannya sendiri (Warren *et al.*, 2022).

Hak paten yang diatur dalam Hukum Hak Paten No. 14 tahun 2001 dibedakan menjadi hak paten untuk penemuan sederhana (hanya berlaku selama 10 tahun), dan hak paten bagi penemuan yang lebih canggih (Reeve *et al.*, 2010).

Saat terjadi pembelian hak paten, biaya awal mencakup imbalan jasa hukum terkait → masuk dalam akun aset (D), yang kemudian dihapuskan/diamortisasi selama estimasi umur manfaat hak paten dengan menggunakan metode garis lurus, untuk biaya riset dan pengembangan dicatat dalam jurnal sebagai berikut: Beban Amortisasi (D), dan Hak Paten (K), sedangkan biaya riset dan pengembangan → akan dicatat sebagai beban operasional pada periode terjadinya (Warren *et al.*, 2022).

Contoh soal:

PT A memperoleh Hak Paten pada tahun 2021 senilai Rp.250.000.000,-. Hak Paten tersebut masih berlaku sampai 13 tahun kedepan, namun umur masa manfaatnya hanya sisa 5 tahun. Buatlah ayat jurnal penyesuaian atas Hak Paten tersebut pada akhir tahun 2021!

Jawab:

nilai amortisasi paten = Harga perolehan/sisa umur manfaat
= Rp.250.000.000,-/5tahun
= Rp.50.000.000,-

Jurnal penyesuaian pada Desember 2021, yaitu:

(D) Beban Amortisasi atas Hak Paten	Rp.50.000.000,-
(K) Hak Paten	Rp. 50.000.000,-

5.3.2 Hak Cipta dan Merk Dagang

- Hak cipta atau *copyright*** yaitu hak istimewa untuk menerbitkan dan menjual karya tulis/materi artistik/komposisi musikal. Hak cipta diterbitkan oleh pemerintah, dan kepemilikannya dapat diperpanjang sampai 70 tahun setelah pengarangnya meninggal dunia. Biaya hak cipta meliputi semua biaya untuk menciptakan karya ditambah biaya administrasi atau hukum untuk mendapatkan hak tersebut. Hak cipta yang dibeli dari pihak lain dicatat pada harga pembelian. Hak cipta ini diamortisasi sepanjang umur manfaatnya (Warren *et al.*, 2022).
- Merek Dagang (*trademark*)** atau ® ialah nama/istilah/symbol yang digunakan untuk mengenali suatu perusahaan atau produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Umumnya perusahaan menggunakan ® dalam iklan produknya untuk mengidentifikasi merek dagangnya. Masa penggunaan merek dagang biasanya 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun berikutnya. Biaya hukum untuk mendaftarkan ke Pemerintah atas merek dagang, dicatat sebagai aset. Jika membeli dari pihak lain, biayanya juga dicatat sebagai aset. Merek dagang tidak diamortisasi, namun diuji nilainya pada tiap akhir periode akuntansi. Saat nilainya menurun, maka harus dihapus dan diakui sebagai kerugian (Warren *et al.*, 2022).

3. **Goodwill**, ialah aset tak berwujud akibat kondisi yang menguntungkan pemiliknya untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang melebihi nilai normalnya, seperti: lokasi, mutu produk, reputasi, maupun keahlian manajerial. Berdasarkan PSAK, jika dapat ditentukan secara objektif maka *goodwill* akan dicatat dalam akun. *Goodwill* tidak diamortisasi, jika terjadi rugi (jika kinerja perusahaan menurun), kerugiannya akan dicatat sebagai Beban lain-lain dalam Laporan Laba-Rugi (Warren *et al.*, 2022).

Contoh soal:

Tanggal 31 Desember 2021 PT A mencatat penurunan nilai *goodwill* yang diperoleh dari PT B sejumlah Rp.250.000.000,-
Buatlah ayat jurnal penurunan nilainya!

Jawab:

Jurnal penurunan nilai goodwill 31 Desember 2021, yaitu:

(D) Kerugian penurunan nilai Rp250.000.000,-

(K) Goodwill Rp.250.000.000,-

Tabel 5.1. Perbandingan Aset Tak Berwujud

Aset Takberwujud	Deskripsi	Periode Amortisasi	Beban Periodik
Hak Paten	Hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan atas inovasi	Estimasi umur manfaat tidak melebihi masa legal	Beban amortisasi
Hak Cipta	Hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan dari sastra, artistik, atau komposisi musik	Estimasi umur manfaat tidak melebihi masa legal	Beban amortisasi
Merek Dagang	Hak eksklusif untuk menggunakan nama, istilah, atau simbol	Tidak ada	Rugi penurunan nilai, jika nilai wajar < nilai tercatat (nilai yang diturunkan).

Aset Takberwujud	Deskripsi	Periode Amortisasi	Beban Periodik
Goodwill	Kelebihan harga pembelian bisnis di atas nilai wajar aset (aset-liabilitas)	Tidak ada	Rugi penurunan nilai, jika nilai wajar < nilai tercatat (nilai yang diturunkan).

(Sumber: hasil olah penulis buku dalam (Warren *et al.*, 2022).)

DAFTAR PUSTAKA

- Angelo, S. and Nuryani, N. (2021), "Pengaruh Pilihan Metode Nilai Wajar Properti Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Real Estate", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10 No. No. 2, pp. 90–97.
- Halim, A. (2014), *Akuntansi Keuangan Menengah II*, 2nd ed., Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hidayat, R.W. (2014), "Peluang dan Tantangan Investasi Properti di Indonesia", *Jurnal Akuntansi UNESA*.
- IAI. (n.d.). *PSAK 13 (2015) Properti Investasi*, Jakarta.
- Kahiking, K.N., Morasa, J. and Runtu, T. (2017), "Analisis Penerapan PSAK 13 mengenai Properti Investasi pada PT Ciputra Development TBK", *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. No. 2, pp. 1697–1708.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. (2017), *Akuntansi Keuangan Menengah*, IFRS (Volu., Salemba Empat, Jakarta).
- Purba, M.P. (2013), *Akuntansi Keuangan Aset Tetap Dan Aset Tak Berwujud*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Reeve, J.M., Warren, C.S., Duchac, J.E., Wahyuni, E.T., Soepriyanto, G., Jusuf, A.A. and Djakman, C.D. (2010), *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Buku 2., Salemba Empat, Jakarta.
- SS. (2018), "PSAK 13 (2015): Properti Investasi", *BINUS UNIVERSITY*, available at: <https://accounting.binus.ac.id/2018/11/27/psak-13-2015-properti-investasi/> (accessed 18 April 2024).
- Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J., Wahyuni, E.T. and Jusuf, A.A. (2022), *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*, 4th ed., Salemba Empat, Jakarta.

BAB 6

ASET TIDAK LANCAR SERTA KEMUNGKINAN UNTUK DIJUAL

Oleh Eha Nugraha

6.1 Pendahuluan

Aset tidak lancar atau *non-current asset* merupakan sumber daya entitas yang mempunyai manfaat finansial lebih dari satu tahun, berwujud fisik (tangible) atau non fisik (intangible), dan diperoleh untuk membantu kegiatan normal operasional entitas dan bukan dengan maksud untuk ditukar dan dijual kembali. Sumber daya tetap juga disebut *plant asset*, *fixed assets*, atau *noncurrent asset*. Aset tidak lancar sebagian besar diperoleh dengan penggunaan dana material, sehingga diperlukan perencanaan untuk memperoleh aset tersebut. Aset tidak lancar tidak dengan mudah diubah menjadi uang tunai secara instan dalam siklus aktifitas suatu entitas. Beberapa jenis aset tidak lancar antara lain tanah, bangunan, gedung, properti tertentu, mesin, peralatan, dan sumber daya lainnya yang mempunyai sifat sesuai dengan definisi aset tidak lancar. Aset tidak lancar sesuai dengan PSAK No.16 (Perubahan 2016) adalah sumber daya tetap yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam pembuatan atau penyediaan produk atau administrasi, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan yang sah, dan
2. Diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode.

6.2 Jenis Aset Tidak Lancar

Kieso (2019), mendefinisikan aset tidak lancar (*non-current assets*) sebagai aset yang bernilai wajar relatif stabil dan digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode. Kieso membagi aset tidak lancar menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. **Aset Tetap Berwujud (*Property, Plant, and Equipment*):** Aset yang memiliki nilai yang relatif stabil dan digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Aset-aset ini memiliki nilai yang relatif stabil dan digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode.
2. **Investasi Jangka Panjang (*Long-Term Investments*):** Aset yang digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan aset lain yang memiliki nilai yang relatif stabil dan digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode.
3. **Aset Intangible (*Intangible Assets*):** Aset yang tidak memiliki nilai fisik tetapi memiliki nilai yang relatif stabil dan digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode, seperti hak cipta, merek dagang, dan teknologi.
4. **Aset Jangka Panjang Lain (*Other Long-Term Assets*):** Aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti aset yang digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode, seperti aset yang digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode.

Dalam konteks akuntansi, aset tidak lancar ini diakui sebagai aset yang memiliki nilai yang relatif stabil dan digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode, sehingga nilai aset tidak lancar ini tidak diharapkan berubah secara signifikan dalam waktu dekat.

Menurut PSAK, contoh aset tetap yang termasuk dalam kategori aset tidak lancar berwujud adalah:

1. **Tanah:** Tanah yang digunakan untuk bangunan, fasilitas, atau lain-lain.
2. **Bangunan:** Bangunan yang digunakan untuk kantor, gudang, atau lain-lain.
3. **Mesin dan Peralatan:** Mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi, seperti mesin produksi, peralatan kantor, atau lain-lain.
4. **Vessel dan Kapal:** Vessel dan kapal yang digunakan untuk keperluan bisnis, seperti kapal tanker, kapal container, atau lain-lain.

5. **Sistem Komunikasi:** Sistem komunikasi yang digunakan untuk keperluan bisnis, seperti sistem telepon, sistem internet, atau lain-lain.
6. **Sistem Informasi:** Sistem informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis, seperti sistem komputer, sistem database, atau lain-lain.
7. **Fasilitas:** Fasilitas yang digunakan untuk keperluan bisnis, seperti fasilitas kantor, fasilitas gudang, atau lain-lain.
8. **Peralatan Jalan:** Peralatan jalan yang digunakan untuk keperluan bisnis, seperti truk, mobil, atau lain-lain.
9. **Peralatan Lain:** Peralatan lain yang digunakan untuk keperluan bisnis, seperti peralatan kantor, peralatan laboratorium, atau lain-lain.
10. **Aset Tetap Lain:** Aset tetap lain yang digunakan untuk keperluan bisnis, seperti aset tetap yang digunakan untuk keperluan administrasi, aset tetap yang digunakan untuk keperluan penelitian, atau lain-lain.

Namun, perlu diingat bahwa aset tetap harus memenuhi kriteria PSAK, yaitu memiliki nilai yang relatif stabil dan digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari satu periode.

6.3 Akuntansi Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun dan diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi pada periode-periode mendatang. Aset ini dicatat sebesar biaya perolehannya, yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membeli aset dan mengirimkannya, memasangnya, dan siap menggunakannya. Prinsip biaya diterapkan dalam pencatatan aset tidak lancar, artinya aset tersebut dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan untuk memperolehnya, termasuk biaya-biaya tambahan seperti pajak, pengiriman, dan biaya pemasangan.

Penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset tidak lancar selama masa manfaatnya, yaitu periode waktu dimana bisnis yakin akan menggunakan aset tersebut untuk

membantu menghasilkan pendapatan. Penyusutan merupakan penerapan prinsip pencocokan, yang bertujuan untuk mencocokkan biaya suatu aset dengan pendapatan yang dihasilkannya. Hal ini memastikan bahwa biaya diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan. Penurunan nilai adalah proses penurunan nilai aset tidak lancar di bawah nilai tercatatnya. Hal ini dapat terjadi ketika nilai aset turun di bawah nilai tercatatnya karena faktor-faktor seperti keusangan, kerusakan, atau perubahan kondisi pasar. Penurunan nilai diakui ketika nilai tercatat aset tidak lagi dapat diperoleh kembali melalui arus kas masa depan. Kerugian penurunan nilai dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi, dan nilai tercatat aset disesuaikan dengan jumlah terpulihkannya.

Ringkasnya, prinsip dan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan aset tidak lancar meliputi:

1. Prinsip Biaya: Aset tidak lancar dicatat sebesar biaya perolehannya, yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membeli aset dan mengirimkannya, memasangnya, dan siap menggunakannya.
2. Penyusutan: Proses mengalokasikan biaya suatu aset tidak lancar selama masa manfaatnya, yaitu periode waktu dimana perusahaan yakin akan menggunakan aset tersebut untuk membantu menghasilkan pendapatan.
3. Penurunan Nilai: Proses penurunan nilai aset tidak lancar di bawah nilai tercatatnya karena faktor-faktor seperti keusangan, kerusakan, atau perubahan kondisi pasar.

Prinsip dan metode ini memastikan bahwa aset tidak lancar dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan, sehingga memberikan pemahaman komprehensif kepada pemangku kepentingan tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

Di Indonesia, Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) memberikan kerangka akuntansi untuk aset tidak lancar. Menurut PSAK, aset tidak lancar diakui ketika biaya perolehan

suatu aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinannya bahwa entitas akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut. Aset tidak lancar pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, yang mencakup nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut (setelah dikurangi diskon dan rabat) dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tersebut dapat berfungsi sesuai tujuannya.

Penyusutan umumnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Jumlah yang dapat disusutkan adalah harga perolehan aset, atau jumlah lain yang dapat menggantikan biaya perolehan, dikurangi nilai sisa. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakainya.

Secara ringkas, prinsip dan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan aset tidak lancar meliputi prinsip biaya, penyusutan, dan penurunan nilai. Aset tidak lancar dicatat sebesar biaya perolehannya, yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membeli aset tersebut dan menyerahkannya, memasangnya, dan siap digunakan.

6.4 Penurunan Nilai dan Pelepasan Aset Tidak Lancar

Penurunan nilai adalah proses penurunan nilai aset tidak lancar di bawah nilai tercatatnya karena faktor-faktor seperti keusangan, kerusakan, atau perubahan kondisi pasar. Perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai melibatkan langkah-langkah berikut:

Identifikasi Aset: Identifikasi aset tidak lancar yang mungkin mengalami penurunan nilai.

1. Tentukan Jumlah Terpulihkan: Tentukan jumlah terpulihkan suatu aset, yang merupakan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakainya.

2. Bandingkan dengan Nilai Tercatat: Bandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatat aset.
3. Akui Kerugian Penurunan Nilai: Akui kerugian penurunan nilai jika jumlah terpulihkan kurang dari nilai tercatat. Penurunan nilai dihitung sebagai selisih antara nilai tercatat dan jumlah terpulihkan.
4. Tuliskan nilai tercatat aset ke jumlah terpulihkannya.

Pelepasan Aset Tidak Lancar: Perlakuan akuntansi untuk pelepasan aset tidak lancar melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Tentukan hasil pelepasan, yaitu jumlah yang diterima dari pelepasan aset.
2. Hitung keuntungan atau kerugian pelepasan dengan membandingkan hasil pelepasan dengan nilai tercatat aset.
3. Akui keuntungan atau kerugian pelepasan dalam laporan laba rugi.
4. Hapus aset dari neraca.

Contoh:

Misalkan suatu perusahaan mempunyai aset tidak lancar, sebuah mesin, dengan nilai tercatat sebesar \$100.000. Mesin tersebut tidak lagi digunakan karena kemajuan teknologi dan nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan adalah \$80.000. Perusahaan menentukan bahwa nilai pakai mesin tersebut juga sebesar \$80.000.

1. Identifikasi Aset: Mesin diidentifikasi sebagai aset yang mungkin mengalami penurunan nilai.
2. Tentukan Jumlah Terpulihkan: Jumlah terpulihkan ditentukan sebesar \$80.000, yang merupakan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai.
3. Bandingkan dengan Nilai Tercatat: Jumlah terpulihkan kurang dari nilai tercatat sebesar \$100.000.
4. Mengakui Kerugian Penurunan Nilai: Kerugian penurunan nilai sebesar \$20.000 diakui, yang merupakan selisih antara nilai tercatat dan jumlah yang dapat diperoleh kembali.
5. Penurunan Nilai: Nilai tercatat mesin diturunkan sebesar jumlah terpulihkan sebesar \$80.000.

Kemudian, perusahaan memutuskan untuk membuang mesin tersebut seharga \$90.000.

1. Tentukan Hasil Pembuangan: Hasil pembuangan adalah \$90,000
2. Hitung Keuntungan atau Kerugian: Keuntungan pelepasan dihitung sebagai \$90.000 (hasil pelepasan) dikurangi \$80.000 (nilai tercatat) = \$10.000.
3. Kenali Keuntungan atau Kerugiannya: Keuntungan pelepasan sebesar \$10.000 diakui dalam laporan laba rugi.
4. Hapus Aset: Mesin dikeluarkan dari neraca.

Singkatnya, perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai dan pelepasan aset tidak lancar melibatkan identifikasi aset, menentukan jumlah terpulihkan, membandingkannya dengan nilai tercatat, mengakui kerugian penurunan nilai, mencatatkan aset, dan mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan.

6.5 Kemungkinan Penjualan Aset Tidak Lancar

Kemungkinan penjualan adalah sebuah konsep dalam akuntansi yang mengacu pada kemungkinan menjual suatu aset dengan harga yang lebih kecil dari nilai tercatatnya. Konsep ini penting dalam pelaporan keuangan karena mempengaruhi cara aset dinilai dan dilaporkan di neraca. Pengakuan Aset pada Nilai Lebih Rendah antara Biaya dan Nilai Realisasi Bersih: Ketika suatu aset dianggap dimiliki untuk dijual, maka aset tersebut dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual aset dikurangi estimasi biaya penjualannya. Jika nilai realisasi bersih lebih kecil dari nilai tercatat aset, maka aset tersebut diturunkan sebesar nilai realisasi bersih. Studi Kasus: Misalkan sebuah perusahaan, XYZ Inc., mempunyai aset tidak lancar, sebuah mKemungkinan Penjualan: Kemungkinan penjualan adalah sebuah konsep dalam akuntansi yang mengacu pada kemungkinan menjual suatu aset dengan harga yang lebih kecil dari nilai tercatatnya. Konsep ini penting dalam pelaporan keuangan karena mempengaruhi cara aset dinilai dan dilaporkan di neraca.

Pengakuan Aset pada Nilai Lebih Rendah antara Biaya dan Nilai Realisasi Bersih: Ketika suatu aset dianggap dimiliki untuk dijual, maka aset tersebut dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual aset dikurangi estimasi biaya penjualannya. Jika nilai realisasi bersih lebih kecil dari nilai tercatat aset, maka aset tersebut diturunkan sebesar nilai realisasi bersih.

Studi Kasus:

Misalkan sebuah perusahaan, XYZ Inc., mempunyai aset tidak lancar, sebuah mesin, dengan nilai tercatat Rp 500 juta. Perusahaan memutuskan untuk menjual mesin tersebut karena kemajuan teknologi dan perubahan kondisi pasar. Estimasi harga jual mesin tersebut adalah Rp 400 juta, dan estimasi biaya penjualannya adalah Rp 20 juta.

Penerapan PSAK: Menurut PSAK, mesin harus dinilai berdasarkan biaya perolehan dan nilai realisasi bersih yang lebih rendah. Dalam hal ini, nilai realisasi bersih adalah Rp 400 juta (perkiraan harga jual dikurangi perkiraan biaya penjualan). Karena nilai realisasi bersih kurang dari nilai tercatat sebesar Rp 500 juta, maka mesin tersebut harus diturunkan nilainya menjadi nilai realisasi bersih sebesar Rp 400 juta. Pelaporan Keuangan: Mesin tersebut akan dilaporkan di neraca sebesar nilai realisasi bersih sebesar Rp 400 juta, yang merupakan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Penurunan nilai sebesar Rp100 juta (Rp500 juta - Rp400 juta) diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

Kemungkinan penjualan adalah sebuah konsep dalam akuntansi yang mempengaruhi cara aset dinilai dan dilaporkan di neraca. Ketika suatu aset dianggap dimiliki untuk dijual, aset tersebut dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Konsep ini penting dalam pelaporan keuangan karena memastikan bahwa aset dilaporkan pada nilai wajarnya dan kerugian penurunan nilai diakui ketika nilai aset berada di bawah nilai tercatatnya.

6.6 Studi Kasus

Studi Kasus 1: Penyusutan Aset Tidak Lancar

PT. XYZ membeli gedung senilai Rp 2 miliar pada 1 Januari 2018. Bangunan tersebut mempunyai masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa sebesar Rp 200 juta. Hitung beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penyelesaian:

Biaya penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Beban Penyusutan} &= (\text{Biaya} - \text{Nilai Sisa}) / \text{Beban Penyusutan Umur Manfaat} \\ &= (\text{Rp } 2.000.000.000 - \text{Rp } 200.000.000) / 10 \\ &= \text{Rp } 1.800.000.000 / 10 \\ &= \text{Rp } 180.000.000\end{aligned}$$

Dengan demikian, beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp180.000.000.

Pencatatan:

Tanggal	Keterangan Akun	Debet	Kredit
31/12	Biaya Penyusutan	Rp.180.000.000	
	Akumulasi Penyusutan		Rp.180.000.000

Studi Kasus 2: Penurunan Nilai Mesin

PT. ABC membeli mesin seharga Rp 1,5 miliar pada tanggal 1 Januari 2019. Mesin tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa sebesar Rp 150 juta. Namun karena kemajuan teknologi, mesin tersebut sudah tidak berguna lagi dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah Rp 800 juta. Hitung kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penyelesaian:

Kerugian penurunan nilai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kerugian Penurunan Nilai} = \text{Nilai Tercatat} - \text{Jumlah yang Dapat Dipulihkan Kerugian Penurunan Nilai}$$

$$= \text{Rp } 1.500.000.000 - \text{Rp } 800.000.000$$

$$= \text{Rp } 700.000.000$$

Dengan demikian, kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp700.000.000.

Pencatatan:

Tanggal	Keterangan Akun	Debet	Kredit
31/12	Kerugian Penurunan Nilai	Rp.700.000.000	
	Akumulasi Kerugian Penurunan		Rp.700.000.000

Studi Kasus 3: Kemungkinan Penjualan Aset Tidak Lancar

PT. PQR memiliki aset tidak lancar berupa peralatan dengan nilai tercatat Rp 1 miliar. Perkiraan harga jual peralatan tersebut adalah Rp 900 juta, dan perkiraan biaya penjualannya adalah Rp 50 juta. Hitung nilai realisasi bersih peralatan tersebut dan tentukan apakah peralatan tersebut harus dicatatkan.

Penyelesaian:

Nilai realisasi bersih peralatan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Nilai realisasi bersih = Perkiraan Harga Jual - Perkiraan Harga Pokok Penjualan

$$= \text{Rp } 900.000.000 - \text{Rp } 50.000.000$$

$$= \text{Rp } 850.000.000$$

Karena nilai realisasi bersih kurang dari nilai tercatat sebesar Rp 1 miliar, maka peralatan tersebut harus diturunkan nilainya menjadi nilai realisasi bersih sebesar Rp 850.000.000. Studi kasus dan contoh-contoh ini menggambarkan penerapan konsep-konsep yang dibahas dalam modul, termasuk penyusutan, penurunan nilai, dan kemungkinan penjualan aset tidak lancar.

Pencatatan:

Tanggal	Keterangan Akun	Debet	Kredit
31/12	Peralatan	Rp.150.000.000	
	Akumulasi Kerugian P		Rp.150.000.000

6.7 Rangkuman

Aset tidak lancar merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan perusahaan, dan memahami potensi penjualannya sangat penting untuk pelaporan keuangan yang akurat. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun dan diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi pada periode-periode mendatang. Aset ini dicatat sebesar biaya perolehannya, yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membeli aset dan mengirimkannya, memasangnya, dan siap menggunakannya. Penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset tidak lancar selama masa manfaatnya, yaitu periode waktu dimana bisnis yakin akan menggunakan aset tersebut untuk membantu menghasilkan pendapatan. Penurunan nilai adalah proses penurunan nilai aset tidak lancar di bawah nilai tercatatnya karena faktor-faktor seperti keusangan, kerusakan, atau perubahan kondisi pasar. Kemungkinan penjualan adalah sebuah konsep dalam akuntansi yang mengacu pada kemungkinan menjual suatu aset dengan harga yang lebih kecil dari nilai tercatatnya. Konsep ini penting dalam pelaporan keuangan karena mempengaruhi cara aset dinilai dan dilaporkan di neraca. Singkatnya, memahami aset tidak lancar dan potensi penjualannya sangat penting untuk pelaporan keuangan yang akurat. Aset tidak lancar dicatat sebesar biaya perolehannya, dan penyusutan serta penurunan nilai digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tersebut selama masa manfaatnya dan mengurangi nilainya jika nilainya berada di bawah nilai tercatatnya. Kemungkinan penjualan adalah sebuah konsep yang mempengaruhi cara aset dinilai dan dilaporkan di neraca.

Poin-Poin Penting:

1. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun dan diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi pada periode-periode mendatang.
2. Aset tidak lancar dicatat sebesar biaya perolehannya, yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membeli aset tersebut dan menyerahkannya, memasangnya, dan siap digunakan.
3. Penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset tidak lancar selama masa manfaatnya.
4. Penurunan nilai adalah proses penurunan nilai aset tidak lancar di bawah nilai tercatatnya karena faktor-faktor seperti keusangan, kerusakan, atau perubahan kondisi pasar.
5. Kemungkinan penjualan adalah sebuah konsep dalam akuntansi yang mengacu pada kemungkinan menjual suatu aset dengan harga yang lebih kecil dari nilai tercatatnya.

Memahami aset tidak lancar dan potensi penjualannya penting untuk pelaporan keuangan yang akurat karena hal ini memastikan bahwa aset dilaporkan pada nilai wajarnya dan bahwa kerugian penurunan nilai diakui ketika nilai aset berada di bawah nilai tercatatnya. Informasi ini penting bagi pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor, yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan mengenai kinerja dan prospek keuangan perusahaan.

6.8 Latihan Soal

1. Tanggal 1 Januari 2021, PT. Niaga membeli sebuah bangunan seharga Rp 5 miliar. Bangunan tersebut mempunyai masa manfaat 20 tahun dan nilai sisa sebesar Rp 200 juta. Hitung beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. PT. Karya Mandiri membeli mesin seharga Rp 2,5 miliar pada 1 Januari 2020. Mesin tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa Rp 250 juta. Namun karena kemajuan teknologi, mesin tersebut sudah tidak berguna

lagi dan nilai wajar bersih adalah Rp 400 juta. Hitung kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. PT. Samudera. memiliki aset tidak lancar berupa mesin produksi dengan nilai tercatat Rp 1,5 miliar. Perkiraan harga jual peralatan tersebut adalah Rp 860 juta, dan perkiraan biaya penjualannya adalah Rp 35 juta. Hitung nilai realisasi bersih peralatan tersebut dan tentukan apakah peralatan tersebut harus dicatatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB 7

SEKURITAS DILUSIAN DAN LABA PER SAHAM

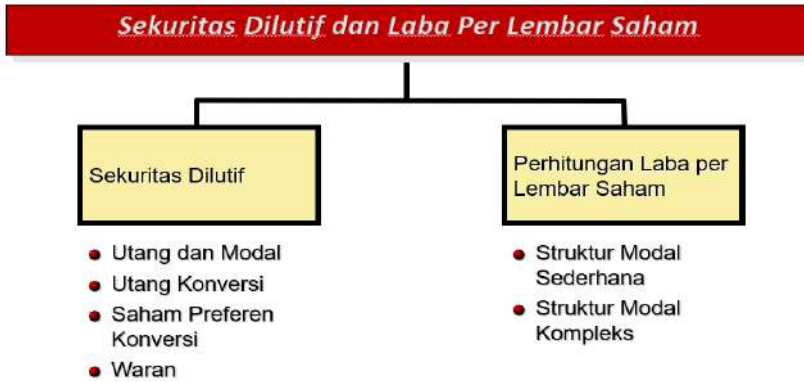
Oleh Fitri Ayu Wulandari

7.1 Pendahuluan

Suatu sekuritas yang memiliki kemampuan untuk dikonversi menjadi saham biasa di masa depan disebut sekuritas dilusian. Timbulnya perubahan tersebut memberi dampak perubahan terhadap laba per lembar saham suatu perusahaan. Pada bab 7 pada buku ini akan menjelaskan tentang konsep sekuritas dilusian dan laba per saham. Berikut rincian penjelasan dalam bagian 7:

1. Memberikan penjelasan tentang akuntansi yang berkaitan dengan penerbitan, konversi, dan penghentian sekuritas yang dapat dikonversi.
2. Memberikan penjelasan tentang obligasi yang dapat di konversi.
3. Memberikan penjelasan tentang pengkonversian saham preferen
4. Membandingkan perlakuan akuntansi bagi waran saham dan waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain.
5. Melakukan perhitungan laba per saham dalam struktur modal sederhana maupun kompleks.

Secara rebih ringkas dapat digambarkan pada gambar 7.1.



Gambar 7.2. Ringkasan penjelasan bab 7

7.2 Sekuritas Dilusian

Sekuritas dilusian didefinisikan sebagai suatu sekuritas yang memungkinkan untuk mengubahnya menjadi saham biasa di masa depan. Aktivitas perubahan ini berdampak pada pengurangan atau *dilution* laba per lembar saham. Hal ini didasari dalam proses mengubah sekuritas dilusian menjadi saham biasa menghasilkan peningkatan volume saham yang beredar, yang dapat menyebabkan penurunan nilai intrinsik per saham dan laba per lembar saham (EPS). Suatu entitas memanfaatkan sekuritas dilusian dalam meningkatkan modal tanpa harus menerbitkan saham biasa. Hal ini tentunya dapat membantu perusahaan menghindari dilusi kepemilikan dan menjaga kontrol perusahaan. selain itu, karena sekuritas dilusian biasanya memiliki tingkat bunga atau dividen yang lebih rendah daripada saham biasa, sekuritas dilusian dapat memberi perusahaan akses ke modal yang lebih murah.

Dalam peraturan PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan Dilutif mengatur pengungkapan dan pengukuran instrumen keuangan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa atau memiliki potensi dilusi terhadap laba per saham (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). Hal Ini mencakup instrumen seperti obligasi konversi, saham preferen konversi, dan instrumen keuangan serupa. PSAK 50 juga mengatur perhitungan laba per

saham dilutif (*diluted earnings per share, EPS*) untuk mencerminkan potensi dilusi dari instrumen keuangan tersebut.

Kemudian PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham menekankan pentingnya mengungkapkan informasi yang memadai kepada pemakai laporan keuangan tentang instrumen keuangan yang dapat dikonversi atau dapat dilutif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Disamping itu, PSAK 53 juga mencakup perhitungan laba per saham dilutif. Selanjutnya PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pencatatan instrumen keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Meskipun PSAK 55 tidak secara khusus membahas tentang sekuritas dilutif, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mempengaruhi bagaimana instrumen keuangan yang dapat dikonversi atau dapat dilutif diakui dan diukur dalam laporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PSAK 50 dan PSAK 53 lebih spesifik dalam mengatur tentang sekuritas dilutif dan pengungkapannya, sementara PSAK 55 lebih fokus pada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan secara umum.

7.2.1 Hutang dan Modal (Ekuitas)

Terdapat banyak masalah akuntansi seputar *financial instrument* seperti pengkonversian sekuritas, opsi saham, dan saham preferen berkisar pada apakah instrumen ini harus dilaporkan sebagai kewajiban/ekuitas. Suatu perusahaan harus memperlakukan saham biasa yang tidak dapat ditebus sebagai modal. Sebab, emiten tidak perlu membayar dividen atau membeli kembali sahamnya sendiri. Pengumuman dividen dan pembelian kembali saham merupakan kebijaksanaan emiten. Demikian pula dengan saham preferen yang tidak dapat ditebus, penerbitnya tidak diharuskan membayar dividen atau membeli kembali saham. Oleh karena itu, saham yang tidak dapat ditebus tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran di masa depan kepada pemegang saham biasa atau saham preferen.

7.2.2 Obligasi Konvertibel (*Convertible Bonds*)

Obligasi yang dapat diubah ke saham biasa pada tanggal tertentu atau dalam rentang waktu tertentu disebut obligasi konversi. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi obligasi lain dalam jangka waktu tertentu setelah diterbitkan (Kieso, Weygandt and Warfield, 2014). Ikatan konvertibel menggabungkan keuntungan dari ikatan dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham pada opsi pemegang. Investor yang membeli obligasi menginginkan keamanan atas bunga dan pokok yang dimilikinya, serta opsi konversi tambahan jika nilai saham meningkat secara signifikan. Ada dua alasan utama mengapa perusahaan menerbitkan *convertible* adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan modal ekuitas tanpa kehilangan kontrol kepemilikan yang berlebihan.
2. Mendapatkan pembiayaan utang dengan suku bunga yang lebih rendah. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan utang dengan suku bunga tinggi jika mereka melampirkan opsi konversi. Hak istimewa konversi meyakinkan investor untuk menerima tingkat bunga yang lebih rendah daripada yang biasanya diberikan oleh penerbit utang konvensional.

Disamping itu, utang konversi dapat dikatakan sebagai instrumen majemuk. Kieso *et al.* (2014) menyatakan bahwa Perusahaan akan menggunakan metode "***with and without***" dalam menilai instrumen yang berbeda. Berikut gambaran penerapan metode "***with and without***":

1. Langkah awal yaitu melakukan perhitungan nilai wajar utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas.
2. Kedua, menghitung komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini bersih dari seluruh arus kas masa depan kontrak yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar.
3. Ketiga, mengurangi komponen liabilitas yang dihitung pada langkah kedua dengan nilai wajar utang konversi (hasil penerbitan) untuk mendapatkan komponen ekuitas.



Gambar 7.2. Identifikasi komponen yang digunakan dalam metode *with and without*

(Sumber: Kieso, *et al.* , 2014)

Penerapan standar akuntansi untuk konversi obligasi tergantung pada beberapa faktor seperti sifat konversi, karakteristik obligasi, dan dampak konversi. Sifat konversi mengacu pada konversi yang terjadi di antara entitas yang sama atau berbeda, karakteristik obligasi berkaitan dengan obligasi konversi memiliki karakteristik ekuitas atau utang, serta dampak konversi berkaitan dengan konversi memiliki efek signifikan pada struktur modal dan laporan keuangan. Pengakuan pencatatan Akuntansi dalam obligasi konversi terjadi pada saat berikut.

1. Pada saat penerbitan

Pada saat penerbitan, obligasi konversi memiliki beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami pertama, Hak Konversi yaitu pemegang obligasi memiliki hak untuk menukarkan obligasi mereka dengan saham biasa perusahaan penerbit pada rasio konversi yang telah ditentukan sebelumnya. Rasio ini mencerminkan jumlah saham yang akan diterima investor untuk setiap obligasi yang dikonversi. Kedua, Nilai Wajar yaitu obligasi konversi memiliki nilai wajar, yang merupakan jumlah yang akan dibayarkan kepada investor ketika jatuh tempo jika obligasi tidak dikonversi. Ketiga, Tingkat Bunga yaitu obligasi konversi menawarkan tingkat bunga yang biasanya lebih rendah daripada obligasi biasa tanpa fitur konversi. Keempat, Tanggal Jatuh Tempo yaitu obligasi konversi memiliki tanggal jatuh tempo, yang merupakan tanggal di mana obligasi harus dibayarkan kembali kepada investor

jika tidak dikonversi sebelumnya. Berikut ilustrasi obligasi konversi saat penerbitan:

PT. Indojaya Perkasa merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang telah berdiri selama 25 tahun. Perusahaan berencana menerbitkan 4.000 lembar obligasi konversi pada awal tahun 2020. Obligasi konversi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,- per obligasi (total dana yang akan diterima oleh PT Indojaya Perkasa sebesar Rp. 4.000.000). Obligasi ini berjangka waktu empat tahun dengan tingkat Bunga 6% pertahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap tahun pada 31 desember. Sebagai informasi tambahan bahwa setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 500 lembar saham biasa. Tingkat bunga pasar untuk hutang yang tidak dapat dikonversi sebesar 9%.

Perhitungan komponen liabilitas dari utang konversi dihitung sebagai berikut.

Nilai sekarang dari pokok pinjaman: Rp. 4.000.000,- x 0.70843 (Tabel 7-2: $n=4, i=9\%$)	Rp.2.833.720
Nilai sekarang dari pembayaran bunga Rp. 240.000,- x 3.23972 (Tabel 7-4: $n=4, i=9\%$)	777.532
Nilai kini dari komponen liabilitas	Rp. 3.611.252

Kemudian, komponen ekuitas dari hutang konversi Indojaya Perkasa dihitung sebagai berikut.

Nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan:	Rp. 4.000.000
(Kurang) Nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan	3.611.252
Nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan	Rp. 388.748

Pengakuan jurnal untuk mencatat transaksi diatas sebagai berikut.

Kas	Rp. 4.000.000	
Utang Obligasi		Rp. 3.611.252
Agi Saham-Konversi Ekuitas		Rp. 388.748

2. Penyelesaian obligasi konversi

Beberapa bentuk penyelesaian obligasi konversi sebagai berikut:

a. Pembelian kembali pada saat jatuh tempo

Jika PT. Indojaya Perkasa tidak melakukan konversi atas obligasi pada saat jatuh tempo, maka PT. Indojaya Perkasa akan melakukan pencatatan jurnal untuk melunasi pemegang obligasi yang dapat dikonversi sebagai berikut.

Utang Obligasi	Rp. 4.000.000
Kas	Rp. 4.000.000

b. Konversi obligasi pada saat jatuh tempo

Jika PT. Indojaya Perkasa melakukan konversi atas obligasi pada saat jatuh tempo, maka PT. Indojaya Perkasa akan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut.

Agio Saham – Konversi Ekuitas	Rp. 388.748
Utang Obligasi	Rp 4.000.000
Modal Saham-Biasa	Rp. 2.000.000
Agio Saham-Biasa	Rp. 2.388.748

c. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo

Sebagai asumsi bahwa PT. Indojaya Perkasa melakukan konversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 desember 2021, maka:

Tabel 7.2. Perhitungan Amortisasi Obligasi Metode Bunga Efektif

Tanggal	Kas yang dibayar	Beban Bunga	Diskon Amortisasi	Nilai Obligasi
01-Jan-20				Rp 3,611,252
31-Dec-20	Rp 240,000	Rp 325,013	Rp 85,013	Rp 3,696,265
31-Dec-21	Rp 240,000	Rp 332,664	Rp 92,664	Rp 3,788,929
31-Dec-22	Rp 240,000	Rp 341,004	Rp 101,004	Rp 3,889,932
31-Dec-23	Rp 240,000	Rp 350,094	Rp 110,094	Rp 4,000,026

Agio Saham – Konversi Ekuitas	Rp. 388.748
Utang Obligasi	Rp. 3.788.929
Modal Saham - Biasa	Rp. 2.000.000
Agio Saham – Biasa	Rp. 2.177.677

d. Pembelian kembali sebelum jatuh tempo

Perusahaan dapat memutuskan untuk membeli kembali utang konversi sebelum jatuh tempo dalam beberapa situasi. Dalam hal ini, metode yang digunakan akan sesuai dengan dengan metode yang digunakan saat obligasi konversi pertama kali diterbitkan. Sebagai gambaran, PT. Indojaya Perkasa membeli kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai wajar dari utang konversi berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 desember 2021 sebesar Rp. 3.500.000.
- 2) Nilai wajar komponen liabilitas sebesar Rp. 3.000.000. diasumsikan nilai ini berdasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari obligasi yang tidak dapat dikonversi dalam jangka waktu 2 tahun.

PT. Indojaya Perkasa akan menentukan keuntungan atau kerugian atas liabilitas, sebagai berikut:

Nilai kini komponen liabilitas 31 desember 2021	Rp. 3.000.000
Nilai tercatat kompone liabilitas tanggal 31 Desember 2021. (tabel 1)	(3.788.929)
Keuntungan atas pembelian	Rp. 788.929

Hasil perhitungan menggambarkan keuntungan atas pembelian kembali. Sehingga PT. Indojaya Perkasa melakukan penjurnalan untuk mencatat pembelian kembali sebagai berikut:

Utang Obligasi	Rp. 3.788.929
Agio Saham – Konversi Ekuitas (Rp. 3.500.000-3.000.000)	Rp. 500.000
Keuntungan Pembelian Kembali	Rp. 788.929
Kas	Rp. 3.500.000

7.2.3 Saham Preferen Konversi (*Convertible preference share*)

Konversi saham preferen diartikan sebagai suatu kondisi dimana pemegang saham preferen memiliki hak untuk menukar saham preferen mereka dengan saham biasa penerbit pada rasio konversi tertentu. Perbedaan antara saham preferen dengan saham biasa terletak pada penerimaan dividen, dimana dividen akan dibagikan lebih dahulu kepada pemilik saham preferen daripada pemegang saham biasa. Pemilik saham preferen juga dapat memiliki hak untuk memilih anggota dewan direksi atau memiliki hak likuidasi prioritas jika perusahaan dilikuidasi. Pencatatan akuntansi untuk saham preferen konversi melibatkan pengakuan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen dan potensi konversi saham preferen menjadi saham biasa.

Dalam akuntansi perusahaan menggunakan metode nilai buku atas aktivitas konversi saham preferen. Ketika saham preferen dikonversi ataupun dibeli kembali, maka tidak akan ada keuntungan maupun kerugian yang akan diakui. Hal ini didasari karena perusahaan tidak akan mengakui keuntungan maupun kerugian yang melibatkan transaksi dengan pemegang saham lama. Untuk mengilustrasikan, asumsikan PT. Indojoya Perkasa menerbitkan 2.000 lembar saham preferen yang dapat dikonversi dengan nilai nominal Rp. 2 per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga Rp. 400 per saham. Sehingga ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini sebagai berikut.

Kas	Rp. 800.000		
Modal saham – Preferen		Rp.	4.000
Agi Saham – Ekuitas Konversi		Rp.	796.000

Apabila setiap saham dapat dikonversi menjadi 40 saham biasa (dengan nilai nominal Rp. 2) dengan nilai wajar Rp. 850.000, maka ayat jurnal untuk menvatat transaksi konversi sebagai berikut.

Modal saham – Preferen	Rp.	4.000
Agi Saham – Ekuitas Konversi	Rp.	796.000

Modal saham – Biasa	Rp. 160.000
Agio Saham – Biasa	Rp. 640.000

Namun apabila saham preferen yang dapat dikonversi dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan dikonversi, maka penjournalana transaksi sebagai berikut.

Modal saham – Preferen	Rp. 4.000
Agio Saham – Ekuitas Konversi	Rp. 796.000
Saldo Laba	Rp. 50.000
Kas	Rp. 850.000

PT. Indojaya Perkasa tidak melaporkan keuntungan atau kerugian dari pembelian kembali. Setiap keuntungan yang dibayarkan di atas nilai buku saham preferen konversi biasanya di debit ke saldo laba, berdasarkan teori kelebihan dividen yang diberikan kepada pemegang saham preferen untuk memudahkan pembelian kembali.

7.2.4 Waran Saham

Waran saham merupakan sebuah sertifikat yang memberikan hak pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sebagai insentif tambahan bagi para investor, waran biasanya diterbitkan bersama dengan saham preferen atau obligasi. Waran saham memiliki karakteristik yang berbeda dengan saham biasa, hal ini dilandasi beberapa hal antara lain (1) **Kepemilikan:** Pemegang waran saham tidak memiliki kepemilikan dalam perusahaan dan tidak berhak atas dividen. (2) **Hak:** Pemegang waran saham hanya memiliki hak untuk membeli saham biasa pada harga dan waktu tertentu., (3) **Harga:** Waran saham biasanya diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah daripada saham biasa. (4) **Risiko:** Karena pemegang waran saham tidak dijamin akan mendapatkan keuntungan, waran saham memiliki risiko yang lebih tinggi daripada saham biasa.

Pencatatan akuntansi waran saham mencakup pencatatan penerbitan waran, perubahan nilai waran, dan kemungkinan pelaksanaannya. Dalam transaksi keuangan, ada

dua metode yang berbeda untuk memberikan waran saham: metode proposional dan metode inkremental.

1. Metode proposional.

Nilai waran saham dialokasikan secara proposional di antara semua instrumen keuangan yang terlibat dalam transaksi, seperti saham biasa, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya, berdasarkan nilai relatif masing-masing instrumen. Nilai waran dibagi secara proporsional berdasarkan proporsi nilai instrumen keuangan yang terlibat dalam transaksi keuangan secara keseluruhan dalam metode proposional. Dalam kasus ini, waran dapat didistribusikan bersama dengan saham biasa dan obligasi, atau jika waran didistribusikan bersama dengan obligasi.

2. Metode inkremental.

Nilai waran saham dialokasikan sebagai jumlah dari nilai instrumen keuangan yang sudah ada dalam metode inkremental. Dengan kata lain, nilai waran dialokasikan sebagai jumlah dari nilai instrumen keuangan yang sudah ada. Dengan demikian, jika waran diterbitkan bersama dengan saham biasa, nilai waran akan dialokasikan sebagai jumlah dari nilai instrumen keuangan yang sudah ada.

Kesimpulan yang dapat di tarik dari penjelasan diatas adalah Metode inkremental mempertimbangkan nilai waran sebagai nilai tambahan di atas instrumen keuangan yang sudah ada, sedangkan metode proposional membagi nilai waran secara proporsional berdasarkan nilai relatif instrumen keuangan yang terlibat dalam transaksi. Ini adalah perbedaan utama antara kedua metode ini. Kondisi pasar, preferensi perusahaan, dan kompleksitas transaksi memengaruhi pilihan metode.

Berikut ilustrasi penggunaan metode pada waram saham.

1. Metode proposional.

PT Antara menawarkan paket sekuritas sebanyak 10.000 lembar seharga Rp10.000.000, yang terdiri atas obligasi (nilai nominal, Rp1.000, dan tingkat bunga 8,75%) dan Waran berjangka 5 tahun (<i>detachable warrant</i>) yang dapat digunakan untuk

membeli saham biasa (nominal Rp5,00) pada harga Rp25,00. Kurs jual obligasi (tanpa Waran) pada saat itu adalah 99 dan waran memiliki nilai pasar Rp30,00.

Berikut penyelesaian kasus diatas:

Nilai pasar obligasi tanpa waran (10.000.000 x .99)	9.900.000
Nilai pasar untuk waran (10.000 x Rp30)	<u>300.000</u>
Total Nilai Pasar Agregat	<u>Rp10.200.000</u>

Alokasi:

- obligasi = $(9.900.000 : 10.200.000) \times 10.000.000 =$	9.705.882
- waran = $(300.000 : 10.200.000) \times 10.000.000 =$	294.118

Jurnal yang timbul atas transaksi di atas sebagai berikut.

a. Mencatat Penjualan Obligasi

Kas	Rp. 9.705.882
Diskon Utang Obligasi	Rp. 294.118
Utang Obligasi	Rp. 10.000.000

b. Mencatat Penjualan Waran

Kas	Rp, 294.118
Modal Disetor - Waran	Rp. 294.118

Ketika seluruh Waran (10.000 lembar) ditukarkan dengan saham, dan harga pasar saham per lembar saat itu adalah Rp. 5.

Kas (10.000 x Rp25)	250.000
Modal Disetor - Waran	294.118
Modal Saham Biasa (10.000 x 5)	50.000
Agio Saham Biasa	494.118

2. Metode inkremental.

Metode inkremental diterapkan dalam situasi dimana nilai pasar wajar untuk saham waran atau obligasi tidak pasti (penerapannya sama dengan metoda inkremental untuk penjualan saham secara lump-sum). Ilustrasi: mengingat

data di atas menggunakan metode proposional, maka nilai pasar yang wajar untuk obligasi tidak diketahui, namun nilai pasar yang wajar untuk SW diketahui sebesar Rp300.000,00, maka alokasinya sebagai berikut:

Penerimaan secara “lump-sum”	Rp10.000.000
Dialokaskan ke waran saham	300.000
Sisa alokasi untuk obligasi	Rp 9.700.000

Kesimpulan atas transaksi diatas adalah selisih antara penerimaan pembayaran lump-sum dan waran saham, dikategorikan sebagai penerimaan yang timbul akibat adanya obligasi. IASB mengindikasikan bahwa suatu perusahaan memisahkan komponen utang dan ekuitas dari suatu ekuitas, seperti utang konversi atau obligasi yang diterbitkan dengan waran (Kieso, *et al.*, 2014).

7.3 Laba Per Saham

Labanya per saham atau dikenal dengan istilah *Earnings Per Share* (EPS) adalah suatu rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada setiap lembar saham yang beredar. Hal ini penting dalam analisis keuangan karena memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan yang dapat dinikmati oleh setiap pemegang saham. EPS dihitung dengan melakukan pembagian laba bersih perusahaan dengan jumlah saham biasa yang beredar.

Rumus dasar untuk menghitung laba per saham sebagai berikut.

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Dimana:

1. Laba Bersih adalah keuntungan bersih perusahaan yang diperoleh setelah mengurangi seluruh biaya-biaya dan pajak.
2. Jumlah Saham Beredar adalah jumlah keseluruhan saham biasa yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan pada periode tertentu.

Earnings Per Share (EPS) hanya memberikan gambaran parsial tentang profitabilitas perusahaan. EPS tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti struktur modal perusahaan, tingkat pertumbuhannya, dan risiko bisnisnya. Akan tetapi, pengungkapan EPS memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam membandingkan kinerja antar perusahaan dalam periode pelaporan yang sama dan antara periode pelaporan yang berbeda untuk perusahaan yang sejenis.

Dalam menghitung laba per saham (EPS), yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan, ada dua metode umum yang digunakan: metode struktur modal sederhana (metode rata-rata) dan metode struktur modal kompleks (metode tertimbang). Berikut ini adalah penjelasan singkat untuk keduanya:

1. Metode struktur modal sederhana (metode rata-rata)

Metode sederhana untuk menghitung EPS adalah dengan membagi jumlah laba bersih yang dihasilkan selama periode pelaporan dengan jumlah saham biasa yang beredar selama periode pelaporan tersebut. Untuk laporan keuangan interim, ini adalah metode yang langsung dan umum.

2. Metode struktur modal kompleks (metode tertimbang).

Metode struktur modal kompleks atau disebut juga metode *diluted* adalah metode yang digunakan untuk menghitung laba per saham (EPS) dengan mempertimbangkan efek *dilutif* (pengenceran) dari sekuritas *dilutif* (*dilutive securities*). Sekuritas *dilutif* adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa di masa depan, sehingga meningkatkan jumlah saham yang beredar dan berpotensi menurunkan EPS. Perhitungan EPS metode kompleks lebih rumit daripada metode sederhana karena memerlukan estimasi jumlah saham biasa yang akan beredar jika semua sekuritas *dilutif* dikonversi menjadi saham biasa.

Metode kompleks melibatkan mempertimbangkan perubahan jumlah saham beredar selama periode laporan, misalnya karena saham tambahan yang diterbitkan atau

saham yang dibeli kembali. Ini memerlukan perhitungan tertimbang EPS untuk memperhitungkan perubahan dalam jumlah saham beredar sepanjang periode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, struktur modal yang kompleks muncul ketika suatu perusahaan memegang convertible sekuritas, opsi, waran, atau hak lain yang dapat dikonversi, yang jika dikonversi atau dilaksanakan, berpotensi menghasilkan laba per saham. Perusahaan dengan struktur modal yang kompleks biasanya melaporkan laba per saham dasar dan dilusian.

Perusahaan melakukan konversi dengan menukar sekuritas yang dapat ditukar dengan saham biasa. Dalam metode konversi, perusahaan menggunakan metode ini untuk menghitung dampak dilutif dari potensi konversi laba per saham. Obligasi konversi menggunakan dua elemen: (1) pengaruh wesel konversi pada awal periode (atau pada saat penerbitan sekuritas, jika diterbitkan selama periode tersebut), dan (2) penghapusan bunga terkait setelah dikurangi pajak. Oleh karena itu, penyebut—rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar—ditambahkan oleh jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan.

Ilustrasi sekuritas yang dapat dikonversi sebagai berikut. Tahun 2020, PT. Agung memiliki laba bersih sebesar Rp. 50.000.000, dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar Rp. 1.000.000 lembar. Perusahaan juga memiliki 2 obligasi (A dan B) yang dapat dikonversi beredar.

<p>Obligasi A berjumlah 200 lembar dengan total nilai Rp. 60.000.000 juta dan memiliki bunga 8%. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 per lembar saham.</p>	<p>Obligasi B berjumlah 100 lembar dengan total nilai Rp. 40.000.000 dan memiliki bunga 7%. Obligasi diterbitkan pada 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham.</p>
<p>Tambahan: Beban bunga tahun 2020 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar Rp. 5.000.000 dan obligasi B sebesar Rp. 3.000.000. Diketahui tarif pajak efektif adalah 25%.</p>	

Berdasarkan ilustrasi diatas, berikut gambaran penyelesaian.

Penyesuaian laba bersih

Laba bersih	Rp 50.000.000
(+) penyesuaian beban bunga setelah pajak	
Obligasi A (Rp 5jt x [1-.25])	3.750.000
Obligasi B (Rp 3jt x 4/12 x [1-.25])	750.000
Penyesuaian laba bersih	Rp 54.500.000

Penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar

Rata-rata tertimbang saham beredar	1.000.000
(+) saham yang diasumsikan akan diterbitkan	
Obligasi A (awal tahun)	200.000
Obligasi B (tanggal penerbitan, 1 Sept = 4/12 x 90.000)	30.000
Penyesuaian laba bersih	1.230.000

Laba Per Saham

Laba bersih tahun berjalan	Rp 50.000.000
LPS dasar (50 juta / 1 juta)	Rp 50
LPS terdilusi (54.5 juta / 1.23 juta)	Rp 44.31

Untuk setiap periode yang disajikan, perusahaan wajib mempublish laba per saham. Selain itu, jika perusahaan melaporkan data EPS yang telah terdilusi setidaknya untuk satu periode, perusahaan tersebut harus melaporkan data untuk

seluruh periode yang disajikan, meskipun data tersebut sama dengan dasar EPS. Jika perusahaan menunjukkan hasil operasi periode tertentu, perusahaan harus menunjukkan hasil operasi periode tersebut per jumlah saham yang disajikan. Penyajian ganda laba per saham dan struktur modal yang kompleks menuntut pengungkapan tambahan dalam bentuk catatan di bawah ini.

1. Penjelasan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan berbagai sekuritas yang didistribusikan.
2. Rekonsiliasi pembilang dan penyebut dari dasar dan dicairkan berdasarkan berbagai perhitungan, termasuk pendapatan individu dan dampak jumlah saham semua sekuritas yang mempengaruhi EPS dasar.
3. Efek dividen pilihan dalam menghitung pendapatan yang tersedia untuk umum pemegang saham dalam menghitung EPS dasar.
4. Efek yang berpotensi melemahkan EPS dasar di masa depan yang tidak termasuk dalam perhitungan karena mereka akan antidilutive. .

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (2014) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50 Tentang Instrumen Keuangan: Penyajian*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2017) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 53 Tentang Pembayaran Berbasis Saham*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2020) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 Tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. (2014) *Intermediate Accounting (IFRS Edition) 2nd Edition*. 2nd edn. New Jersey: John Wiley and sons.

BAB 8

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN DAN AKUNTANSI SEWA

Oleh Sev Rahmiyanti

8.1 Akuntansi Pajak Penghasilan

8.1.1 Konsep Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang menyediakan suatu jasa. (Suwardjono, 2010). Kegunaannya untuk memberikan informasi, khususnya entitas keuangan, yang dianggap berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. American Accounting Association (AAA) dalam (Soemarso, 2009) akuntansi sebagai proses mengidentifikasi serta mengukur informasi ekonomi sehingga memungkinkan pihak yang menggunakannya membuat penilaian dan keputusan yang jelas dan percaya diri, menyebutkan sebagai proses pelaporan.

8.1.2 Konsep Akuntansi Perpajakan

Pajak merupakan suatu manfaat yang dibebankan oleh negara secara sepihak (menurut standar yang berlaku umum) kepada warga negara atau badan usaha atas penghasilan kena pajaknya, tanpa dipungut biaya, serta hanya dipergunakan untuk menutup pengeluaran umum negara (Feldmann, 2010).

Pajak disetor oleh warga negara ke kas negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) tanpa pertimbangan yang tegas (Mardiasmo, 2011).

Akuntansi Perpajakan merupakan seni pencatatan, mengklasifikasikan, meringkas, dan penafsiran transaksi keuangan suatu badan usaha dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima selama suatu tahun (penghasilan yang menjadi dasar penentuan biaya dan pajak penghasilan terutang) sebagai dasar dalam

menentukan besarnya kontribusi pajak penghasilan terutang oleh badan usaha sebagai wajib pajak (Cysco Danny R, 2009).

Akuntansi Perpajakan merupakan akuntansi yang menggunakan perhitungan perpajakan dalam penerapannya serta selain berpegang pada prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga mengacu pada peraturan perpajakan serta pelaksanaannya (Lubis, 2010).

8.1.3 Prinsip Akuntansi Pajak

Beberapa prinsip akuntansi pajak, adalah:

1. Satuan hitung
2. Kontinuitas
3. Target nilai tukar
4. Konsistensi
5. Konservatif.

8.2 Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak penghasilan sesuai Pasal 4 Ayat 1 UU, Menurut Peraturan Nomor 17 Tahun 2000 atau yang terangkum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan tambahan manfaat ekonomi yang diperoleh oleh seorang wajib pajak, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, dapat dipergunakan dengan nama atau bentuk apa pun dalam mengkonsumsi ataupun penambahan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Muljono, 2006).

Standar pengakuan penghasilan dalam akuntansi perpajakan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok:

1. Basis Akrual
Pada basis akrual terjadi pendapatan diakui pada saat diperoleh dan biaya timbul, akan dicatat pada saat pembayaran.
2. Basis Kas (Cash Basis)
Berbasis tunai yaitu pendapatan dicatat dalam bentuk tunai pada saat diterima serta pengeluaran dibayarkan secara tunai.
3. Campuran

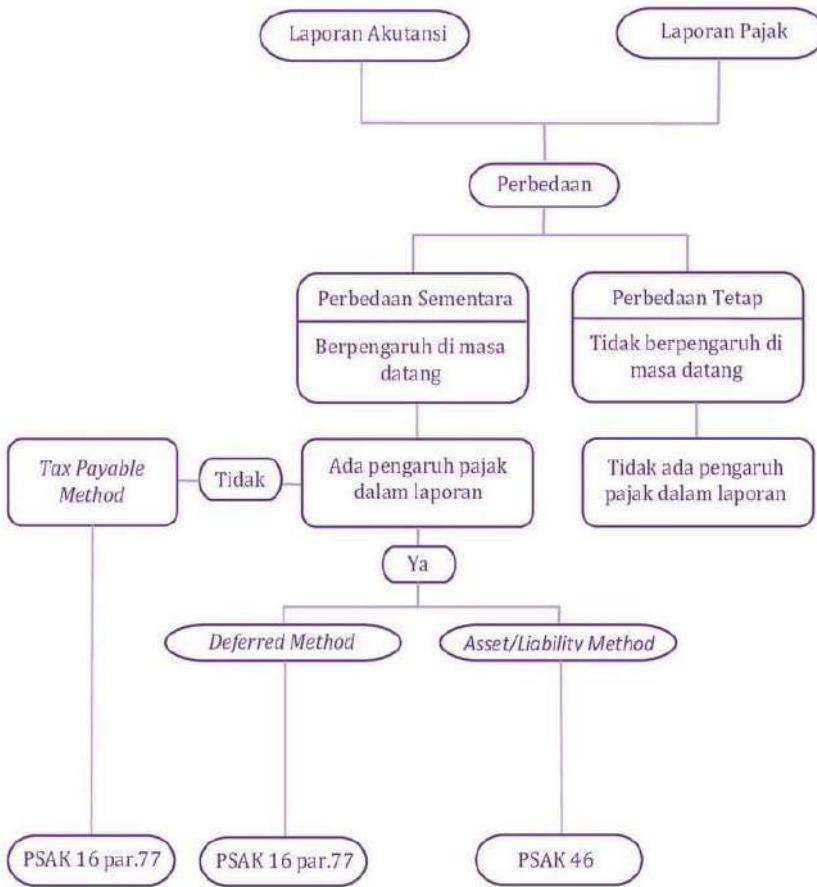
4. Stelsel campuran merupakan penyempurnaan dari basis kas yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

8.2.1 Prinsip Akuntansi Pajak Penghasilan

Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan pada PSAK No 46 (IAI, 2010) adalah:

1. Pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan pada tahun berjalan (pengembalian PPh) dicatat berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Liabilitas pajak tangguhan dan asset pajak tangguhan (liabilitas pajak tangguhan atau asset pajak tangguhan) dihitung menggunakan tarif pajak PPh yang berlaku untuk menentukan efek pajak masa depan dari perbedaan sementara dan kompensasi kerugian (penghapusan pajak kerugian) akan dicatat.
3. Asset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan diukur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Jumlah asset pajak tangguhan harus ditinjau secara berkala dan penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan jika terdapat bukti bahwa jumlah tersebut tidak akan terealisasi seluruhnya.

Diagram alir perhitungan pajak penghasilan PSAK no. 46 dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 8.1. Akuntansi Pajak Penghasilan

8.2.2 Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46

Tujuan PSAK No. 46 Tahun 2010 yaitu:

1. Peraturan perlakuan akuntansi pajak penghasilan
2. Pelaporan dampak pajak pada periode kini dan masa depan
3. Pemulihan nilai neraca (pembayaran) asset (kewajiban) dimasa depan, tercermin dalam neraca entitas (ekonomi)

4. Transaksi serta peristiwa lain pada periode berjalan, yang tercermin dalam laporan keuangan entitas (ekonomi)
5. Pernyataan untuk mengatur pelaporan tagihan pajak.
6. Keterlambatan karena sisa kerugian yang dapat diganti pada tahun berikutnya
7. Keputusan pajak final, MEP, penambahan pelaksanaan keputusan pajak pada definisi asset pajak tangguhan.

8.2.3 Pencatatan dan Penyajian

Pengakuan asset dan kewajiban pajak tangguhan dicatat dari rugi pajak yang masih dapat diperoleh kembali, serta dari selisih waktu antara laporan keuangan kegiatan ekonomi dengan laporan akuntansi perpajakan, dikalikan dengan pajak kini, maka pajak penghasilan paling banyak adalah 30%. Untuk mencerminkan terjadinya suatu kewajiban perpajakan yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset pajak tangguhan	xxx	
Pendapatan pajak tangguhan		xxx

Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban pajak tangguhan	xxx	
Kewajiban pajak tangguhan		xxx

Penyajian pajak tangguhan, yaitu:

1. Tagihan pajak dan kewajiban perpajakan harus disajikan dalam neraca terpisah dari asset dan kewajiban lainnya.

2. Asset dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan harus dipisahkan dari asset pajak tahun fiskal (asset pajak/pembayaran uang muka) dan kewajiban pajak (pembayaran penghasilan).
3. Asset atau liabilitas pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai asset atau liabilitas jangka pendek.
4. Tagihan pajak berdasarkan penghasilan kena pajak tahun buku tersebut dan neraca menunjukkan jumlah bersihnya.
5. Beban (penghasilan) pajak yang berkaitan dengan laba atau rugi aktivitas biasa harus disajikan tersendiri dalam penghitungan laba rugi.
6. Asset pajak tangguhan disajikan terpisah sehubungan dengan akun klaim pengembalian PPh, dan liabilitas pajak tangguhan juga disajikan terpisah Bersama dengan utang PPh 29.
7. Pajak Penghasilan final.

8.3 Akuntansi Sewa

8.3.1 Sewa

Semula sewa dikenal istilah leasing, leasing berasal dari kata lease yaitu sewa atau yang sering diartikan dengan menyewakan. Sewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menyewa memberikan hak kepada penyewa agar dapat menggunakan suatu barang selama jangka waktu sesuai kesepakatan. Sebagai imbalannya, lessor melakukan pembayaran kepada lessor (IAI, 2009).

Penyewa dapat diberikan opsi (hak pakai) untuk membeli barang modal pada akhir masa kontrak. Sehingga hak milik atas aktiva produksi tetap berada pada penyewa selama jangka waktu sesuai perjanjian penyewaan (Suandy, 2008).

Pengertian ini memberikan arti pada suatu perjanjian yang dibuat kepada kedua belah pihak, yaitu yang menyewakan memberikan atau mengalihkan hak untuk memekai atau mempergunakan barang miliknya, baik berupa tanah, kendaraan, peralatan atau harta benda lain yang dapat diperoleh untuk jangka waktu tertentu, seiring berjalannya waktu untuk disewakan kepada penerima. Sebagai imbalan

kepada pihak yang menyewakan atas hak pakai barang tersebut, pihak yang menyewa wajib membayar sejumlah uang sewa atau ganti rugi sesuai kesepakatan para pihak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan sewa, yaitu:

1. Pihak yang menyewakan, yaitu yang menyewakan pihak yang mengalihkan harta atau modal.
2. Pihak yang menyewakan, yaitu pemberi sewa atas suatu barang kepada pihak yang membutuhkan.
3. Benda yang disewakan merupakan barang yang dijaminakan dalam perjanjian sewa-menyewa, mencakup berbagai barang baik keperluan teknologi sampai dengan Teknik atau perkantoran.
4. Pembayaran rutin sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
5. Untuk penilaian ditentukan diawal atau dimulainya kontrak.
6. Pada akhir penyewaan, penyewa mempunyai hak opsi, dimana penyewa berhak dalam memutuskan akan membeli barang tersebut dengan harga yang sama.
7. Masa sewa sesuai perjanjian kedua belah pihak.

8.3.2 Pengakuan Sewa

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2017) Paragraf 22 (Ikatan Akuntansi Indonesia) menjelaskan *lessee* harus mendaftarkan hak pakai dan liabilitas. *Lessee* mempunyai opsi untuk tidak mengakui asset dan liabilitas hak pakai jika sewa tersebut bersifat jangka pendek atau sewa bernilai rendah diakui sebagai beban. Pada poin 06 tertulis bahwa jika *lessee* baru jika terjadi perubahan kontrak sewa atau perubahan jangka waktu sewa.

8.3.3 Proses Sewa

Para pihak yang mengadakan perjanjian sewa (*agreement*), atau subyek sewa, terdiri beberapa pihak yang berhubungan, yaitu:

1. *Lessor*
Lessor adalah orang yang menyewakan barang
2. *Lessee*
Lessee adalah penyewa yang menikmati barang

3. Kreditur dan pemberian pinjaman
Kreditur dan pemberi pinjaman disebut pemegang utang atau pemberi pinjaman dalam perjanjian sewa.
4. Pemasok
Pemasok adalah penjual atau pemilik barang.

8.3.4 Keuntungan Serta Kerugian Sewa

Keuntungan dan kerugian leasing bergantung pada keadaan masing-masing badan usaha yang berbeda-beda, mana factor-faktor yang mendukung satu kasus mungkin tidak sesuai di kasus lainnya. Salah satu keuntungan dapat diklarifikasi dengan menjadikan leasing sebagai alternative yang menarik dibandingkan menawarkan modal/biaya (pembiayaan) dalam situasi tertentu. Adapun keuntungan dan kerugian sewa adalah (Syofan, 2002):

Keuntungan lesse:

1. Penyewa terhindar mengeluarkan biaya besar
2. Mengurangi risiko finansial, tanpa adanya hak opsi, barang sewaan dapat dialihkan ke lessor
3. Kesepakatan menjadi fleksibel
4. Membiayai keuangan sangat mudah
5. Tidak bertambahnya hutang ke nerca dan tidak berpengaruh risiko leverage ketika memilih sewa operasi sebagai sewa.

Kerugian penyewa:

1. Penyewa wajib mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh penyewaguna melindungi barang-barangnya.
2. Lessor dapat dapat hilangnya kesempatan untuk mendapatkan profit dari barang tertentu.
3. Sewa khususnya sewa modal, jika penyewa tidak cocok sehingga hanya dalam jangka waktu singkat.
4. Pembiayaan sewa guna usaha yang relative mahal dibandingkan secara kredit investasi bank.

8.3.5 Jurnal

Akuntansi yang diperlukan

Keterangan	<i>Operating Lease</i>		<i>Capital Lease</i>			
Saat Kontrak dan melakukan pembayaran sewa	Beban Sewa	xxx	Aktiva - <i>Lease</i>	xxx		
	Kas	xxx	Utang - <i>Lease</i>	xxx		
			Utang - <i>Lease</i>	xxx		
Akhir Tahun	-		Kas	xxx		
			Beban bunga	xxx		
			Utang bunga	xxx		
Biaya sewa	Beban Sewa	xxx	Beban depresiasi aktiva	xxx		
			Kas	xxx	Akumulasi depresiasi akhir	xxx
					Utang - <i>Lease</i>	xxx
Akhir kontrak	-		Utang bunga	xxx		
			Kas	xxx		
			Akumulasi depresiasi aktiva	xxx		
			Aktiva - <i>Lease</i>	xxx		

DAFTAR PUSTAKA

- Cysco Danny R (2009) *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: CV. Simplex.
- Feldmann (2010) *Pepajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI (2009) *Perntayaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI (2010) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46: Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, I. (2010) *Akuntansi Pepajakan*. LPMB/STIE. Ciledug, Jakarta.
- Mardiasmo (2011) *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi.
- Muljono (2006) *Akuntansi Pajak*. Edisi kedu. Yogyakarta: Andi.
- PSAK, 73 (2017) *SEWA*. Ikatan Aku.
- Soemarso (2009) *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Keli. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2008) *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono (2010) *Akuntansi Pengantar*. Edisi Keti. BPFE: Yogyakarta.
- Syofan, H.S. (2002) *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BAB 9

PENYUSUTAN, PENURUNAN NILAI, SERTA DEPLASI

Oleh Muhammad Fahmi

9.1 Penyusutan

Dalam perhitungan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, pastinya akan memiliki masa manfaat yang terbatas sehingga penilaian kembali atas aktiva di akhir masa manfaatnya menjadi penting untuk menentukan nilai akhir aktiva. Penilaian akhir ini bisa menempatkan aktiva pada asset yang masih bernilai ataupun tanpa nilai sisa. Pengurangan nilai akibat pemakaian atau penggunaan asset dilakukan perhitungan dengan pembebanan secara periodik. Pembebanan ini disebut sebagai penyusutan.

Penyusutan dimaksudkan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Atau bisa dikatakan juga bahwa Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakandalam operasional suatu entitas.

Penyusutan tersebut dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat asset. Mesiki demikian tidak semua assets disusutkan, ada 2 jenis assets yang tidak disusutkan yaitu tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Depresiasi memiliki karakteristik antara lain:

1. Penurunan secara Permanen bertahap dan terus menerus sampai masa akhir penggunaan.
2. Beban terhadap laba atau pendapatan yang diperoleh perusahaan untuk periode akuntansi tertentu.

3. Bukan Kerugian mendadak karena selalu dihitung secara sistematis dan rasional.
4. Termasuk alokasi biaya kadaluarsa dan bukan termasuk penilaian aset tetap.
5. Jumlah nilai aset tetap yang mengalami depresiasi tidak dapat dihitung secara pasti dan hanya dapat diperkirakan.
6. Disebabkan adanya faktor fisik dan fungsional pada aset tetap
7. Untuk mempertahankan modal nominal investasi dalam aset tetap dan untuk mengalokasikan bagian biaya aset tetap yang kadaluarsa selama beberapa periode akuntansi.
8. Tidak Terhindarkan, walaupun asset dirawat ataupun tidak pernah dipergunakan sama sekali.
9. Tidak terpengaruh adanya fluktuasi pada nilai pasar
10. Berlaku hanya pada seperti pabrik, mesin, perabotan, atau aset lainnya.
11. Nilainya tidak lebih dari nilai yang dapat disusutkan atau biaya awal dimana nilai sisa yaitu nihil.

Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam perhitungan penyusutan yaitu:

1. Biaya Perolehan (*Acquisition Cost*)
Biaya perolehan adalah harga dasar perhitungan besar-kecilnya nilai penyusutan yang dialokasikan untuk suatu periode tertentu. Ini merupakan faktor utama yang menentukan nilai penyusutan dari aset tetap.
2. Perkiraan Umur Ekonomis (*Estimate Economical Lifetime of Asset*)
Faktor berikutnya setelah kita mengetahui biaya perolehan adalah perkiraan umur ekonomis dari aktiva atau aset tetap. Faktor perkiraan umur ekonomis diukur dengan perkiraan terhadap durasi sebuah aset dapat digunakan oleh perusahaan.
3. Perkiraan Nilai Residu (*Estimated Residual Value of Asset*)
Faktor terakhir yang menentukan nilai depresiasi adalah perkiraan nilai residu aset. Nilai residu merupakan nilai yang dapat direalisasikan ketika suatu aset dijual kembali atau tidak dipergunakan kembali. Nilai ini juga dihitung

berdasarkan nilai sisa aset dari hasil penjualan, hasil sewa, maupun hasil yang diputarakan sesuai cara pemeliharaan dan kebijakan bisnis.

Metode Penyusutan

Dalam perhitungan penyusutan diketahui terdapat beberapa metode antara lain

1. Garis Lurus (Straight Line Method)

Metode ini adalah salah satu metode yang paling sederhana. Perhitungannya dilakukan dengan cara membagi selisih antara nilai aset awal dan nilai sisa dengan masa manfaat aset tersebut. Perhitungan metode ini dirumuskan:

$$\text{Penyusutan pertahun} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Contoh soal:

Sebuah mobil dibeli perusahaan untuk kegiatan operasional senilai Rp. 250.000.000. diperkirakan umur ekonomisnya selama 5 tahun. Dan diakhir masa ekonomisnya diperkirakan nilai assets tersebut adalah Rp. 50.000.000. sehingga penyusutan pertahun dihitung:

$$\frac{\text{Rp. 250.000.000} - \text{Rp. 50.000.000}}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 40.000.000}$$

2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Depreciation*)

Metode saldo menurun adalah metode yang paling umum digunakan. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan persentase depresiasi tetap dari saldo aset yang tersisa setiap tahun. Metode ini sering digunakan jika aset diharapkan untuk kehilangan nilai lebih banyak di tahun-tahun awal. Perhitungannya dirumuskan dalam:

$$\text{Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal} \times \text{Tingkat Penyusutan}$$

Contoh soal :

Sebuah mobil dibeli perusahaan untuk kegiatan operasional senilai Rp. 250.000.000. diperkirakan umur ekonomisnya selama 5 tahun. Sehingga depresiasi pertahun dihitung :

Prosentase penyusutan $100\% : 5 \text{ tahun} = 20\%$

Penyusutan tahun 1 = $\text{Rp. } 250.000.000 \times 20\% = \text{Rp. } 50.000.000$

Penyusutan tahun 2 = $\text{Rp } 200.000.000$ (Nilai awal-akm. Peny) $\times 20\% = \text{Rp } 40.000.000$

Penyusutan tahun berikutnya....

3. Metode Aktivitas

Metode aktivitas merupakan cara menghitung nilai penyusutan suatu aset berdasarkan pemanfaatan dari aset terkait. Dengan kata lain, metode depresiasi ini dihitung berdasarkan seberapa produktif aset milik perusahaan. Terdapat 2 (dua) metode depresiasi dengan metode aktivitas yaitu:

a. Metode Jam Jasa

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva tetap akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya. Dalam cara ini beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan jam kerja. Beban depresiasi periodik besarnya akan sangat tergantung pada jam jasa yang dipakai. Rumus:

$$\text{Penyusutan per jam} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{taksiran jam kerja}}$$

Contoh soal:

PT. Sinar memiliki mesin senilai Rp. 500.000.000 di tahun 2019, yang ditaksir memiliki manfaat selama 10 tahun. Nilai sisa mesin sebesar Rp. 100.000.000 dan memiliki jam kerja sebanyak 25.000 jam

$$\begin{aligned} \text{Maka depresiasi perjam} &= \frac{\text{Rp. } 500.000.000 - \text{Rp. } 100.000.000}{25.000 \text{ jam}} \\ &= \text{Rp. } 16.000 / \text{jam} \end{aligned}$$

Untuk menghitung penyusutan per periode, maka penyusutan perjam di kalikan dengan jumlah jam kerja yang terpakai di periode tersebut.

b. Metode unit Produksi

Dalam metode ini umur kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga penyusutan tiap periode akan berfluktuasi dalam hasil produksi.

$$\text{Penyusutan per unit} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Total Unit}} \\ \text{Produksi}$$

Contoh soal:

PT. Sinar memiliki mesin senilai Rp. 500.000.000 di tahun 2019, yang ditaksir memiliki manfaat selama 10 tahun. Nilai sisa mesin sebesar Rp. 100.000.000 dan memiliki kapasitas produksi sebanyak 100.000 unit.

$$\text{Maka depresiasi per unit di hitung} \\ (\text{Rp. } 500.000.000 - \text{Rp. } 100.000.000) \\ 100.000 \text{ unit} \\ = \text{Rp. } 4.000 / \text{unit}$$

Untuk menghitung penyusutan per periode, maka penyusutan perjam di kalikan dengan jumlah unit kerja yang terpakai di periode tersebut.

9.2 Penurunan Nilai

PSAK 48 menyatakan, bahwa pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Secara periodik perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai (*test*

of impairment). Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir *recoverable amount* dari aset tersebut.

Indikasi Penurunan Nilai dipengaruhi oleh adanya 2 (dua) informasi yang berasal dari:

1. Internal (dalam) Perusahaan
 - a. Keusangan/ kerusakan †
 - b. Perubahan signifikan dengan cara penggunaan aset †
 - c. Kinerja ekonomi aset memburuk †
 - d. Untuk suatu investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas yang disajikan dalam laporan keuangan terpisah berdasarkan metoda biaya, investor mengakui dividen dari investasi dan terdapat bukti bahwa dividen melebihi total laba komprehensif entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama dalam periode dividen diumumkan

2. Eksternal (luar) Perusahaan
 - a. Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi pemakaian normal. †
 - b. Selama periode tertentu telah/akan terjadi perubahan memburuk dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi, hukum, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut †
 - c. Selama periode tertentu, suku bunga pasar dari investasi telah meningkat sehingga akan menurunkan *recoverable amount* dari aset secara material †
 - d. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya

PSAK 48 juga menyebutkan bahwa suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai apabila nilai sisa buku yang tercatat melebihi nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Istilah nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) dalam PSAK 48 merujuk pada nilai manakah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan aset dengan nilai pakainya. Apabila salah satu dari nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya

pelepasan dengan nilai pakainya masih lebih dari nilai sisa buku yang tercatat, maka aset tersebut tidak mengalami penurunan nilai aset.

Secara sederhana rumus penurunan nilai sebagai berikut:

$$\text{Penurunan Nilai Aset} = \text{Nilai Sisa Buku} - \text{Recoverable Amount (RA)}$$

Adapun kerugian atas penurunan nilai aset dicatat menambah depresiasi aset sehingga nilai suatu aset akan berubah secara permanen. Contoh perhitungan penurunan nilai

PT. Aman Transportation sebagai perusahaan distribusi minyak solar non subsidi, memiliki aset untuk kepentingan transporter senilai Rp. 1 Milyar yang dibeli pada tahun 2021. Di tahun 2022, melakukan evaluasi kepada 4 truk pengangkut solar dengan dengan nilai pakai aktiva sebesar Rp. 920.000.000 dan biaya penjualan senilai Rp. 150.000.000 maka yang harus di hitung:

1. Nilai Recoverable Amount (RA)
 $\text{Rp. 1.000.000.000} - \text{Rp. 150.000.000} = \text{Rp. 850.000.000}$
Nilai Sisa buku = nilai pakai aktiva
2. Penurunan Nilai
 $\text{Rp. 920.000.000} - \text{Rp.850.000.000} = \text{Rp. 70.000.000}$
Maka penurunan nilai aktivatersebut adalah Rp. 70.000.000

9.3 Deplesi

Istilah deplesi merupakan istilah akuntansi untuk menggambarkan penyusutan yang dilakukan pada aktiva yang berkaitan dengan sumber daya alam. Deplesi juga dikatakan sebagai suatu perhitungan atau penafsiran penyusutan nilai perolehan dari setiap sumber daya alam yang kemudian dijadikan sebagai persediaan sebuah perusahaan.

Deplesi juga disebut sebagai suatu kegiatan perhitungan atas penyusutan nilai suatu aktiva tetap. Aktiva tetap untuk perhitungan nilai deplesi yang dimaksud disini merupakan aktiva atau aset yang berwujud yang memiliki bentuk fisik seperti bijih besi, kayu hutan, dan lain sebagainya. Adanya penyusutan atau pengurangan aktiva tetap akibat proses produksi yang mengurangi persediaan setiap sumber daya alam.

Proses penyusutan ini terjadi secara alami dan bisa dihitung di periode tertentu.

Perhitungan deplesi bertujuan untuk:

1. Mengetahui berapa total sumber daya yang masih ada setelah adanya proses dari pemanfaatan atau penggunaan
2. Mengantisipasi kemungkinan akan langkanya sumber daya sehingga menimbulkan proses produksi yang terhambat
3. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersisa
4. Menjadi bahan pertimbangan untuk merencanakan pengembangan perusahaan di masa depan

Beberapa faktor dalam penentuan nilai deplesi antara lain:

1. Akuisisi, yaitu biaya yang terkait dengan pembelian atau penyewaan hak milik atas tanah yang oleh perusahaan diyakini memiliki sumber daya alam.
2. Eksplorasi, yaitu biaya yang terkait penjelajahan sumber daya alam. Misalnya, penggalian bawah tanah yang disewa atau dibeli.
3. Pengembangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk persiapan lahan yang bertujuan untuk kebutuhan pengolahan sumber daya alam. Seperti, pembuatan sumur atau terowongan.
4. Restorasi, yaitu biaya yang terkait dengan pemulihan sumber daya untuk kembali ke kondisi semula

Dalam perhitungan **deplesi yang merupakan** jenis metode yang dinilai tidak terlalu mudah untuk dilakukan, apalagi bila nilainya memang cukup besar. **sehi** Masalah yang bisa terjadi dalam perhitungan deplesi antara lain:

1. Pemulihan atas estimasi cadangan baik pada umur manfaat peralatan yang dipakai oleh pabrik. Pemulihan dilakukan dengan merevisitingkat deplesi atas dasar perspektif dengan membagi nilai biaya yang tersisa dengan estimasi baru pada cadangan yang bisa dipulihkan
2. Nilai Penemuan atau nilai area atas sumber daya bisa diubah menjadi akun biasa
3. Adanya penilaian pajak dari sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan sumber mineral lainnya yaitu sebesar

- 5 - 22% dari nilai pendapatan yang diterima. Nilai tersebut bisa menjadi nol (0), tetapi pengurangan terhadap nilai deplesi tetap dilaksanakan.
4. Likuidasi akan nilai deviden pemegang saham akan dilakukan apabila perusahaan tidak melakukan pembelian terhadap property tambahan, dan diganti dengan pengembalian investasi dana ke investor dari jumlah akumulasi laba bersih. Namun masalahnya pencatatan akuntansi sulit membedakan antara deviden pengembalian modal atau lain, karena deviden likuiditas di debit pada agio saham, bukan pada akun laba di tahan

Contoh perhitungan deplesi;

Misalnya sumber daya yang dimiliki perusahaan ABC berupa batubara yang diolah dalam proyek pertambangan dengan informasi keuangan sebagai berikut:

Nilai sisa/residu (residual value) Rp. 200.000.000

Biaya perolehan (cost of acquisition) Rp. 2.000.000.000

Masa manfaat (useful life) = 10 tahun

Jumlah unit / jam produksi = 50.000 jam pertahun

Dengan informasi diatas maka nilai deplesi yang perusahaan hitung adalah:

1. Menentukan laju deplesi per unit

$$\text{Tingkat deplesi per unit} = \frac{\text{Biaya perolehan} - \text{nilai residual}}{\text{Jumlah unit atau jam produksi.}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 2.000.000.000} - \text{Rp. 200.000.000}}{50.000 \text{ jam pertahun}}$$

$$= \text{Rp. 36.000 per jam}$$

2. Menentukan nilai deplesi

$$\text{Deplesi} = \text{Tingkat deplesi per unit} \times \text{jumlah unit atau jam produksi pada tahun tertentu}$$

$$\text{Deplesi} = \text{Rp. 36.000} \times \text{Rp. 50.000} \times 10 \text{ tahun}$$

Maka nilai deplesi batu bara menjadi Rp. 1.800.000

Dalam pencatatan, umumnya, hasil perhitungan penyusutan dengan metode deplesi akan muncul pada neraca di

sisi aset dan secara otomatis mengurangi nilai aktiva. Beberapa perusahaan biasanya akan membagi dividen sejumlah laba bersih yang ditambah dengan deplesi. Jadi, kerugian yang bisa saja terjadi akibat sumber daya alam yang habis dapat dicegah. Terdapat cara melakukan koreksi terhadap deplesi supaya kerugian yang berasal dari faktor lain yang tidak bisa dihindari antara lain:

1. Deplesi pada tahun lalu dan masa depan sudah dicatat dan diperbaiki. Pada saat terjadi perubahan, deplesi per unit perlu dihitung ulang untuk diperbaiki.
2. Deplesi tahun lalu tercatat salah, namun keletihan tahun depan dilakukan dengan data terbaru. Deplesi tahun lalu belum diperbaiki, tetapi deplesi untuk tahun ini dan tahun mendatang telah direvisi lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki.* 2011. *Intermediate Accounting*, Edisi 8. Yogyakarta:BPFE. Yogyakarta
- Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Harahap, Sofyan Syafri,* 2004, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. SAK EMKM. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kieso, Weygandt, & Warfield.* 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah. Intermediate Accounting (Vol. 1)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Martini, Dwi., Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Subramanyam, K.R., John J. Wild. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

BAB 10

PENILAIAN PERSEDIAAN DAN PENILAIAN TAMBAHAN

Oleh Rizal Zaelani

10.1 Penilaian Persediaan

Persediaan akhir, biaya produksi, dan biaya penjualan dihitung melalui penilaian persediaan. Perusahaan menggunakan pendekatan perpetual atau periodik untuk mencatat nilai inventaris. Dalam metode periodik, perusahaan harus mencatat biaya persediaan untuk setiap ada transaksi yang mengubah persediaan. Transaksi tersebut melibatkan penggunaan, pembelian dan penjualan dari persediaan. Metode periodik mencatat biaya persediaan hanya pada akhir periode tertentu, yaitu pada saat pelaporan keuangan. Pendekatan perpetual tidak melakukannya. Bisa dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan.

Perusahaan melakukan opname stok secara teratur. Hitung, ukur atau timbang jumlah stok setiap jenis sesuai kebutuhan karakteristiknya, biasanya adalah tugas yang dilakukan selama pengumpulan stok.

Perusahaan harus mencatat biaya khusus untuk setiap jenis persediaan ketika mereka menghitung biaya inventory, seperti persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Metode pengenalan khusus untuk setiap jenis inventaris ini disebut metode pengenalan khusus.

Untuk beberapa bisnis, menerapkan metode ini ternyata sulit. Karena itu, perusahaan harus selalu mencatat berapa banyak unit yang berubah dan biaya semua pembelian, pembuatan, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan.

Di era digital, sangat mudah untuk mencatat setiap perubahan persediaan. Teknologi seperti kode bar, kode RFID (*radio frequency identification*), dan kode produk elektronik

Sangat berguna untuk proses inventarisasi, yang memungkinkan penggunaan metode identifikasi tertentu.

Produk-produk berharga, seperti karya seni, piano, mobil mewah, dan sebagainya, dapat diidentifikasi dengan benar dengan menggunakan teknik identifikasi khusus.

Tidak hanya tata cara identifikasi spesial, perseroan pula bisa memakai asumsi aliran biaya untuk menghitung biaya inventaris.

Metode *First- in, First- out* (FIFO) itu mengasumsikan kalau benda yang akan dijual merupakan benda yang awal kali yg dibeli. Tata cara FIFO sejalan dengan aliran wujud benda. Perusahaan biasanya menjual produk lama atau pertama kali masuk.

Produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya yang memiliki tenggat kedaluwarsa biasanya selalu menggunakan FIFO. Dengan sistem FIFO, harga produk pada awalnya dibeli dan diakui sebagai dari harga pokok penjualan. Penting untuk diingat bahwa ketika Anda menggunakan asumsi aliran biaya untuk menghitung beban pokok penjualan, itu cumalah anggapan, bukan unit benda yang dijual secara wujud dari metode FIFO. Ini karena unit dari barang yang akan dijual mungkin tidak sama dengan model FIFO.

Metode rata-rata (*average cost method*)

Metode ini menggambarkan bahwa beban dari penjualan diakui produk berdasarkan pada biaya tertimbang rata-rata, juga dikenal sebagai biaya tertimbang rata-rata.

***Last-in, last-out* (LIFO)**

Menurut sistem ini, melihat harga pokok penjualan suatu produk dihitung berdasarkan produk yang dibeli sebelumnya. Namun, untuk beberapa komoditas produk seperti beras, batu bara, dan barang yang disimpan pada tumpukan stok, metode LIFO secara fisik diterapkan pada aliran pembelian dan penjualan barang.

Kemudian, setelah mengetahui nilai inventaris, beban penjualan utama dihitung: ***Cost of goods sold = Beginning inventory + Purchasing - Ending Inventory.***

Dalam membandingkan ketiga pendekatan untuk menghitung biaya inventaris, beberapa catatan penting dapat ditemukan:

1. Nilai produk yang tersedia untuk dibeli dihasilkan oleh ketiga pendekatan. (*cost of goods available for sale*).
2. Ketiga pendekatan menghasilkan nilai yang berbeda untuk beban pokok dari penjualan dan nilai persediaan akhir.
 - a. Dalam situasi inflasi, pada saat harga dari barang cenderung untuk meningkat: : (a) FIFO dapat menghasilkan perolehan laba bersih yang lebih tinggi karena harga pokok dari penjualan lebih rendah dan harga dari barang pertama yang dibeli akan lebih rendah jika dibandingkan harga barang yang terakhir dibeli. (b) Karena beban pokok penjualan yang besar, LIFO menghasilkan laba bersih yang lebih kecil.
 - b. Sebaliknya, dalam situasi deflasi, ketika Harga komoditas akan turun. FIFO bias menghasilkan laba bersih yang lebih rendah, sedangkan system LIFO akan menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi.
3. Metode biaya rata-rata menghasilkan perolehan laba bersih yang cukup besar dari laba bersih antara FIFO dan LIFO tanpa memperhitungkan inflasi atau deflasi.

Analisis persediaan

Pengelolaan stok sangat penting bagi perusahaan. Modal kerja akan dibutuhkan oleh stok yang berlebihan. Selain itu, persediaan membutuhkan gudang, asuransi, dan pemeliharaan. Kelancaran dalam proses produksi atau pemenuhan permintaan penjualan dipengaruhi oleh kurangnya persediaan. Akibatnya, perusahaan harus mengelola persediaan dengan baik.

Untuk mengetahui seberapa efektif manajemen inventaris, analisis rasio keuangan diperlukan.

1. *Inventory turnover*

Hasil dari membagi beban pokok penjualan dengan nilai Inventori rata-rata adalah rasio itu. Likuiditas persediaan ditentukan oleh tingkat turnover inventaris, yang menunjukkan seberapa cepat inventaris dijual dalam satu tahun. Tingkat likuiditas persediaan sebanding dengan tingkat turnover inventaris. Metode penghitungan, ***Inventory turnover = Cost of goods sold ÷ Average inventory.***

2. *Days in inventory*

Untuk mendapatkan rasio ini, kita harus membagi dari jumlah 365 hari dengan perolehan turnover inventaris. Hasil laporan ini menunjukkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan inventaris Anda untuk terjual. Metode penghitungan ini dikenal, ***Days in inventory = 365 ÷ Inventory turnover.***

Tingkat inventory stock yang rendah sehubungan dengan beban pokok penjualan ditunjukkan oleh hasil turnover inventory yang tinggi dan hari inventory yang rendah. Sistem just-in-time dapat mencapai persediaan yang rendah.

JIT production atau JIT purchasing hanya dapat melakukan produksi atau pembelian barang pada saat yang dibutuhkan. Sistem just-in-time membutuhkan beberapa kondisi dan persyaratan. (Datar dan Rajan, 2021).

Pertama, Kegiatan rantai dari pasokan direncanakan, diatur, dan dikendalikan dengan benar. **Kedua**, Inventaris Terkelola Vendor (VMI), tempat pemasok dan produsen berbagi suatu informasi melalui perencanaan, koordinasi, dan pertukaran informasi, digunakan untuk mengurangi dari ketidakpastian dalam suatu penjualan, pada tingkat inventaris, dan perkiraan penjualan.

Ketiga, Sistem manufaktur menggunakan bagian sel manufaktur untuk mengurangi biaya penanganan material tersebut. **Keempat**, Kami melatih karyawan kami untuk

meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka dapat melakukan berbagai tugas dengan berbagai keterampilan, seperti pemeliharaan dan perawatan ringan. **Kelima**, Pilihlah supplier yang dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan material Anda.

10.2 Penilaian Tambahan

10.2.1 Nilai Realisasi Lebih Rendah Biaya atau Bersih / *LOWER-OF-COST-OR-NET REALIZABLE VALUE (LCNRV)*

Persediaan akan dicatat sebesar biaya pembelian, namun bila nilai persediaan menyusut di dasar bayaran awalnya, maka prinsip biaya historis tidak dapat digunakan. Pada prinsipnya, bayaran historis tidak bisa digunakan bila utilitas masa depan dari pada aktiva tersebut tidak lagi menggambarkan sebesar pengeluaran perolehannya tersebut. Oleh karena itu, persediaan untuk setiap periode pelaporan dicatat berdasarkan dari biaya atau nilai dari pasar (MQM) yang bisa lebih rendah.

Harga perolehan, juga dikenal sebagai harga pokok, dihitung dengan menggunakan metode yg berdasarkan biaya historis, identifikasi aktual, biaya rata-rata maupun FIFO. Istilah pasar, "yang lebih rendah antara biaya atau nilai pasar", menunjukkan bahwa nilai barang sebaiknya dinilai juga berdasarkan biaya awal maupun biaya penggantian. Alasan dari biaya penggantian digunakan untuk menunjukkan nilai pasar umumnya adalah untuk mengurangi biaya penggantian suatu barang mengurangi laba kotor penjualan yang konsisten, yang merupakan keuntungan tambahan.

Nilai realisasi bersih (NRV) adalah aturan umum untuk persediaan LCM: Harga terendah antara biaya dan harga pasar akan digunakan dan harga pasar akan dibatasi pada jumlah yang tidak melebihi harga tersebut margin laba normal. Nilai realisasi bersih (NRV) dihitung dengan mengurangi perkiraan yang dapat diandalkan tentang biaya penyelesaian dan penjualan.

Nilai realisasi bersih persediaan disebut plafon, dan nilai realisasi bersih persediaan disebut lantai. Tujuan kedua batas nilai inventaris adalah untuk menghindari laporan inventaris dengan nilai yang bias lebih tinggi maupun lebih rendah

daripada batas atas atau plafon. Jika batas maksimum melebihi nilai realisasi bersih atau dasar, persediaan yang lebih besar akan digunakan atau rusak.

Namun, batas bawah atau minimum tidak boleh lebih besar Untuk menghitung marjin laba wajar, penyisihan diambil dari nilai realisasi bersih.

Metode Pengaplikasian LCM

Bila pendekatan jenis serta persediaan total yang utama digunakan buat mempraktikkan ketentuan LCM, asumsinya, ketentuan terendah antara harga pasar dan bayaran (LCM) diterapkan pada tiap tipe produk, jenis ataupun total persediaan. Peningkatan harga pasar barang lain umumnya mengimbangi penyusutan harga pasar barang lain.

	Cost	Designated Market	Lower-of-Cost-or-Market By:		
			Individual Items	Major Categories	Total Inventory
Frozen					
Spinach	\$ 80,000	\$104,000	\$ 80,000		
Carrots	100,000	90,000	90,000		
Cut beans	50,000	40,000	40,000		
Total frozen	230,000	234,000		\$230,000	
Canned					
Peas	90,000	48,000	48,000		
Mixed vegetables	95,000	92,000	92,000		
Total canned	185,000	140,000		140,000	
Total	\$415,000	\$374,000	\$350,000	\$370,000	\$374,000

Jika ketentuan LCM diterapkan pada setiap item, nilai totalnya harus \$350.000, nilai jenis utamanya harus \$370.000, dan nilai totalnya harus \$347.000. Perbandingan ini disebabkan oleh fakta bahwa, jika metode jenis utama atau total persediaan digunakan, nilai pasar yang lebih besar dari pembayaran akan mengimbangi nilai pasar yang bisa lebih rendah dari pembayaran.

Karena dianggap paling konservatif untuk tujuan penyajian neraca, metode barang per barang biasanya digunakan. Namun, untuk persediaan akhir, metode persediaan total dan kategori utama berbeda. Dalam kasus di mana persediaan akhir terdiri dari satu jenis barang, prosedur

persediaan total adalah yang tepat; dalam kasus lain, metode kategori utama digunakan. Proses harus menunjukkan manfaat yang lebih jelas. Metode apa pun yang digunakan harus diterapkan secara konsisten sepanjang waktu.

Pencatatan Harga Pasar dan Bukan Biaya

Karena metode kedua merupakan metode tidak langsung, maupun penyisihan, kerugian itu dimasukkan kedalam harga pokok penjualan saat menilai persediaan. Sebaliknya, metode langsung menggantikan biaya dengan harga pasar bisa lebih rendah. Akibatnya, laporan laba rugi tidak menunjukkan kerugian apa pun. Terlepas dari kenyataan bahwa metode ini tidak bisa mengubah jumlah biaya, Metode ini menghasilkan akun kerugian, yang digunakan untuk mencatat penghapusan dan kontra-aktiva.

Ending inventory (cost)	\$ 415,000	
Ending inventory (LCM)	<u>350,000</u>	—————
Adjustment to LCM	\$ 65,000	—————

Allowance Method	Loss on inventory	65,000
	Allowance on inventory	65,000

Direct Method	Cost of goods sold	65,000
	Inventory	65,000

Salah satu keuntungan dari menentukan Kerugian persediaan yang disebabkan oleh penurunan harga pasar yaitu bahwa ditunjukkan pada laporan laba rugi secara terpisah dari harga pokok dari penjualan, sehingga harga pokok penjualan tahunan tetap sama.

Meskipun menggunakan akun dari penyisihan sangat memungkinkan neraca untuk mengungkapkan nilai persediaan pada biaya tersebut dan LCM, ada masalah bagaimana cara

menghilangkan saldo dari akun tersebut yang baru dibuat pada periode selanjutnya. Akun penyisihan harus dipertahankan jika barang dagangan yang bersangkutan masih ada di tangan; jika tidak, maka persediaan awal dan harga pokok penjualan tersebut akan lebih saji. Namun, akun penyisihan harus ditutup jika barang dagangan tersebut telah terjual. Oleh karena itu, untuk setiap penurunan nilai inventaris selama satu tahun, akun penyisihan baru harus dibuat. Kerugian dicatat jika harga turun; jika harga naik, kerugian tahun dari sebelumnya telah dipulihkan, dan keuntungan yang dihasilkan dari hasil pemulihan kerugian tersebut dicatat.

Evaluasi atas Aturan LCM

Kelemahan aturan LCM meliputi:

1. Penyusutan aset tidak diakui sebagai beban selama periode penjualan. Sebaliknya, kenaikan nilai aset tidak dicatat sampai aset tersebut dijual. Perilaku ini tidak secara konsisten dan dapat bias menyebabkan data pendapatan Anda bervariasi.
2. Karena inventaris perusahaan bisa dinilai berdasarkan biaya dalam satu periode tersebut dan harga pasar tersebut dalam periode berikutnya, aturan LCM menyebabkan ketidakkonsistenan.
3. LCM secara konservatif menilai inventaris dalam neraca, tetapi akan berdampak terhadap laporan laba rugi juga mungkin secara konservatif. Ketika kerugian diakui, laba bersih tahun berjalan jelas akan lebih rendah. Jika penurunan harga jual tidak material, laba bersih pada periode berikutnya mungkin akan lebih tinggi dari yang biasa.
4. Nilai persediaan dihitung dengan menggunakan laba normal dalam aplikasi aturan LCM. Ini karena hasil laba normal adalah angka perkiraan yang didasarkan dari pengalaman sebelumnya, sehingga tidak objektif dan memungkinkan manipulasi laba.

Aturan LCM biasanya menghasilkan laba yang lebih rendah bagi banyak pengguna laporan keuangan karena

mengakui semua kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan.

10.2.2 Dasar Penilaian

Persediaan umumnya dicatat pada biayanya ataupun bagi berdasarkan ketentuan LCM. Tetapi harga dari pasar wajib senantiasa didefinisikan selaku nilai yg realisasi bersih (harga jual yg dikurangi maupun ditaksir bayaran penyelesaian serta penjualan), bukan bayaran pengganti yang dimaksudkan oleh ketentuan LCM.

Untuk persediaan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, IFRS menetapkan pengukuran nilai realisasi bersih. Aktivitas ini biasanya dibagi menjadi dua kategori: aset biologi dan hasil panen. Aset biologi terdiri dari hewan serta tanaman yang bisa dimanfaatkan hasilnya dan dapat digunakan sebagai aset jangka panjang. Namun, susu, bulu, dan daging adalah hasil panen atau dubidaya. Berikut adalah transaksi akuntansi yang dilakukan oleh keduanya:

1. Nilai aset biologi dihitung pada pengakuan awal dan dihitung sebagai nilai wajarnya dikurangi nilai realisasi bersihnya pada akhir periode. Dengan demikian, perusahaan dapat mencatat keuntungan ataupun kerugian selaku akibat dari transformasi pada nilai realisasi bersih.
2. Nilai wajar hasil panen dikurangi dari nilai realisasi bersihnya, dan setelah panen, nilai realisasi hasil panen dikurangi biayanya. Persediaan lainnya dicatat sebagai satu aset.

Milking Cows

Carrying value, January 1	460,000
Change in fair value due growth & price change	35,000
Decrease in fair value due to harvest	(1,200)
Change in carrying value	33,800
Carrying value, January 31	493,800
Milk harvested during January	36,000

1. Pencatatan Carrying Value		
Biological Asset-Milking Cows	33,800	
Unrealized Holding Gain or Loss		33,800
2. Pencatatan Hasil Panen Selama Periode		
Milk Inventory		36,000
Unrealized Holding Gain or Loss		36,000
3. Pencatatan Penjualan Produk Jadi		
Cash	38,500	
Cost of Good Sold	36,000	
Milk Inventory		36,000
Sales		38,500

Penilaian dengan Menggunakan Nilai Penjualan Relatif

Kala beberapa unit yang berbeda dibeli dengan perolehan harga lump sum ataupun pada saat pembelian basket berlangsung yang tidak bisa dipisah dengan kelompok persediaan yang ada, muncul masalah. Dalam hal ini, cara terbaik untuk membagi biaya total persediaan di antara berbagai unit berdasarkan nilai penjualan relatifnya.

Group	No. of Lots	Price per Lot	Selling Price	Relative Sales Price	Total Cost	Cost Allocated	Cost Per Lot
1	9	\$ 3,000	\$ 27,000	\$27,000/127,800	\$89,460	\$18,900	\$ 2,100
2	15	4,000	60,000	60,000/127,800	89,460	42,000	2,800
3	17	2,400	40,800	40,000/127,800	89,460	28,560	1,680
			<u>\$127,800</u>			<u>\$89,460</u>	

Group	Lots Sold	Price per Lot	Total Sales	Cost Per Lot	Total Cost of Goods	Calculation of Net Income	
1	4	\$ 3,000	\$12,000	\$ 2,100	\$ 8,400	Sales	\$80,000
2	8	4,000	32,000	2,800	22,400	Cost of good sold	56,000
3	15	2,400	36,000	1,680	25,200	Gross profit	24,000
			<u>\$80,000</u>		<u>\$56,000</u>	Expenses	18,200
						Net income	<u>\$ 5,800</u>

Komitmen Pembelian Satu Masalah Khusus

Sangat wajar apabila dalam dunia bisnis untuk berkomitmen untuk membeli barang dengan pembayaran di muka karena kelangsungan hidup serta keuntungan perseroan

tergantung pada ketersediaan stok benda dagangan yang layak buat penuh seluruh permintaan pelanggan. Pembeli tidak akan menerima hak atas benda dagang maupun bahan baku tersebut yang terikat dengan komitmen dalam pembelian ini.

Apabila harga kontrak melebihi dari harga pasar, serta kerugian yang diperkirakan hendak berlangsung pada disaat pembelian bisa dilaksanakan, sehingga kerugian tersebut mesti diakui sepanjang periode penyusutan harga pasar. Kerugian dari kepemilikan yang belum terjalin hendak disajikan dalam laporan kerugian tersebut pada kelompok beban, bersama dengan kerugian yang lain Ditaksir kewajiban dari komitmen pembelian hendak dilaporkan pada kelompok kewajiban, sehingga tercermin pada neraca sebab kontrak hendak dilaksanakan untuk tahun fiskal selanjutnya

Dengan membeli kontrak futures untuk menjual barang serupa dalam jumlah yang sama pada harga tetap di masa mendatang, pihak pembeli dalam Komitmen pembelian dapat melindungi mereka dari kemungkinan harga pasar barang yang bersangkutan kontrak akan turun. Ini dikenal sebagai pembendungan Dalam kasus di mana Sebuah perusahaan memiliki posisi beli untuk komoditas yang sama dalam kontrak futures dan posisi jual untuk komitmen pembelian. Keuntungan dari satu kontrak akan mengimbangi kerugian pada kontrak itu.

10.2.3 Metode Laba Kotor Untuk Mengestimasi Persediaan

Memastikan bahwa catatan tentang inventaris tetap ada adalah tujuan utama dari perhitungan fisik inventaris adalah akurat dan untuk mengetahui jumlah persediaan jika tidak ada. Metode laba kotor adalah salah satu teknik yang tersedia untuk memperkirakan persediaan. Metode ini didasarkan pada tiga kemungkinan :

1. Total barang yang diperhitungkan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian.
2. Barang yang belum terjual harus tersedia
3. Biaya penjualan dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian disebut persediaan akhir.

Perhitungan Persentase Laba Kotor

Persentase dari laba kotor bisa disajikan sebagai persentase dari harga jual. Metode umum untuk menghitung laba kotor atas harga jual karena sebagian besar produk dinyatakan sebagai harga jual daripada biaya; laba berdasarkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang dihitung atas harga jual, dan konsumen yang lebih baik. Selain itu, Tidak pernah ada ketika laba kotor atas harga jual melebihi 100%.

Untuk menunjukkan laba kotor dan persentase markup, penjual menggunakan rumus berikut :

1.
$$\text{Laba kotor atas harga jual} = \frac{\text{Persentase markup atas biaya}}{100\% + \text{Persentase markup atas biaya}}$$
2.
$$\text{Persentase markup atas biaya} = \frac{\text{Laba kotor atas harga jual}}{100\% - \text{laba kotor atas harga jual}}$$

Inventory, May 1 (at cost)		\$ 160,000
Purchases (gross) (at cost)		640,000
Purchase discounts		(12,000)
Freight-in		30,000
Goods available (at cost)		<u>818,000</u>
Sales (at selling price)	\$ 1,000,000	
Sales returns (at selling price)	(70,000)	
Net sales (at selling price)	<u>930,000</u>	
Less gross profit (30% of \$930,000)	279,000	
Sales (at cost)		<u>651,000</u>
Approximate inventory, May 31 (at cost)		<u><u>\$ 167,000</u></u>

Metode laba kotor memiliki kelemahan bahwa itu menghasilkan perkiraan. Akibatnya, setiap tahun diperlukan perhitungan persediaan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan yang tersedia secara akurat. Selain itu, metode laba kotor menggunakan markup dengan persentase masa lalu. Persentase masa lalu seringkali dapat menawarkan solusi untuk masalah yang akan datang, tetapi persentase masa kini pasti lebih akurat. Terakhir, berhati-hatilah saat menggunakan persentase laba kotor.

10.2.4 Metode Persediaan Eceran

Semua barang yang dibeli, barang yang siap dijual, dan biaya dan nilai eceran dicatat sesuai dengan metode persediaan eceran. Nilai eceran produk yang tersedia dikurangi dari penjualan selama periode berjalan untuk mendapatkan estimasi persediaan barang di tangan pada eceran. Persediaan akhir pada biaya diubah dari harga eceran dengan menggunakan rasio biaya terhadap harga eceran. Salah satu metode persediaan eceran adalah metode konvensional terendah antara harga pasar dan metode biaya.

Terlepas dari kenyataan bahwa pembatalan markup merupakan penurunan harga barang dagang yang telah dimarkup atas harga eceran awal, istilah markup bagi peritel berarti tambahan atas harga eceran awal. Peritel sering harus menggunakan markdown, penurunan harga jual awal, dalam pasar kompetitif. Ketika markdown diimbangi oleh kenaikan harga barang sebelumnya di markdown, ini disebut pembatalan markdown. Sebaliknya, penurunan harga umum, penjualan khusus, kerusakan produk, kelebihan stok, dan persaingan dapat menyebabkan markdown meningkat terhadap harga jual. Tidak boleh membatalkan markup atau markdown lebih dari markup maupun markdown pada awal.

Pos-pos Khusus yang Berhubungan dengan Metode Eceran

1. Biaya pengangkutan dimasukkan dalam harga pembelian;
2. Retur pembelian, yang berarti harga eceran dan biaya dikurangi;
3. Diskon dan pengurangan harga, yang merupakan pengurangan biaya pembelian;

Menghitung biaya produk tersedia untuk dijual diikuti oleh perlakuan post yang berdampak pada kolom biaya metode persediaan eceran diantaranya ;

1. Pengurangan harga dan retur penjualan dianggap sebagai konsekuensi dari penjualan bruto;
2. Jika penjualan dianggap sebagai penjualan bruto, diskon penjualan tidak diterima.

Selain itu, beberapa pos khusus harus dianalisis, seperti:

1. Laporkan transfer masuk dari bagian lain dengan metode yang sama semacam memberi tahu pembelian dari produk yang lain.
2. Karena barang tersebut tidak lagi tersedia untuk dijual, kekurangan normal atau kerusakan barang bisa dikurangi pada kolom harga eceran tersebut.
3. Sebab benda tersebut tidak lagi tersedia untuk bisa dijual, kekurangan yg janggal mesti dikurangi dari kolom pengeluaran serta harga eceran tersebut.
4. Sebab barang tersebut tidak lagi ada guna dijual, kekurangan akhir mesti dikeluarkan dari kolom harga eceran.
5. Diskon karyawan dikurangi dari kolom harga eceran dengan teknik yang sama serupa penjualan.

Salah satu alasan mengapa pendekatan persediaan eceran dipilih untuk mengukur persediaan adalah karena ia memungkinkan untuk menghitung laba bersih tanpa melakukan perhitungan fisik persediaan; itu juga menawarkan cara untuk mengontrol kekurangan persediaan; dan memberikan informasi asuransi. Namun, ciri metode persediaan eceran ini adalah efek rata-rata pada tingkat laba kotor yang berbeda.

10.2.5 Penyajian Dan Analisis

Menurut standar akuntansi, laporan keuangan harus menunjukkan struktur pembiayaan inventaris, jumlah inventaris, dan metode yang digunakan untuk menghitung biaya inventaris. Untuk menilai likuiditas dan menghitung tahap penyelesaian persediaan, barang jadi, barang baku dan barang dalam proses harus dilaporkan secara terpisah pada skedul dan neraca. Selain itu, pengaturan dalam pembiayaan ditampilkan dalam catatan pengungkapan untuk topik tertentu, seperti transaksi sama pihak yang relevan, perjanjian pembiayaan produk, dan komitmen pembelian perusahaan. Selain itu, dasar penilaian persediaan serta metode penghitungan biaya FIFO dan rata-rata harus dilaporkan secara teratur.

Dengan membagi harga pokok penjualan dengan jumlah persediaan rata-rata yang ada di tangan selama suatu periode, Anda dapat menemukan rasio perputaran persediaan, dengan tujuan untuk menentukan tingkat likuiditas persediaan. Resiko perusahaan untuk mengalami kerusakan inventaris meningkat seiring dengan rasio perputaran inventaris yang lebih tinggi. Semakin banyak aktivitas penjualan, semakin sedikit keuntungan yang diperoleh perusahaan.

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Harga pokok penjualan}}{\text{Persediaan rata - rata}}$$

Meskipun tingkat persediaan biasanya berbeda di setiap industri, perusahaan yang berhasil adalah yang memiliki rasio perputaran persediaan yang tinggi dan tingkat persediaan yang rendah, dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

SOAL :

1. Apa definisi LCNRV?
2. Jelaskan mengapa metode LCNRV digunakan untuk menghitung kebanyakan persediaan.
3. Kondisi apa yang memfasilitasi penilaian menggunakan teknik nilai penjualan relatif?
4. Sebutkan tiga hipotesis tentang laba kotor!
5. Memiliki inventaris barang balum jadi dengan nilai jual sekitar 2.000.000 rupiah, biaya penyelesaian sekitar 600.000 rupiah, dan margin laba normal sebesar 0% dari penjualan, PT. Adi Jaya memiliki inventaris barang balum jadi. Bagaimanakah nilai realisasi PT. Adi Jaya dihitung?
6. PT. Sukses Makmur memiliki pembelian awal sebesar \$100.000 dan persediaan awal sebesar \$30.000. Jika harga jual \$140.000, laba kotor 30% atas harga jual.
7. PT. Adi Karya menggunakan sistem persediaan yang tidak pernah berakhir. Pada tanggal 1 Januari 2012, stok adalah \$107.000 berdasarkan biaya dan nilai pasar; pada tanggal 31 Desember 2012, stok naik menjadi \$149.000 berdasarkan biaya dan \$128.000 berdasarkan nilai pasar.

Pada tanggal 31 Desember, gunakan metode biaya langsung untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan!

8. Persediaan awal PT. Surya Abadi adalah sebesar empat puluh ribu dolar dan pembelian sebesar seratus ribu dolar, keduanya dicatat dengan basis biaya. Dengan menghitung jumlah persediaan terakhir, mereka menghasilkan laba kotor 40% atas harga jual dengan penjualan \$150,000.

PEMBAHASAN :

1. Ketika manfaat aset di masa depan menurun hingga berada di bawah nilai aslinya, ini disebut LCNRV.
2. Biaya adalah dasar untuk membawa biaya persediaan ke periode berikutnya. Namun, kerugian akan terjadi jika utilitas barang yang termasuk dalam persediaan lebih besar daripada biayanya. Biaya persediaan tidak boleh lebih besar daripada biaya yang dibayar dalam periode berikutnya jika kerugian ini dikategorikan sebagai kerugian periode berjalan, atau periode waktu di mana mereka terjadi, persediaan dibeli pada awal periode tersebut.
3. Ketika sejumlah unit yang berbeda dibeli dengan harga tetap, atau pembelian basket, metode nilai penjualan relatif digunakan. Jadi, mengelompokkan barang yang tidak dapat dibagi antara total biaya sejumlah dengan barang yang tersedia.
4. 3 asumsi laba kotor:
 - a. Total barang yang diperhitungkan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian;
 - b. Ada barang yang belum dijual;
 - c. Persediaan akhir adalah produk yang dibeli setelah biaya, jumlah persediaan awal, dan penjualan dikurangi.

5. Nilai realisasi bersih

Persediaan-nilai jual	Rp 2.000.000
Dikurangi:	
Estimasi biaya penyelesaian dan penjualan	600.000
Nilai realisasi bersih	Rp 1.400.000
Dikurangi:	
Penyisihan untuk margin laba normal (10%)	200.000
Nilai realisasi bersih dikurangi margin laba	Rp 1.200.000
6. Persediaan awal	\$ 30.000
Pembelian	100.000
Barang yang tersedia	130.000
Penjualan	\$ 140.000
Dikurangi: laba kotor (30% dari \$140.000)	42.000
Penjualan	98.000
Perkiraan persediaan	\$ 32.000

7. Metode langsung

Cost of Goods Sold	21.000.000
Allowance to Reduce Inventory to NRV	
21.000.000	

Metode tidak langsung

Loss Due to Decline of Inventory to NRV	21.000.000
Allowance to Reduce Inventory to NRV	21.000.000

8. Persediaan awal	\$40,000
Pembelian	100,000
Barang yang tersedia	140.000
Penjualan	\$150,000
Dikurangi: laba kotor (40% dari \$150.000)	60,000
Penjualan	90,000
Perkiraan persediaan	\$50,000

DAFTAR PUSTAKA

Srikant M. Datar & Madhav V. Rajan, *Hongren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, 17th edition, 2021. Pearson..

BAB 11

LIABILITAS JANGKA PENDEK DAN LIABILITAS JANGKA PANJANG

Oleh Wedia Hastuti

11.1 Pendahuluan

Liabilitas (dalam bahasa Inggris disebut: *liability*) merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang datang. Liabilitas disebut juga sebagai kebalikan dari aset. Contoh liabilitas seperti pinjaman uang yang diberikan oleh pihak lain dan juga termasuk pajak. (*Team, Muamala, 2018*). Pada dasarnya, liabilitas diartikan sebagai kewajiban. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, penyajian laporan keuangan, istilah kewajiban diganti dengan liabilitas. (*Pertiwi, Imanda Firmantyas Putri, 2021*). Liabilitas dapat berupa kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. (*Indonesia, Ikatan Bankir, 2017*).

Dalam pencatatan akuntansi, pengertian liabilitas sendiri bermakna cukup luas, tak hanya soal utang atau pinjaman. Namun juga bisa berasal dari transaksi, peristiwa bisnis, pertukaran aset, atau apa pun bentuknya yang bisa memberikan manfaat ekonomi di kemudian hari. Contohnya, dalam dunia perbankan. Akan tetapi, liabilitas tetap menjurus ke kewajiban. (*Idris, Muhammad, 2021*).

Alasan suatu perusahaan sampai memiliki liabilitas adalah berhubungan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Jika semua perusahaan mempunyai aset yang tidak banyak, sebaiknya dianjurkan untuk mengambil liabilitas. Tujuan dari hal itu adalah sebagai upaya agar perusahaan bisa berkembang secara maksimal. Sebab, saat bertahan dengan aset yang seadanya, maka secara otomatis perusahaan akan sulit sekali untuk maju atau berkembang. Perlu diingat bahwa liabilitas adalah tidak selalu berbentuk uang. Namun juga bisa berbentuk

jasa, barang, atau manfaat ekonomi dalam bentuk berbeda. Selain itu, liabilitas adalah bisa juga berasal dari berbagai jenis transaksi. Misalnya dari pertukaran aset, hubungan bisnis, dan berbagai transaksi yang dapat memberikan manfaat perekonomian Perusahaan. (Kompas.com).

11.2 Pengertian Liabilitas

Liabilitas adalah sebuah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya.

Dengan begitu, perluasan serta perkembangan suatu perusahaan bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Apabila perusahaan bersikeras untuk tidak mengambil sebuah risiko dengan cara berhutang. Terlebih untuk perusahaan yang tidak mempunyai aset dalam jumlah banyak. Maka perkembangan perusahaan tersebut berpotensi untuk terhambat dan tidak maksimal.

Adapun pengertian lain dari liabilitas yang lebih sederhana yaitu suatu kewajiban yang dihitung sama dengan nilai uang dan wajib dibayar oleh perusahaan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang dimaksud disini bisa berupa perusahaan, perorangan, koperasi, bank, dan lembaga keuangannya yang lainnya. Intinya, jika menurut pada catatan akuntansi, liabilitas adalah sebuah hutang. Dimana dalam persamaan akuntansi, liabilitas diberi singkatan ALE oleh para akuntan.

Singkatan tersebut memiliki kepanjangan, Aset Liabilitas, dan Ekuitas. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dari hal itu, muncul persamaan mengenai akuntansi yang menunjukkan bahwa aset berasal dari penjumlahan liabilitas dan juga ekuitas. Mengapa suatu perusahaan sampai memiliki liabilitas? Hal itu berhubungan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Di dalam ilmu akuntansi keuangan, liabilitas dianggap sebagai suatu kewajiban entitas yang muncul dari sebuah transaksi atau kejadian di masa lalu. Kewajiban yang dimaksud dijelaskan melalui beberapa karakteristik berikut ini:

1. Kewajiban merupakan segala jenis hutang atau pinjaman dari bank atau perorangan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Selain itu, kewajiban merupakan sebuah tanggung jawab dari pihak lain yang membutuhkan penyelesaian melalui pengiriman aset berupa penyediaan layanan maupun transaksi lain di masa depan dan menghasilkan sebuah manfaat ekonomi.
3. Kewajiban merupakan suatu tugas serta tanggung jawab pada pihak terkait, baik meninggalkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali suatu kebijakan guna menghindari penyelesaian.
4. Terakhir yaitu, kewajiban adalah sebuah peristiwa dan transaksi yang sudah terjadi dan menimbulkan tanggung jawab entitas.

11.3 Perbedaan Liabilitas dan Beban

Liabilitas dan beban seringkali dikategorikan sebagai suatu hal yang sama. Namun sebenarnya keduanya sangatlah berbeda. Liabilitas biasanya berbentuk hutang yang dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan aset demi kebutuhan operasional. Contohnya, apabila perusahaan membeli alat-alat untuk produksi yang digunakan dalam pembuatan produk. Kemudian pembayarannya dilakukan dengan menggunakan pinjaman, maka transaksi tersebut tergolong ke dalam liabilitas. Sedangkan untuk beban, yaitu termasuk pembayaran yang sedang berjalan untuk sebuah hal yang tidak ada nilai nyatanya dan dipakai untuk mendapatkan profit atau income. Salah satu contohnya yang bisa dijadikan gambaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar iklan dengan tujuan menarik pelanggan. Selain itu, beban dan juga liabilitas umumnya tercantum pada tempat yang berbeda-beda di laporan

keuangan. Dimana liabilitas biasanya ditulis di neraca keuangan, sementara beban ditulis di laporan laba dan rugi.

11.4 Membandingkan Kewajiban dan Hutang

Perbedaan utama antara kewajiban dan hutang adalah:

1. Kewajiban mencakup seluruh kewajiban keuangan seseorang, sedangkan hutang hanyalah kewajiban yang terkait dengan pinjaman yang belum dibayar. Jadi, hutang adalah bagian dari kewajiban.
2. Kewajiban utang mengharuskan debitur membayar kembali pokok pinjaman ditambah bunga, sedangkan tidak ada pembayaran bunga yang terkait dengan sebagian besar jenis kewajiban lainnya.
3. Sebagian besar kewajiban bersifat jangka pendek sehingga muncul di bagian kewajiban lancar di neraca , sedangkan utang dapat dilaporkan di bagian kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang di neraca, bergantung pada kapan. pembayaran pinjaman telah jatuh tempo.
4. Liabilitas diukur dengan rasio likuiditas untuk melihat apakah liabilitas tersebut dapat dibayar pada saat jatuh tempo, sedangkan utang diukur dengan rasio leverage untuk melihat apakah suatu perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan.

11.5 Jenis-Jenis Liabilitas

Secara umum, liabilitas akan muncul dan tercatat di neraca laporan keuangan yang ditulis di akhir periode. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kondisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tersebut. Biasanya, letak liabilitas di laporan keuangan berada di kolom sebelah kanan bersama dengan catatan ekuitas. Dimana dalam pencatatannya, liabilitas berada di urutan yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah 2 jenis liabilitas yang perlu anda ketahui dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau bisnis.

11.5.1 Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewajiban keuangan suatu perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dalam periode waktu lebih dari satu tahun. Ini mencakup kewajiban seperti pinjaman jangka panjang, obligasi, dan hipotek yang akan jatuh tempo setelah melewati satu tahun. Liabilitas ini memegang peranan penting dalam penilaian struktur modal perusahaan serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Keberadaan liabilitas jangka panjang adalah cerminan dari komitmen jangka panjang yang perusahaan ambil untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mendukung kegiatan operasional, investasi, atau ekspansi. Dengan kata lain, ini adalah wujud dari penggunaan sumber daya finansial yang perlu dibayar kembali dalam jangka waktu yang lebih lama daripada satu tahun.

1. Karakteristik Liabilitas Jangka Panjang

Beberapa karakteristik liabilitas jangka panjang antara lain: Liabilitas jangka panjang memiliki jangka waktu yang lebih lama daripada liabilitas jangka pendek. Biasanya, jangka waktu liabilitas jangka panjang lebih dari satu tahun atau siklus operasional normal perusahaan.

- a. Liabilitas jangka panjang dihasilkan dari sumber dana jangka panjang seperti obligasi, utang jangka panjang, dan pinjaman jangka panjang dari bank atau kreditur lainnya.
- b. Liabilitas jangka panjang memiliki nilai yang jelas dan dapat diukur. Nilai ini didasarkan pada jumlah utang atau kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan.
- c. Beberapa jenis liabilitas jangka panjang, seperti obligasi, biasanya membayar bunga kepada investor yang membeli obligasi. Bunga ini dapat menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan dan harus dikelola dengan hati-hati.
- d. Liabilitas jangka panjang biasanya merupakan utang yang besar, biasanya dilindungi oleh agunan, seperti

tanah, gedung, atau fasilitas produksi lainnya. Dalam hal perusahaan tidak dapat membayar kewajiban, kreditur dapat mengeksekusi agunan dan menggunakan aset tersebut untuk membayar hutang.

- e. Liabilitas jangka panjang memerlukan analisis risiko yang cermat karena kewajiban ini memiliki jangka waktu yang lebih lama dan dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan membayar kewajiban secara tepat waktu.
- f. Liabilitas jangka panjang harus dikelola dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan di masa depan dan mempengaruhi reputasi perusahaan.

Perusahaan harus memperhitungkan risiko yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo.

2. Contoh Liabilitas Jangka Panjang

Beberapa contoh liabilitas jangka panjang adalah:

- a. Hutang Obligasi (*Bond Payable*). Perusahaan – perusahaan besar tidak dapat meminjam uang miliaran dari satu pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian perusahaan tersebut dapat menerbitkan (menjual) surat berharga obligasi kepada publik.

Contoh Soal:

PT Sejahtera Abadi menerbitkan obligasi senilai 120.000.000, bunga 10 % jangka waktu 12 tahun tertanggal 1 Januari 2009 dengan pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari.

Jurnal yang dibuat oleh PT Sejahtera Abadi untuk mencatat penjualan obligasi, bunga 10 %, 12 tahun adalah:

1/1/09	Kas		120.000.000	
		Utang Obligasi		120.000.000

Tanggal 1 juli 2009 perusahaan membayar bunga untuk periode 6 bulan pertama, Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga untuk 6 bulan:

1/7/09	Biaya Bunga		6.000.000*	
		Kas		6.000.000*
* Bunga obligasi = $120.000.000 \times 10\% \times 6/12 = 6.000.000$				

Jurnal yang dibuat PT Sejahtera Abadi untuk mencatat pelunasan obligasi pada tanggal jatuh (tanggal 1 Januari 2021):

1/1/21	Utang Obligasi		120.000.000	
		Kas		120.000.000

- b. Utang Hipotik (*Mortgage Notes Payable*). Utang hipotik yaitu suatu jenis pinjaman (utang) jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman hipotik biasanya diambil jika dana yang diperlukan dapat dipinjam dari satu sumber, misalnya dengan mengambil pinjaman dari suatu bank tertentu.

Contoh soal utang hipotek:

Pada tanggal 1 Februari 2020, PT. Mulia Jaya membeli sebidang tanah berikut bangunan dengan harga Rp 600.000.000,- dibayar dengan uang muka sebesar Rp 200.000.000,- dan ditanda tangani kontrak pinjaman

dari bank sebesar Rp 400.000.000,-. Kontrak mengharuskan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman dalam 2 kali angsuran masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2021 di tambah bunga 12% dari sisa pinjaman.

Maka Jurnal Pencatatan yang harus dibuat adalah sbb:

Tanggal	Nama	Jumlah	
		Debet	Kredit
01/02/2020	Tanah & bangunan	600.000.000	
	Kas atau bank		600.000.000
	Utang hipotik		400.000.000
31/12/2020	Biaya bunga	48.000.000	
	Utang hipotik	200.000.000	
	Kas atau bank		248.000.000
31/12/2021	Biaya bunga	24.000.000	
	Utang hipotik	200.000.000	
	Kas atau bank		224.000.000

- c. Wesel Bayar Jangka Panjang (*Long Term Notes*). Wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari, biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60-90 hari setelah diterbitkan.

- d. Kewajiban Lease. Lease adalah kesepakatan sewa dimana penyewa (*lessee*) sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti (*lessor*) atas penggunaan aset.
 - e. Kewajiban Pensiun/Pasca pensiun. Secara umum terdapat dua prinsip dasar sehubungan dengan kewajiban pasca pensiun yaitu kontribusi pasti dan manfaat pasti. Dalam kontribusi pasti, karyawan menyetorkan jumlah uang yang tetap kepada dana pensiun. Kewajiban perusahaan akan berakhir sejak kontribusi dilakukan.
3. Kelebihan Liabilitas Jangka Panjang
- Setiap jenis utang sebetulnya memiliki kegunaan atau tujuan masing-masing. Adapun manfaat utang tenor panjang, di antaranya:
- a. Bunga lebih kecil. Secara umum, pinjaman atau utang mempunyai bunga tetap. Ketika suku bunga naik, maka nilai dari jaminan aset juga mengalami kenaikan suku bunga. Namun, apabila suku bunga menurun, hal tersebut tidak akan mengubah nilai dari suku bunga pinjaman dan tetap pada besaran yang telah disetujui bersama antara peminjam dan pemberi pinjaman.
 - b. Aset Tetap Bisa Digunakan. Apabila kamu menggunakan utang hipotek, maka perusahaan kamu tetap dapat menggunakan aset jaminan untuk operasional bisnis. Tentu saja ini sebuah keuntungan bagi perusahaan ketika mengajukan utang tenor panjang. Pasalnya, mereka tetap bisa memanfaatkan aset tersebut guna menjalankan atau mendukung performa bisnis.
 - c. Mengurangi pajak. Manfaat utang tenor panjang adalah berkurangnya jumlah pajak yang harus perusahaan bayarkan. Ini bisa terjadi karena setiap tahun terdapat tanggungan bunga pinjaman milik perusahaan. Hal tersebut kemudian menjadikan laba perusahaan menurun hingga akhirnya mengurangi nominal pajak yang wajib dilunasi.

- d. Arus kas lebih terencana dengan baik. Manfaat utang tenor panjang yang terakhir adalah membantu mengelola dan merencanakan arus kas bisnis. Mengingat bunga pinjaman bersifat tetap, perusahaan dapat lebih mudah melakukan perencanaan secara terstruktur dan menentukan perhitungan pasti mengenai pelunasan pinjaman.

4. Kelemahan Liabilitas Jangka Panjang

Di samping kelebihan di atas, utang tenor panjang juga memiliki sejumlah kekurangan yang patut kamu ketahui. Berikut beberapa di antaranya.

- a. Risiko gagal melunasi utang oleh perusahaan menjadi lebih tinggi.
- b. Semakin lama tenggat waktu dan semakin tinggi jumlah pinjaman, maka tingkat risiko juga semakin besar
- c. Beban biaya tahunan perusahaan semakin meningkat karena terdapat tanggungan pinjaman yang harus dilunasi
- d. Perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan jumlah pendapatan dan laba serta selalu siap sedia dalam melunasi utang ketika jatuh tempo
- e. Nilai saham atau ekuitas perusahaan bisa terpengaruh bila utang terlalu tinggi maupun rendah.

11.5.2 Liabilitas Jangka Pendek

Jenis liabilitas yang kedua adalah liabilitas yang bersifat jangka pendek. Liabilitas jenis ini kerap kali disebut dengan istilah liabilitas lancar. Hal tersebut bisa diartikan sebagai suatu kewajiban yang diharapkan bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek atau tidak lebih dari setahun.

1. Karakteristik Liabilitas Jangka Pendek

- a. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Ini berbeda dengan liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun.
- b. Liabilitas jangka pendek dapat terjadi sebagai bagian dari siklus operasional perusahaan. Contohnya,

- pembayaran tagihan kepada pemasok atau vendor atas pembelian barang atau jasa.
- c. Liabilitas jangka pendek dapat menjadi sumber pendanaan jangka pendek untuk perusahaan. Dengan mengambil kredit atau pinjaman jangka pendek, perusahaan dapat memperoleh pendanaan jangka pendek yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan operasional atau modal kerja.
 - d. Liabilitas jangka pendek dapat menghasilkan biaya dalam bentuk bunga atau biaya administrasi.
 - e. Liabilitas jangka pendek dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat membayar kembali kewajiban jangka pendek tepat waktu, ini dapat mengganggu arus kas perusahaan dan mengakibatkan masalah keuangan.
 - f. Liabilitas jangka pendek dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Semakin besar liabilitas jangka pendek, semakin besar pula pengaruhnya terhadap keuangan dan risiko perusahaan.
 - g. Seperti halnya liabilitas jangka panjang, perusahaan harus mengelola liabilitas jangka pendek dengan hati-hati agar tidak mengalami masalah keuangan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka dapat membayar kembali kewajiban jangka pendek tepat waktu.

2. Contoh Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini adalah beberapa contoh liabilitas jangka pendek:

- a. Utang dagang. Hutang usaha mencakup seluruh kewajiban perusahaan yang bisa berasal dari pembelian secara kredit dari pemasok atau vendor. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli sebuah mesin produksi seharga Rp 10.000.000 dengan kredit jangka pendek yang harus dibayarkan dalam waktu 6 bulan. Maka Rp 10.000.000 tersebut dikategorikan sebagai hutang usaha.

Ilustrasi Utang Dagang:

PT. Kenanga tanggal 1 Nopember 2022 membeli peralatan secara kredit dengan nilai sebesar Rp 20.000.000. Syarat pembelian 2/10, n/30.

Jurnal 1 Nopember 2022:

Persediaan		20.000.000	
	Utang Dagang		20.000.000

Jika dilunasi 10 Nopember 2022:

Utang Dagang		20.000.000	
	Kas		19.600.000
	Potongan Pembelian		400.000

Jika dilunasi 15 Nopember 2022:

Utang Dagang		20.000.000	
	Kas		20.000.000

- b. Utang wesel. Utang wesel merupakan jenis pinjaman yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis yang dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Ilustrasi Wesel Bayar - berbunga

PT. Kenanga melunasi utang dagang sebesar Rp 20.000.000 pada 1 Desember 2022 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari, bunga 12%.

Jurnal 1 Desember 2022:

UtangDagang		20.000.000	
	Wesel Bayar		20.000.000

Jurnal 31 Desember 2022 - bunga ($30/360 \times 12\% \times 20.000.000$)

Beban Bunga		200.000	
	Utang Bunga		200.000

Wesel dilunasi 1 Maret 2023:

Wesel Bayar		20.000.000	
Utang Bunga		200.000	
Beban Bunga		400.000	
	Kas		20.600.000

Ilustrasi Wesel Bayar – tanpa bunga

PT. Kenanga melunasi utang dagang sebesar Rp 20.000.000 pada 1 Desember 2022 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar Rp 22.400.000, jangka waktu 360 hari, tanpa bunga.

Jurnal 1 Desember 2022:

Utang Dagang		20.000.000	
	Wesel Bayar		20.000.000

Jurnal 31 Desember 2022 – bunga

$(30/360 * 12\% * 20.000.000)$:

Beban Bunga		200.000	
	Wesel Bayar		200.000

Wesel dilunasi 1 Desember 2023:

Beban Bunga		2.200.000	
	Wesel Bayar		2.200.000
Wesel Bayar		22.400.000	
	Kas		22.400.000

- c. Pendapatan dibayar dimuka. Jika perusahaan telah menerima sejumlah uang dari penjualan barang atau jasa tetapi perusahaan belum memberikan produk atau jasanya kepada pihak konsumen, maka pendapatan ini juga termasuk ke dalam hutang jangka pendek perusahaan.
- d. Surat berharga komersial. Alih-alih mengambil pinjaman dari bank, beberapa perusahaan memilih untuk mengeluarkan commercial paper atau surat berharga komersial. Surat berharga ini tanpa jaminan

yang terbentuk dari promissory notes jangka pendek yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan institusi pengelola keuangan pribadi dan biasanya jatuh tempo dalam sembilan bulan atau kurang.

- e. Pembayaran Sewa. Merupakan hal lumrah bagi perusahaan untuk menyewa tempat usaha. Hal ini didasari oleh banyak faktor, salah satunya karena dianggap lebih efisien daripada harus membeli sebuah properti sendiri. Sebagian besar beban sewa dianggap sebagai hutang jangka panjang. Namun, kebenarannya pembayaran sewa terkadang juga dapat digolongkan sebagai hutang jangka pendek. Terutama jika pembayaran sewa jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Contohnya saja jika perusahaan menandatangani sewa kantor selama 6 bulan, maka ini pun dianggap sebagai hutang jangka pendek.
- f. Pajak terutang. Pajak juga dapat termasuk dalam lingkup kewajiban lancar perusahaan. Komponen pajak dari hutang jangka pendek ini mencakup berbagai jenis pajak yang wajib disetorkan kepada otoritas pajak dalam tahun berjalan.
- g. Utang dividen. Dividen adalah suatu keuntungan yang secara khusus diberikan oleh pemilik usaha kepada para investornya. Dividen dikategorikan sebagai utang karena perusahaan memiliki kewajiban dalam membayarkan sebagian keuntungannya kepada para investor/ pemegang saham. Dengan kata lain, jika perusahaan telah mengumumkan keuntungan tetapi belum membayar dividen kepada para pemegang saham maka dividen tersebut sudah menjadi hutang jangka pendek perusahaan.
- h. Gaji dan upah. Terkadang, gaji dan upah juga dapat dianggap sebagai hutang jangka pendek. Misalnya, seorang karyawan dijanjikan perusahaan menerima gaji pada tanggal 5 setiap bulan untuk pekerjaan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Itu berarti gaji menjadi hutang jangka pendek sampai gaji tersebut dibayar pada setiap tanggal 5.

3. Kelebihan Liabilitas Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek memiliki beberapa kelebihan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Fleksibilitas Keuangan

Dengan menggunakan liabilitas jangka pendek, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

b. Peningkatan Likuiditas

Dengan memanfaatkan liabilitas jangka pendek, perusahaan dapat meningkatkan likuiditasnya dengan mengonversi aset keuangan menjadi uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional.

c. Diversifikasi Sumber Pendanaan

Dengan menggunakan liabilitas jangka pendek, perusahaan dapat mencapai diversifikasi dalam sumber pendanaan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan saja.

d. Peningkatan Daya Tawar

Dengan menggunakan liabilitas jangka pendek, perusahaan dapat meningkatkan daya tawarnya dalam negosiasi dengan pemasok atau mitra bisnis lainnya. Kemampuan untuk membayar utang dagang atau utang lainnya secara tepat waktu dapat membantu membangun reputasi yang baik dan memperkuat hubungan bisnis.

4. Kelemahan Liabilitas Jangka Pendek

Meskipun memiliki kelebihan, liabilitas jangka pendek juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Risiko Bunga

Jika perusahaan menggunakan utang jangka pendek dengan bunga tetap, adanya kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban bunga dan mempengaruhi keuntungan perusahaan.

b. Keterbatasan Waktu

Kewajiban jangka pendek memiliki tenggat waktu yang singkat. Jika perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban tersebut tepat waktu, hal ini dapat menyebabkan masalah likuiditas dan merusak reputasi perusahaan.

c. Pembatasan Modal Kerja

Penggunaan liabilitas jangka pendek untuk membiayai modal kerja dapat membawa risiko pembatasan akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih fleksibel.

d. Risiko Refinancing

Ketika utang jangka pendek jatuh tempo, perusahaan harus mencari cara untuk melunasi atau memperpanjang kewajiban tersebut. Namun, dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan atau ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, mendapatkan pembiayaan baru atau memperpanjang jangka waktu kewajiban dapat menjadi sulit atau mahal. Risiko ini dapat menyebabkan tekanan keuangan tambahan pada perusahaan.

e. Potensi Pengaruh Terhadap Kredibilitas Perusahaan

Liabilitas jangka pendek yang tidak terkelola dengan baik atau kesulitan dalam melunasi kewajiban dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari pihak eksternal, seperti pemasok, investor, dan lembaga keuangan. Kehilangan kredibilitas dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan mempersulit akses perusahaan ke sumber daya keuangan yang dibutuhkan.

11.6 Implikasi Liabilitas pada Keuangan Perusahaan

1. Pengaruh liabilitas pada neraca perusahaan

Liabilitas adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar liabilitas perusahaan, semakin besar pula kewajiban

finansial yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini akan mempengaruhi neraca perusahaan karena liabilitas termasuk dalam bagian kewajiban pada neraca. Jika liabilitas perusahaan terlalu besar, maka akan mengurangi jumlah aset perusahaan sehingga akan mengurangi nilai ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan besarnya liabilitas agar tidak memberikan dampak buruk pada neraca perusahaan.

2. Analisis rasio keuangan terkait liabilitas
Analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Salah satu rasio keuangan yang terkait dengan liabilitas adalah debt-to-equity ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar liabilitas perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula risiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan rasio ini agar tidak terlalu tinggi dan dapat menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
3. Dampak liabilitas pada kesehatan keuangan perusahaan
Liabilitas yang terlalu besar dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan keuangan perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu membayar liabilitas pada jangka waktu yang ditentukan, maka perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan bunga yang harus dibayarkan atas liabilitas. Jika bunga terlalu besar, maka akan mengurangi laba perusahaan dan dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan keuangan perusahaan.

11.7 Kesimpulan

Dalam bisnis, pemahaman yang baik mengenai liabilitas jangka panjang dan jangka pendek sangat penting. Dalam artikel ini, kita telah menjelaskan pengertian, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, serta cara menganalisis liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek dalam perspektif perusahaan.

Dengan mengelola liabilitas dengan baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan memastikan keberlangsungan bisnisnya, sehingga kesehatan keuangan Perusahaan dalam kondisi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin, (2023). Liabilitas Adalah: Pengertian dan Contoh dalam Akuntansi.
<https://zahiraccounting.com/id/blog/pengertian-liabilitas>.
- Fauziyah, Rosyda Nur. Pengertian Liabilitas Dan Manfaatnya Untuk Perusahaan. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-liabilitas/#Pengertian_Liabilitas.
- Idris, Muhammad (2021-07-24). Idris, Muhammad, ed. "Apa Itu Liabilitas: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Akuntansi". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-11-10.
- Indonesia, Ikatan Bankir (2017-07-17). Memahami Audit Intern Perbankan (Ed. Revisi). Gramedia Pustaka Utama. hlm. 314. ISBN 978-602-03-5663-1.
- Martini, Dwi (2014). Liabilitas Jangka Pendek. Slide OCW Universitas Indonesia. Departemen Akuntansi FEUI.
- Team, Muamala (2018-06-10). "Apa itu Liabilitas? Kenali Liabilitas dalam Istilah Akuntansi". Muamala Net. Diakses tanggal 2020-10-22.
- Pertiwi, Imanda Firmantyas Putri (2021-02-07). Pengantar Akuntansi Lanjutan. Penerbit:PT RajaGrafindo Persada. hlm. 163.

BAB 12

NILAI WAKTU UANG DAN LAPORAN KEUANGAN

Oleh Sabarudin

12.1 Pendahuluan

Manajer keuangan sangat mementingkan konsep nilai waktu uang ketika membuat keputusan mengenai investasi dan memilih sumber dana pinjaman. Konsep ini relevan baik untuk keputusan keuangan pribadi maupun bisnis, karena konsep ini memperhitungkan nilai uang dari waktu ke waktu.

Proses akuntansi melibatkan identifikasi, pencatatan, dan komunikasi peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi. Penerima informasi ini, yang dikenal sebagai pengguna, mencakup entitas eksternal seperti investor, kreditor, dan lembaga pemerintah, serta pihak internal seperti manajer dan karyawan. Akuntansi berfungsi sebagai alat penting untuk menilai dan menyusun strategi masa depan suatu perusahaan, berfungsi sebagai pengawas keuangan organisasi.

Laporan keuangan mencakup berbagai informasi akuntansi, seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan ekuitas, dan Laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Selain itu, laporan ini dapat mencakup Catatan, laporan tambahan lainnya, dan materi penjelasan yang merupakan komponen integral dari laporan keuangan.

12.2 Konsep Nilai Waktu Uang

Prinsip dasar pengambilan keputusan investasi terletak pada kesadaran bahwa nilai satu rupiah saat ini akan jauh lebih tinggi di masa depan. Ketika berurusan dengan masalah keuangan atau arus kas investasi, yang sering kali berlangsung dalam jangka waktu lama, misalnya bertahun-tahun, maka penting untuk mempertimbangkan dampak waktu terhadap

nilai uang. “Konsep nilai waktu uang terkait erat dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan arus kas. Nilai uang sekarang, atau nilainya saat ini, akan berbeda dengan nilai masa depan karena pengaruh bunga. Teori ini menyatakan bahwa uang yang tersedia saat ini memiliki nilai lebih dibandingkan jumlah uang yang setara di masa depan. Misalnya Rp. 6.000,00 saat ini sudah bisa membeli satu liter beras kualitas medium. Namun uang dengan jumlah yang sama tidak akan mampu membeli satu liter beras tahun depan, mungkin hanya 0,9 liter. Contoh ini dengan jelas menunjukkan bagaimana nilai uang berkurang seiring waktu dalam kaitannya dengan daya beli. Penurunan nilai ini biasa disebut dengan inflasi.

12.2.1 *Future Value* (Nilai Waktu Masa Depan)

Rumus Nilai Masa Depan, sebagaimana didefinisikan oleh Horne dan Wachowicz (2014: 48), menghitung jumlah yang diperoleh dari nilai awal tertentu (dalam istilah moneter) ketika dimajemukkan pada tingkat bunga tertentu selama jangka waktu di masa depan, dengan mempertimbangkan pertumbuhan pembayaran:

$$F = P \times (1 + i)^n$$

Keterangan :

P = uang tabungan/investasi awal

i = tingkat bunga

n = periode menabung/investasi

F = uang yang akan diterima di akhir periode

Latihan Soal.

Dengan asumsi tingkat suku bunga berfluktuasi selama tiga tahun (10% pada tahun pertama, 12% pada tahun kedua, dan 14% pada tahun ketiga), berapa nilai masa depan sebesar Rp. 1.000 diterima saat ini, pada akhir tahun ketiga adalah...

$$\begin{aligned} F &= 1.000 \times (1 + 10\%)^1 \times (1 + 12\%)^1 \times (1 + 14\%)^1 \\ &= 1.404 \end{aligned}$$

Dengan asumsi tingkat bunga 10% pada tahun pertama, 12% pada tahun kedua, dan 14% pada tahun ketiga hingga kelima,

maka besarnya Rp. 1.000 yang diterima saat ini akan bernilai pada akhir tahun kelima adalah...

$$F = 1.000 \times (1 + 10\%)^1 \times (1 + 12\%)^1 \times (1 + 14\%)^3 \\ = 1.825$$

12.2.2 Present Value (Nilai Waktu Sekarang)

Rumus Present Value (Nilai Waktu Sekarang) yakni:

$$P = F \times \frac{1}{(1 + i)^n}$$

Keterangan :

P = uang tabungan/investasi awal

i = tingkat bunga

n = periode menabung/investasi

F = uang yang akan diterima di akhir periode

Latihan Soal.

Diketahui tingkat bunga tahun pertama 10%, tahun kedua 12%, dan tahun ketiga 14%, maka nilai sekarang sebesar Rp. 1.404 yang akan diterima dalam tiga tahun bisa dihitung ...

$$P = 1.404 \times \frac{1}{(1 + 10\%)^1} \times \frac{1}{(1 + 12\%)^1} \times \frac{1}{(1 + 14\%)^1} \\ = 1.000$$

Mengingat tingkat bunga pada tahun awal adalah 10%, diikuti oleh 12% pada tahun kedua, dan 14% pada tahun ketiga hingga tahun kelima, maka nilai sekarang sebesar Rp. 1.825 yang akan diterima dalam lima tahun dapat dihitung sebagai berikut" ...

$$P = 1.825 \times \frac{1}{(1 + 10\%)^1} \times \frac{1}{(1 + 12\%)^1} \times \frac{1}{(1 + 14\%)^3} \\ = 1.000$$

12.2.3 Anuitas

Anuitas mengacu pada serangkaian pembayaran yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu,

dengan jumlah uang yang sama dibayarkan setiap kali. Ada tiga jenis anuitas berdasarkan waktu pembayarannya: Anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditangguhkan. Pada anuitas biasa, pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode, sedangkan pada anuitas di muka, pembayaran dilakukan pada awal setiap periode. Sebaliknya, anuitas yang ditangguhkan mengikuti jadwal pembayaran yang sama dengan anuitas biasa, namun pembayaran pertama ditunda sesuai ketentuan yang disepakati. Saat membahas anuitas, biasanya yang dimaksud adalah anuitas biasa. Bab ini akan fokus hanya pada anuitas biasa. Dalam konsep anuitas, nilai masa depan dilambangkan dengan FV, dan nilai sekarang dilambangkan dengan PV. Ciri-ciri anuitas antara lain: 1) Pembayaran tetap/sama, 2) Interval antar pembayaran yang sama, dan 3) Pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama

1. Nilai yang akan datang dari Anuitas (*Future Value*)

Pada akhir jangka waktu yang ditentukan, nilai masa depan dari suatu anuitas mencakup jumlah pembayaran yang dilakukan dan bunga yang masih harus dibayar. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$S_n = A \times \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Keterangan:

S_n = nilai yg akan datang dr anuitas selama n periode

A = anuitas

i = Tingkat bunga

Latihan Soal.

Akumulasi nilai anuitas sebesar Rp. 1.000 diterima setiap tahun selama jangka waktu 4 tahun, dimajemukkan dengan tingkat bunga tahunan sebesar 10%, berjumlah

$$\begin{aligned} S_4 &= 1.000 \times \frac{(1 + 10\%)^4 - 1}{10\%} \\ &= 1.000 \times \frac{0,4641}{10\%} \\ &= 4.641 \end{aligned}$$

Catatan:

Jika terjadi perubahan pada nilai moneter atau suku bunga, penggunaan rumus ini menjadi tidak dapat dilakukan, sehingga memerlukan perhitungan individual menggunakan rumus nilai masa depan)

2. Nilai Sekarang dari Anuitas (*Present Value*)

Tujuan penghitungan nilai sekarang adalah “untuk memastikan nilai saat ini dari sejumlah uang tertentu yang akan dikeluarkan atau diterima secara berkala selama jangka waktu tertentu. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$P = A \times \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n \times i}$$

Keterangan :

P = uang tabungan/investasi awal

A = anuitas

i = Tingkat bunga

Latihan Soal.

Pembayaran tahunan yang konsisten sebesar Rp. 1.000 akan diterima selama 4 tahun ke depan, dengan setiap pembayaran didiskon sebesar 10% per tahun
Pada akhir tahun pertama, nilai moneter yang akan diterima adalah sebagai berikut:

$$P = 1.000 \times \frac{1}{(1 + 10\%)^1} = 909$$

Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-2 adalah:

$$P = 1.000 \times \frac{1}{(1 + 10\%)^2} = 826$$

Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-3 adalah:

$$P = 1.000 \times \frac{1}{(1 + 10\%)^3} = 751$$

Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-4 adalah:

$$P = 1.000 \times \frac{1}{(1 + 10\%)^4} = 683$$

Oleh karena itu, penjumlahan nilai saat ini dari seluruh dana yang diterima dalam bentuk anuitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rp } 909 + \text{Rp } 826 + \text{Rp } 751 + \text{Rp } 683 = \text{Rp } 3.170$$

Nilai serangkaian pembayaran sebesar Rp. 1.000 yang akan diterima setiap tahun selama 4 tahun ke depan, jika didiskontokan dengan tingkat bunga tahunan sebesar 10%, disebut sebagai nilai sekarang

$$\begin{aligned} P &= 1.000 \times \frac{(1 + 10\%)^4 - 1}{(1 + 10\%)^4 \times 10\%} \\ &= 1.000 \times \frac{0,4641}{0,1464} \\ &= 3.170 \end{aligned}$$

Catatan:

Apabila terjadi fluktuasi jumlah uang dan/atau tingkat suku bunga, rumus ini menjadi tidak dapat diterapkan sehingga mengharuskan perhitungan setiap kasus menggunakan rumus nilai masa depan).

12.3 Laporan Keuangan

Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan, yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi keuangan dan operasional perusahaan kepada individu yang berkepentingan dengan hal tersebut. Data transaksi awalnya dicatat dalam jurnal dan kemudian dipindahkan ke buku besar. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berharga kepada penggunanya, khususnya sebagai landasan pengambilan keputusan di masa depan.

12.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai kegiatan suatu perusahaan dan biasanya disajikan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Laporan-laporan ini disiapkan pada waktu tertentu dan digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang selaras dengan kepentingan pengguna laporan. Ikatan Akuntansi Indonesia mengartikan laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaporan, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), serta catatan dan penjelasan yang menyertainya. Selain itu, laporan keuangan dapat mencakup jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, seperti data keuangan, segmen industri dan geografis, serta pengungkapan mengenai dampak fluktuasi harga. Dalam bukunya "Analisis Laporan Keuangan" S. Munawir (2010:5) memberikan pengertian laporan keuangan. Menurut Munawir, laporan keuangan disusun oleh akuntan pada akhir periode pelaporan suatu perusahaan dan terdiri dari dua daftar utama: neraca, yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, dan daftar pendapatan, yang merinci keuntungan dan kerugian. Selain itu, perusahaan telah mengadopsi praktik memasukkan daftar ketiga yang disebut daftar surplus atau laba ditahan, yang menampilkan laba yang tidak didistribusikan. Kasmir dalam bukunya "Financial Report Analysis" (2011:7) lebih lanjut menjelaskan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Ringkasnya, laporan keuangan berfungsi sebagai hasil akhir dari proses akuntansi dan berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi antara pihak internal dan eksternal. Laporan-laporan ini memberikan data tentang kegiatan operasional perusahaan dan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laba ditahan.

12.3.2 Arti Penting Laporan Keuangan

Tujuan utama pembuatan laporan keuangan adalah untuk memberikan update komprehensif mengenai kemajuan

manajemen suatu perusahaan. Laporan-laporan ini berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi berbagai pengguna yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara khusus, mereka menawarkan informasi penting tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan apa pun yang terjadi selama periode tertentu. Data ini penting untuk mengevaluasi kemampuan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengujian, namun juga menjadi landasan untuk menentukan dan menilai kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dengan menganalisis laporan-laporan ini, individu dan organisasi yang mempunyai kepentingan dalam kesehatan keuangan perusahaan dapat membuat keputusan yang selaras dengan kepentingan spesifik mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2011:18), pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut”:

1. Laporan keuangan suatu perusahaan mempunyai arti penting bagi pemiliknya, terutama ketika pemilik mempercayakan perusahaannya kepada orang lain. Pernyataan-pernyataan ini memungkinkan pemilik untuk mengevaluasi kinerja manajer dalam menghasilkan keuntungan, karena keberhasilan seorang manajer biasanya diukur dari profitabilitas perusahaan.
2. Kemampuan manajer untuk secara efektif merencanakan, memantau, dan menerapkan kebijakan yang tepat sangat ditingkatkan dengan pemahaman mereka terhadap posisi keuangan perusahaan pada periode saat ini dan sebelumnya. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat penting bagi manajemen, memungkinkan mereka bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan dan menunjukkan kepercayaan mereka.
3. Investor mempunyai kepentingan dalam memperoleh laporan keuangan perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya. Keingintahuan mereka terletak pada profitabilitas masa depan perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutannya, seiring mereka mencari

- kepastian atas investasi mereka dan berupaya memahami kondisi keuangan dan kondisi kerja perusahaan saat ini.
4. Sebelum memutuskan menyetujui atau menolak permintaan kredit suatu perusahaan, kreditor dan bankir harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Hal ini dapat dicapai dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, yang akan mengungkapkan posisi keuangannya saat ini. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat memastikan apakah perusahaan mempunyai jaminan yang diperlukan untuk mendukung kredit yang diminta, yang merupakan indikasi potensi profitabilitasnya di masa depan.
 5. Pemerintah yang berkedudukan di negara asal perusahaan mempunyai kepentingan yang besar terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan-laporan ini tidak hanya membantu menghitung kewajiban perpajakan perusahaan, namun juga berfungsi sebagai informasi penting bagi Badan Pusat Statistik, Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta membantu perencanaan pemerintah.
 6. Para karyawan mengandalkan laporan-laporan ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan upah yang adil dan meningkatkan jaminan sosial. Selain itu, laporan-laporan ini memandu keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan menguraikan tindakan yang perlu diambil.
 7. Laporan keuangan merupakan sumber daya yang berharga bagi publik, karena memberikan informasi mengenai tren, perkembangan terkini, dan aktivitas perusahaan dalam masyarakat.

12.3.3 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

Sebagaimana dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2012: 3), tujuan utama laporan keuangan untuk penggunaan umum adalah untuk menyediakan data yang berkaitan dengan status keuangan suatu perusahaan, yang dapat bermanfaat bagi banyak pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, laporan-laporan ini

menunjukkan kinerja yang dilaksanakan oleh manajemen dan membuat mereka bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

Memberikan data keuangan yang dapat diandalkan mengenai aset, kewajiban, dan modal perusahaan.

B. Membantu penerima laporan keuangan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penyediaan informasi keuangan.

C. Tujuan memberikan rincian yang akurat dan dapat dipercaya mengenai perubahan aset bersih perusahaan akibat operasi bisnisnya adalah untuk mencapai profitabilitas.

D. Selain itu, penting untuk memberikan informasi penting mengenai perubahan aset dan kewajiban perusahaan, termasuk rincian tentang aktivitas pendanaan dan investasi.

Sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam “Standar Akuntansi Keuangan” (2012:5) oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan hendaknya memiliki empat karakteristik utama yang penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1) Relevansi, yang menjamin bahwa informasi yang diberikan dapat diterapkan secara langsung pada proses pengambilan keputusan pengguna. 2) Pemahaman, memastikan bahwa informasi penting yang terkandung dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh pengguna. 3) Keandalan (Reliability), yaitu menjamin bahwa suatu informasi berguna dan dapat dipercaya, bebas dari kesalahan, dan dapat diandalkan sebagai representasi akurat dari apa yang ingin disampaikan. 4) Keterbandingan, yaitu meningkatkan kegunaan informasi dengan memungkinkan dilakukannya perbandingan antara laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan perusahaan lain dalam kurun waktu yang sama.

12.3.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Manajemen suatu perusahaan secara berkala membuat laporan keuangan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan kemajuan perusahaan. Laporan-laporan tersebut, sebagaimana dikemukakan Kasmir (2011: 11), bersifat

historis dan mencakup data yang luas. Mereka disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kinerja perusahaan dan merupakan hasil penggabungan berbagai sumber informasi:

1. Fakta Tercatat: Laporan keuangan ini disusun menggunakan data yang diambil dari catatan akuntansi perusahaan, yang mencakup informasi tentang simpanan kas perusahaan, baik yang ada di tangan maupun di bank, piutang yang beredar, persediaan barang, kewajiban, dan aset tetap.
2. Prinsip dan Asumsi Akuntansi (Konvensi dan Postulat Akuntansi) Untuk memastikan konsistensi dalam pencatatan, data dicatat sesuai dengan prosedur dan asumsi yang telah ditetapkan yang dikenal sebagai prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pencatatan dan mendorong keseragaman. Misalnya, ketika mengalokasikan biaya untuk perlengkapan alat tulis, terdapat pertanyaan apakah akan menilainya berdasarkan harga beli atau berdasarkan nilai pasar pada saat depresiasi laporan keuangan.
3. Penerapan konvensi dan prinsip dasar dalam pencatatan transaksi diatur oleh norma-norma yang berlaku dan praktik yang diterima secara luas dalam pembukuan. Namun, pemanfaatan konvensi dan prinsip ini bergantung pada kebijaksanaan Akuntan atau manajemen perusahaan masing-masing. Misalnya, penilaian piutang tak tertagih, perhitungan biaya penyusutan, dan identifikasi komponen aset tetap sangat bergantung pada penilaian pribadi manajemen, yang didasarkan pada data historis.

Laporan keuangan menurut Munawir (2010:9) mempunyai keterbatasan tertentu, antara lain:

1. laporan interim yang bersifat sementara dan bukan laporan akhir. Laporan-laporan ini dibuat secara periodik dan mencakup periode waktu tertentu.
2. Laporan keuangan memberikan angka spesifik dan pasti dalam mata uang rupiah, namun penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini didasarkan pada standar nilai yang mungkin bervariasi atau berfluktuasi. Akibatnya, nilai-nilai

yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan nilai buku dan belum tentu mencerminkan harga pasar saat ini.

3. Penyusunan laporan keuangan bergantung pada hasil pendokumentasian transaksi keuangan periode sebelumnya, dimana nilai uang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan suatu perusahaan tidak dapat digambarkan secara akurat dalam laporan keuangan, karena faktor-faktor tersebut tidak diukur dalam bentuk moneter.

12.3.5 Jenis dan Unsur Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2011:28), laporan keuangan memberikan gambaran tentang status keuangan dan kinerja suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan-laporan ini hadir dalam berbagai bentuk, termasuk jenis-jenis yang umum dikenal berikut ini:

1. Laporan Neraca

Neraca adalah dokumen komprehensif yang memberikan gambaran terorganisir tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada titik waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan status keuangan perusahaan, biasanya pada akhir tahun fiskal atau kalender ketika pembukuan diselesaikan. Oleh karena itu, biasa disebut dengan neraca.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan perusahaan adalah laporan komprehensif yang merinci pendapatan, pengeluaran, dan keseluruhan profitabilitas atau kerugian yang terjadi dalam jangka waktu tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan tersebut memberikan gambaran tentang modal perusahaan saat ini, merinci setiap perubahan yang terjadi dan alasan yang mendasari perubahan tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan, serta memberikan

wawasan berharga mengenai dinamika keuangan perusahaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan dihasilkan sehubungan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan rincian mengenai klarifikasi atau penjelasan apa pun yang diperlukan untuk laporan keuangan saat ini, memastikan bahwa penyebab mendasarnya mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Horne James C. Van dan Wachowicz John M, 2014. Fundamentals of Financial Management Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, Edisi 12, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Kasmir. 2017. Customer Service Excellent: Teori dan Praktik. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Munawir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

BAB 13

LAPORAN ARUS KAS DAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Oleh Frisky Jeremy Kasingku

13.1 Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi dari perusahaan kepada para pemangku kepentingan internal atau eksternal seperti pihak manajemen perusahaan, pihak kreditur, pihak investor, maupun pihak pemerintah. Melalui informasi yang disediakan dalam laporan keuangan, kinerja perusahaan dapat dievaluasi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Tingkat kesehatan keuangan perusahaan juga dapat dianalisa melalui laporan keuangan. Artinya, melalui laporan keuangan, berbagai kepentingan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dapat terpenuhi. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang memuat semua informasi yang perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan agar para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang akurat (Carragher dan Van Auken, 2013; Sudarmanto dkk., 2023).

Salah satu laporan keuangan yaitu laporan laba rugi telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Bab ini akan membahas dua laporan keuangan lainnya yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Bab ini akan terlebih dahulu membahas terkait fungsi dari laporan posisi keuangan, setelah itu elemen-elemen yang ada didalam laporan posisi keuangan akan dibahas. Bagian selanjutnya dari bab ini adalah pembahasan terkait pentingnya laporan arus kas, dan pada bagian terakhir elemen-elemen dari laporan arus kas akan dibahas.

13.2 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang memuat informasi terkait aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Lebih

lanjut lagi, melalui draf eksposur kerangka konseptual pelaporan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2019), laporan keuangan yang didalamnya terdapat laporan posisi keuangan secara umum bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomik dan klaim entitas
2. Informasi terkait dengan imbal hasil yang telah dihasilkan oleh entitas dari sumber daya ekonomik

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), sumber daya ekonomik adalah aset sedangkan klaim adalah liabilitas dan ekuitas. Penjelasan terkait sumber daya ekonomik dan klaim dapat dilihat pada tabel 13.1.

Tabel 13.1. Sumber daya Ekonomik dan Klaim

Item	Unsur	Definisi atau Deskripsi
Sumber Daya Ekonomik	Aset	Sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu
		Sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik
Klaim	Liabilitas	Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu
	Ekuitas	Kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya

Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)

Selain itu, laporan posisi keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat resiko dari pengelolaan utang perusahaan. Laporan posisi keuangan dapat mengkomunikasikan seberapa baik perusahaan dalam membayar utang secara tepat waktu. Informasi terkait utang merupakan informasi yang penting karena pengelolaan utang yang baik mengindikasikan tingkat

pertumbuhan perusahaan yang baik juga dimasa yang akan datang (Gordon, Raedy dan Sannella, 2019).

Ringkasnya, menurut Gordon, Raedy dan Sannella (2019); Kieso, Weygandt dan Warfield (2019), para pemangku kepentingan dapat menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai:

1. Likuiditas,
2. Solvabilitas, dan
3. Fleksibilitas Keuangan.

Likuiditas merupakan pengukur seberapa cepat suatu aset dapat diubah menjadi uang tunai tanpa memperoleh kerugian yang besar. Analisis ini juga dapat membantu para pemangku kepentingan untuk menilai apakah suatu entitas memiliki kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek. Singkatnya, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu entitas, semakin kecil risiko kegagalan yang dapat dialami (Gordon, Raedy dan Sannella, 2019; Sihaloho, Tamauka dan Kasingku, 2021).

Solvabilitas mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola utang jangka panjang. Jika tingkat utang jangka panjang perusahaan tinggi dibandingkan dengan asetnya, mengakibatkan perusahaan memiliki tingkat solvabilitas yang rendah. Artinya, perusahaan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki tingkat utang jangka panjang yang tinggi memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam hal solvabilitas (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2019).

Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan perusahaan untuk merespon kejadian yang tidak terduga dengan mengubah jumlah dan waktu dari arus kas. Contohnya, ketika perusahaan harus menghadapi kondisi ekonomi yang buruk yang tidak terprediksi sebelumnya, jika perusahaan memiliki tingkat utang yang rendah, maka perusahaan dapat menggunakan sumber daya ekonomik untuk merespon kondisi ekonomi tersebut. Artinya, semakin tinggi fleksibilitas keuangan suatu entitas, semakin rendah risiko kegagalannya (Gordon, Raedy dan Sannella, 2019; Kieso, Weygandt dan Warfield, 2019).

PT. Klabat Tbk			
Laporan Posisi Keuangan			
31 Desember 20XX			
(Dalam Ribuan Rupiah)			
Aset			
	Aset Lancar		
	Kas dan Setara Kas		Rp100.000.000
	Deposito berjangka		Rp50.000.000
	Piutang Usaha		Rp40.000.000
	Persediaan Barang Dagangan		Rp80.000.000
	Perlengkapan Kantor		Rp25.000.000
	Biaya dibayar dimuka		Rp12.000.000
	Total Aset Lancar		Rp307.000.000
	Aset Tidak Lancar		
	Investasi Jangka Panjang		Rp150.000.000
	Property, Plant dan Equipment		
	Tanah		Rp400.000.000
	Bangunan	Rp600.000.000	
	Akumulasi Depresiasi - Bangunan	-Rp100.000.000	
	Bangunan - Net		Rp500.000.000
	Equipment	Rp200.000.000	
	Akumulasi Depresiasi - Equipment	-Rp20.000.000	
	Equipment - Net		Rp180.000.000
	Property, Plant, dan Equipment - Net		Rp1.080.000.000
	Aset Tidak Berwujud		Rp100.000.000
	Aset Tidak Lancar Lainnya		Rp120.000.000

	Total Aset Tidak Lancar		Rp1.300.000.000
Total Aset			Rp1.607.000.000
Liabilitas dan Ekuitas			
	Liabilitas		
	Liabilitas Janga Pendek		
	Utang Usaha		Rp50.000.000
	Notes Payable - Jangka Pendek		Rp25.000.000
	Porsi Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang		Rp10.000.000
	Utang Bunga		Rp5.000.000
	Utang Pajak		Rp12.000.000
	Pendapatan yang Belum Diterima		Rp6.000.000
	Total Liabilitas Jangka Pendek		Rp108.000.000
	Liabilitas Jangka Panjang		
	Notes Payable - Jangka Panjang		Rp120.000.000
	Utang Obligasi		Rp300.000.000
	Total Liabilitas Jangka Panjang		Rp420.000.000
	Total Liabilitas		Rp528.000.000
	Ekuitas		
	Modal Saham		Rp500.000.000
	Tambahan Modal Disetor		Rp400.000.000
	Laba Ditahan		Rp100.000.000
	Akumulasi Pendapatan Komprehensif Lainnya		Rp79.000.000
	Total Ekuitas		Rp1.079.000.000
Total Liabilitas dan Ekuitas			Rp1.607.000.000

Gambar 13.1. Laporan Posisi Keuangan
(Sumber :(Gordon, Raedy dan Sannella, 2019))

Pada bagian sebelumnya kita dapat melihat contoh laporan posisi keuangan untuk PT. Klabat, Tbk pada tanggal 31 Desember 20xx. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa PT. Klabat, Tbk, memiliki jumlah aset sebesar 1,6 Triliun Rupiah, jumlah utang sebesar 528 Miliar Rupiah, dan jumlah ekuitas sejumlah 1,079 Triliun Rupiah (Semua angka dalam laporan operasi keuangan dibuat dalam ribuan rupiah). Bagian selanjutnya akan membahas elemen-elemen yang ada dalam laporan posisi keuangan yang diringkas pada tabel 13.2.

Tabel 13.2. Klasifikasi Elemen-Elemen Laporan Posisi Keuangan

Aset	Liabilitas	Ekuitas
Aset Lancar	Liabilitas Jangka Pendek	Modal
Aset Tidak Lancar: - Investasi Jangka Panjang - Property, Plant, dan Equipment - Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Lancar Lainnya	Liabilitas Jangka Panjang	Laba Ditahan

Sumber: (Gitman dan Zutter, 2015; Warren, Reeve dan Duchac, 2016)

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2019), aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Aset terbagi kedalam dua bagian utama yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan sumber daya ekonomik yang dimiliki entitas yang dapat digunakan dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi. Siklus operasi merupakan periode yang dimulai sejak proses akuisisi barang sampai ketika barang tersebut

menghasilkan kas pada saat dijual. Artinya, ketika perusahaan menerima kas dari penjualan, siklus operasi selesai Aset lancar secara umum terdiri dari:

1. Kas dan setara kas,
2. Investasi jangka pendek,
3. Piutang Usaha,
4. Persediaan barang dagang,
5. Perlengkapan kantor, dan
6. Biaya dibayar dimuka.

Kas dan setara kas merupakan bagian paling pertama yang ada di laporan posisi keuangan karena tingkat likuiditasnya yang paling tinggi. Setara kas merupakan investasi yang sangat likuid yang kapan saja dapat dicairkan menjadi kas. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang kurang likuid dibanding setara kas karena biasanya investasi ini dilakukan untuk periode satu tahun. Piutang usaha merupakan jumlah penjualan ke pelanggan yang belum dilunaskan atau penjualan berbasis kredit. Persediaan barang dagang merupakan akun khusus yang mencatat nilai dari barang yang akan dijual. Perlengkapan kantor merupakan segala bentuk alat-alat yang digunakan untuk kelancaran administrasi perusahaan tersebut seperti kertas, pulpen, buku, dan yang lainnya. Biaya dibayar dimuka terjadi ketika entitas membayar beban terlebih dahulu sebelum beban tersebut terjadi. Dua biaya dibayar dimuka yang paling umum terjadi adalah sewa dan asuransi. Biaya tersebut dicatat sebagai aset lancar karena kedua biaya tersebut telah dibayarkan walaupun manfaatnya belum diperoleh sepenuhnya (Gordon, Raedy dan Sannella, 2019).

Elemen selanjutnya dalam aset seperti yang dapat dilihat pada contoh laporan posisi keuangan adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari:

1. Investasi jangka panjang
2. *Property, plant, dan equipment*
3. Aset tidak berwujud
4. Aset tidak lancar lainnya

Investasi jangka panjang merupakan bentuk komitmen dana jangka panjang yang tidak secara langsung memberi manfaat untuk operasional dari perusahaan. Investasi tersebut masuk dalam aset tidak lancar karena biasanya investasi ini tidak dicairkan kedalam kas dalam periode kurang dari satu tahun. *Property, plant* dan *equipment* merupakan aset yang digunakan untuk mendukung proses penjualan barang dan atau jasa dari perusahaan yang masa pakainya melebihi satu tahun. Jumlah yang dilaporkan untuk elemen ini adalah jumlah bersih setelah dikurangi dengan depresiasi, kecuali aset tanah yang tidak terdepresiasi. Aset tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik tapi memiliki nilai ekonomik yang dapat dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Contoh aset tak berwujud adalah paten dan hak cipta. Elemen yang terakhir dalam aset tidak lancar adalah aset tidak lancar lainnya yang menampung semua aset yang tidak masuk kedalam kategori-kategori sebelumnya (Spiceland dkk., 2016).

Selanjutnya, elemen setelah aset adalah liabilitas. Sama halnya dengan aset, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang merupakan dua elemen yang ada didalam liabilitas. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek terdiri dari:

1. Utang usaha,
2. Notes Payable,
3. Porsi jangka pendek dari utang jangka panjang,
4. Accrued payables,
5. Pendapatan yang belum diterima.

Utang usaha terjadi ketika perusahaan melakukan pembelian secara kredit kepada pemasok. Biasanya perusahaan bisa melunasi utang tersebut tanpa harus membayar bunga jika perusahaan membayar kewajiban sesuai dengan termin pembayaran. Notes payable merupakan utang dalam bentuk surat perjanjian yang jatuh temponya masih dalam kurun waktu satu tahun. Selanjutnya, porsi jangka pendek dari utang jangka panjang merupakan porsi dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu siklus operasi. *Accrued payables* merupakan kewajiban dari perusahaan yang belum dibayar sampai pada akhir periode. Artinya ketika manfaat telah didapatkan tapi

kewajiban pembayaran belum dilakukan, maka akan muncul *accrued payables*. Contoh *accrued payables* adalah utang gaji. Pendapatan yang belum diterima merupakan utang yang dicatat karena pelanggan telah membayar ke perusahaan namun perusahaan belum melaksanakan kewajibannya baik untuk menjual produk atau melaksanakan jasa. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang melebihi satu siklus operasi atau melebihi satu tahun. Biasanya liabilitas jangka panjang terjadi karena adanya aktivitas pendanaan, ataupun aktivitas operasional dari perusahaan (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2019).

Ekuitas merupakan elemen terakhir yang ada didalam laporan posisi keuangan. Adapun elemen yang ada didalam ekuitas adalah:

1. Modal
2. Laba ditahan

Modal dapat berasal dari modal saham ataupun modal yang berasal dari tambahan dana yang diberikan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak didistribusikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Selain itu, biasanya terdapat elemen lain dalam ekuitas seperti akumulasi laba komprehensif lainnya (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2019).

Setelah memahami elemen-elemen yang ada pada laporan posisi keuangan, perusahaan juga perlu memahami cara penyajian laporan tersebut. Laporan keuangan tersebut dapat disajikan dalam bentuk laporan seperti yang ada pada contoh laporan posisi keuangan sebelumnya ataupun dapat dilaporkan dalam bentuk Akun. Bentuk akun merupakan bentuk pelaporan laporan posisi keuangan yang memisahkan pelaporan berdasarkan karakteristik elemennya. Berbeda dengan laporan contoh sebelumnya, jika laporan posisi keuangan disajikan dalam bentuk akun, maka aset akan berada pada posisi bagian kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas akan berada dibagian kanan dari laporan posisi keuangan (Gordon, Raedy dan Sannella, 2019).

13.2 Laporan Arus Kas

Salah satu tanda dari kesehatan perusahaan adalah dengan melihat arus kas dari perusahaan tersebut. Pengelolaan kas merupakan suatu hal yang sangat krusial didalam perusahaan. Tanpa kas, perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas operasional seperti pembelian barang dagang atau pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah, serta segala aktivitas vital lainnya. Artinya, tingkat kesuksesan sebuah perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan mengelola kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang penting karena laporan ini menginformasikan pengelolaan kas perusahaan melalui informasi atas pemasukan dan pengeluaran kas (Spiceland dkk., 2016).

Selanjutnya menurut Spiceland dkk., (2016), laporan arus kas menginformasikan arus kas yang masuk dan keluar tiga aktivitas utama dari perusahaan, yaitu:

1. Aktivitas operasional,
2. Aktivitas investasi, dan
3. Aktivitas pendanaan.

Aktivitas operasional merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan sampai dengan penjualan barang dan atau jasa dari perusahaan. Pada bagian ini, perusahaan perlu melaporkan seberapa banyak kas yang masuk dan keluar dalam proses pelaksanaan aktivitas operasional dalam satu periode. Jika perusahaan menghasilkan nilai kas yang positif dari aktiivitas operasional, maka perusahaan telah mengolah kas perusahaan dalam satu siklus operasi dengan baik.

Menurut Garrison, Noreen dan Brewer (2018), dalam melaporkan aktivitas operasional, perusahaan dapat menggunakan dua metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung dimulai dengan pelaporan nilai kas yang diterima dari pelanggan, lalu dikurangkan dengan semua pembayaran kas yang terjadi seperti kas yang keluar karena terjadi pembayaran ke pemasok dan karyawan. Pembayaran bunga dan pajak juga merupakan pengurang dari kas. Hasil

akhirnya merupakan kas yang didapatkan (jika nilainya positif) ataupun kas yang digunakan (jika nilainya negatif) dari aktivitas operasional. Beberapa contoh item arus kas operasional yang menggunakan metode langsung adalah:

1. Kas yang diterima dari pelanggan (penambah arus kas)
2. Kas yang dibayarkan untuk pemasok (pengurang arus kas)
3. Kas yang dibayarkan untuk karyawan (pengurang arus kas)
4. Kas yang dibayarkan untuk pajak (pengurang arus kas)
5. Kas yang dibayarkan untuk beban bunga (pengurang arus kas)

Selanjutnya, Gordon, Raedy dan Sannella, (2019) menginformasikan bahwa metode tidak langsung menghitung kas melalui laba bersih yang disesuaikan dengan semua transaksi yang tidak bersifat kas yang dapat menambah maupun mengurangi laba bersih perusahaan. Contohnya, depresiasi akan ditambahkan ke laba bersih karena depresiasi pada laporan laba rugi mengurangi laba bersih. Ini dilakukan karena beban depresiasi tidak berhubungan dengan aktivitas kas apapun. Sebagai contoh, perhatikan beberapa item berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laba Tahun Berjalan		Rp150.000.000
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba tahun berjalan ke kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi		
Beban Penyusutan	Rp12.000.000	
Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp1.000.000	
Keuntungan dari Penjualan aset tetap	-Rp20.000.000	
Peningkatan piutang usaha	-Rp10.000.000	
Penurunan Persediaan Barang	Rp25.000.000	
Penurunan Utang usaha	-Rp5.000.000	Rp3.000.000
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		Rp153.000.000

Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan proses pengadaan atau penjualan investasi, property, plant dan equipment. Laporan arus kas meringkas kas yang mengalir dalam proses pengadaan maupun penjualan investasi tersebut. Selanjutnya, Aktivitas terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran pendanaan yang dibutuhkan perusahaan baik itu pendanaan bersifat utang atau ekuitas. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas pada aktivitas investasi maupun pendanaan akan menentukan kesimpulan pada setiap bagian apakah terdapat arus kas yang dihasilkan dari aktiitas investasi maupun pendanaan atau terdapat kas yang digunakan dari aktivitas investasi maupun pendanaan (Zutter dan Smart, 2022).

Setelah itu, bagian terakhir dari laporan arus kas adalah menjumlahkan setiap arus kas dari masing-masing aktivitas untuk mendapatkan kenaikan atau penurunan arus kas pada periode tersebut. Setelah itu, kenaikan atau penurunan arus kas akan ditambahkan dengan nilai kas dan setara kas pada awal periode untuk mendapatkan nilai kas dan setara kas pada akhir periode (Gordon, Raedy dan Sannella, 2019).

Lebih lanjut lagi, contoh laporan arus kas dapat dilihat pada gambar 13.2 dan 13.3. Gambar 13.2 merupakan contoh laporan arus kas yang menggunakan metode langsung untuk aktivitas operasional sedangkan gambar 13.3 merupakan laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung untuk aktivitas operasional.

PT. Klabat Tbk

Laporan Arus Kas

31 Desember 20XX

(Dalam Ribuan Rupiah)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas yang diterima dari Pelanggan Rp215.000.000

Kas yang dibayarkan untuk Pemasok -Rp30.000.000

Kas yang dibayarkan untuk Karyawan -Rp15.000.000

Beban Pajak -Rp12.000.000

Beban Bunga -Rp5.000.000 -Rp62.000.000

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Rp153.000.000

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pembelian Aset -Rp100.000.000

Penjualan Aset Tetap Rp80.000.000

Arus Kas Bersih yang Digunakan oleh Aktivitas Investasi -Rp20.000.000

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pembayaran Utang -Rp20.000.000

Pembayaran Dividen -Rp12.000.000

Treasury Stock -Rp11.000.000

Arus Kas Bersih yang Digunakan oleh Aktivitas Pendanaan -Rp43.000.000

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Rp90.000.000

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Rp10.000.000

Kas dan setara Kas pada Akhir Tahun Rp100.000.000

Gambar 13.2. Laporan Arus Kas Metode Langsung
Sumber : (Gordon, Raedy and Sannella, 2019)

PT. Klabat Tbk**Laporan Arus Kas****31 Desember 20XX****(Dalam Ribuan Rupiah)****Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Laba Tahun Berjalan Rp150.000.000

Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba tahun berjalan ke kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi

Beban Penyusutan Rp12.000.000

Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp1.000.000

Keuntungan dari Penjualan aset tetap -Rp20.000.000

Peningkatan piutang usaha -Rp10.000.000

Penurunan Persediaan Barang Rp25.000.000

Penurunan Utang usaha -Rp5.000.000 Rp3.000.000

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Rp153.000.000**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Pembelian Aset -Rp100.000.000

Penjualan Aset Tetap Rp80.000.000

Arus Kas Bersih yang Digunakan oleh Aktivitas Investasi -Rp20.000.000**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Pembayaran Utang -Rp20.000.000

Pembayaran Dividen -Rp12.000.000

Treasury Stock -Rp11.000.000

Arus Kas Bersih yang Digunakan oleh Aktivitas Pendanaan -Rp43.000.000

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Rp90.000.000

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Rp10.000.000

Kas dan setara Kas pada Akhir Tahun Rp100.000.000**Gambar 13.3.** Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung
Sumber : (Gordon, Raedy and Sannella, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Carraher, S. and Van Auken, H. (2013) 'The use of financial statements for decision making by small firms', *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 26(3), pp. 323–336. Available at: <https://doi.org/10.1080/08276331.2013.803676>.
- Garrison, R.H., Noreen, E.W. and Brewer, P.C. (2018) *Managerial Accounting*. 16th edn. New York: McGraw Hill Education.
- Gitman, L. and Zutter, C. (2015) *Principles of Managerial Finance*. 14th edn. Essex: Pearson Education Limited.
- Gordon, E.A., Raedy, J.S. and Sannella, A.J. (2019) *Intermediate Accounting*. 3rd edn. New York: Pearson.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2019) *Draf Eksposur Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. (2019) *Intermediate Accounting*. 17th edn. Wiley.
- Sihaloho, C.H.N., Tamauka, A.C.P. and Kasingku, F.J. (2021) 'Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Perusahaan Konstruksi', *Klabat Accounting Review*, 2(1), p. 52. Available at: <https://doi.org/10.60090/kar.v2i1.564.52-65>.
- Spiceland, J.D. *et al.* (2016) *Intermediate Accounting*. 8th edn. New York: McGraw Hill.
- Sudarmanto, E. *et al.* (2023) *Akuntansi dan Keuangan Sebuah Pengantar*. Yayasan Kita Menulis.
- Warren, C.S., Reeve, J.M. and Duchac, J.E. (2016) *Financial and Managerial Accounting*. 13th edn. Boston: Cengage Learning.
- Zutter, C.J. and Smart, S.B. (2022) *Principles of Managerial Finance*. 16th edn. Essex: Pearson Education Limited.

BAB 14

KEBIJAKAN AKUNTANSI, SERTA PERUBAHAN-PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Oleh Nenny Syahrenny

14.1 Pendahuluan

Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta kesalahan awalnya diatur didalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984 Bab II pasal 6, Bab III pasal 7 dan 8 kemudian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 25 (1994) mengenai Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan mendasar. PAI 1984 dan PSAK 25 (1994) digantikan dengan PSAK 25 (2009) mengenai Perubahan Estimasi Akuntansi, Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan. PSAK 25 (2009) merujuk kepada IAS 8 mengenai *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* per 1 Januari 2009. PSAK 25 mengalami penyesuaian tahunan sebanyak 2 kali di tahun 2014 dan 2015. Terjadi Amandemen pada tahun 2019 yang merujuk pada IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. Tahun 2021 Amandemen PSAK 25 mengenai definisi Estimasi Akuntansi merujuk pada Amandemen IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* tentang *Definitions of Accounting Estimates*. Pada tahun 2022 terjadi perubahan penomoran dari PSAK 25 menjadi PSAK 208 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024 (DSAK IAI, 2024).

Entitas privat dapat menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat. Pembahasan mengenai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan dibahas dalam Bab 10. Entitas privat merupakan perusahaan yang (1) instrumen utang/ ekuitasnya tidak diperdagangkan di bursa efek (2) tidak menguasai aset dalam kapasitas fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang

beragam sebagai usaha utamanya serta melaporkan laporan keuangannya kepada *stakeholder* termasuk pemilik (DSAK IAI, 2016)

14.2 Kebijakan Akuntansi (*Accounting Policy*)

Kebijakan Akuntansi mencakup konvensi, fundamental, prinsip, peraturan, serta praktik khusus yang perusahaan terapkan dalam upaya menyajikan serta menyiapkan laporan keuangan (DSAK IAI, 2024). Tujuan utamanya adalah menghasilkan laporan yang relevan serta bisa diandalkan, dengan demikian pihak pengguna laporan keuangan bisa membuat keputusan atas dasar informasi yang disajikan secara tepat. Relevansi informasi diukur dari kemampuannya dalam membantu pengguna membuat keputusan ekonomi, seperti evaluasi kinerja, alokasi sumber daya, atau perencanaan keuangan. Informasi dapat menjadi relevan ketika memiliki nilai prediktif dan konfirmatori. Informasi mempunyai nilai prediktif ketika informasi tersebut dapat memberikan hasil prediksi di masa mendatang. Selain dapat memprediksi, informasi dapat dikatakan relevan jika dapat mengkonfirmasi hasil di masa lalu. Contohnya adalah informasi mengenai pendapatan. Informasi tersebut relevan ketika informasi mengenai pendapatan dapat memprediksi perolehan pendapatan di masa depan dengan menggunakan informasi perolehan pendapatan di tahun-tahun sebelumnya dan membandingkannya.

Informasi laporan keuangan harus bisa diandalkan oleh para pengguna. Sebuah laporan keuangan disebut andal jika (1) menyajikan secara jujur, (2) mencerminkan substansi ekonomik dan bukan hanya bentuk hukum, (3) netral, (4) pertimbangan sehat, dan (5) lengkap (DSAK IAI, 2024). Prinsip akuntansi yang berbeda memiliki tingkat keandalan serta relevansi yang berbeda pula. Perusahaan harus memilih keseimbangan antara relevansi dan *reliable* tersebut. Pertimbangan dalam memilih kebijakan akuntansi disesuaikan dengan situasi perusahaan (Hamzah, Priharjanto and Purwanti, 2019).

Prinsip akuntansi yang dipilih harus menjelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Definisi mengacu pada apa yang dapat dimasukkan dalam akun tertentu. *Recognition* menjelaskan kapan dan dalam kondisi apa pengakuan terjadi dalam laporan keuangan tahunan. Penilaian menjelaskan seberapa besar nilai yang harus dicatat dalam laporan keuangan, sedangkan penyajian dan pengungkapan menjelaskan dimana seharusnya nilai tersebut muncul dalam laporan keuangan dan yang serta hal-hal yang perlu diungkap pada laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kas dan setara kas meliputi uang tunai fisik, rekening giro di bank, cek yang belum diuangkan, serta instrumen keuangan likuid lainnya yang mudah dikonversi menjadi kas. Kas dan setara kas hanya diakui jika tersedia untuk digunakan tanpa pembatasan yang signifikan dan diukur sesuai dengan nilai nominalnya. Item-item ini disajikan sebagai bagian aset lancar pada laporan keuangan. Informasi yang harus diungkapkan tentang kas serta setara kas mencakup detail tentang komponen-komponennya, kebijakan yang digunakan untuk menentukan komponen tersebut, jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, serta informasi tambahan yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi harus dipilih dan diterapkan secara konsisten oleh perusahaan (manajemen) terhadap peristiwa, transaksi, serta kondisi lainnya. Misalnya, jika suatu perusahaan menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap dengan memakai metode garis lurus di periode XX, maka perusahaan tersebut akan tetap menggunakan metode garis lurus kecuali jika ada perubahan yang memberikan informasi yang lebih andal. Hal ini dianggap kontradiksi karena setelah metode tersebut berubah dari metode garis lurus ke metode lain, perusahaan ingin kembali menggunakan garis lurus pada periode XZ. PSAK 208 mengatur bahwa perusahaan hanya mengubah kebijakan akuntansi bilamana perubahan tersebut (DSAK IAI, 2024):

1. Diwajibkan oleh PSAK; atau
2. Menyiapkan laporan keuangan yang berisi informasi yang relevan serta andal tentang dampak peristiwa, transaksi,

ataupun kondisi lain terhadap kondisi arus kas suatu entitas atau kinerja keuangan.

Manajemen memiliki keleluasaan untuk menggunakan pertimbangannya dalam merancang serta menerapkan berbagai kebijakan akuntansi yang dapat diandalkan serta relevan, terutama jika PSAK tidak langsung berlaku untuk suatu transaksi atau situasi. Pertimbangan tersebut merujuk (secara berurutan) pada sumber-sumber berikut (DSAK IAI, 2024):

1. Persyaratan SAK Indonesia terkait topik serupa dan terkait
2. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran dalam kerangka konseptual.

Manajemen perlu mempertimbangkan standar akuntansi terbaru yang dibuat literatur akuntansi lain, badan standar lain, praktik akuntansi industri yang berlaku. Tidak semuanya merupakan perubahan prinsip akuntansi. Ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam perubahan prinsip akuntansi. Artinya, pemberlakuan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan sebelumnya, atau pemberlakuan kebijakan akuntansi baru yang belum pernah terjadi.

14.2.1 Perlakuan Akuntansi Akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi

Bilamana terjadi perubahan prinsip akuntansi, perlakuannya adalah dengan menerapkan secara retrospektif. Retrospektif berarti prinsip akuntansi baru diterapkan pada semua peristiwa, transaksi, serta kondisi yang lalu seolah-olah prinsip yang diterapkan sudah digunakan sejak awal. Hasilnya, laporan keuangan periode sebelumnya harus diadjust untuk mencerminkan prinsip baru ini, agar konsistensi dan keakuratan laporan keuangan terjaga sepanjang waktu.

Menurut PSAK 208, yang membahas Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, jika terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi atau perbaikan dari kesalahan sebelumnya, diperlukan penyesuaian atau pengadjustan atas laporan keuangan periode sebelumnya. Proses ini dilakukan secara retrospektif, yang berarti bahwa

laporan keuangan sebelumnya diubah untuk mencerminkan standar atau prinsip yang baru (DSAK IAI, 2024). Perusahaan melakukan penyesuaian berikut karena penerapan retrospektif:

1. Saldo Awal Ekuitas: Saldo awal yang berasal dari setiap komponen ekuitas yang terdampak diadjust untuk periode penyajian paling awal, seolah-olah kebijakan baru yang telah diterapkan dari awal.
2. Jumlah Komparatif: Angka komparatif di setiap periode yang disajikan pada laporan keuangan diubah untuk mencerminkan penerapan kebijakan baru seolah-olah sudah diterapkan sejak awal.

Jika entitas tidak dapat menilai secara lengkap dampak dari menerapkan kebijakan akuntansi baru pada seluruh periode sebelumnya karena kurangnya data historis, entitas dapat memilih untuk menerapkan kebijakan baru pada periode mendatang mulai dari awal periode yang paling awal yang dapat mereka tentukan. Entitas tidak perlu menyesuaikan laporan keuangan untuk periode sebelumnya.

14.2.2 Konflik Kepentingan Kebijakan Akuntansi

Standar Akuntansi memberikan kebebasan kepada entitas dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan. Pemilihan kebijakan ini akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan. Ketika manajemen ingin meningkatkan labanya maka cenderung memilih kebijakan akuntansi yang agresif. Keputusan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi terkait erat dengan pencapaian target laba (Setijaningsih, 2020). Hal ini seperti yang diungkapkan dalam penelitian Sulistiawan (Sulistiawan, 2009) menyatakan bahwa konflik kepentingan akan mempengaruhi seseorang cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi yang lebih agresif dibandingkan yang tidak memiliki kepentingan. Utomo pada tahun 2011 dan 2015 menyatakan dalam penelitiannya bahwa bonus yang dijanjikan kepada manager berpengaruh terhadap manajemen laba sehingga manager membuat kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan laba (Abidin and Kristanto, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Wulanditya

(Wulanditya, 2022) menyatakan bahwa penyajian kembali yang mengindikasikan adanya penyimpangan yang disengaja memerlukan investigasi lebih lanjut. Hasil penelitiannya menunjukkan hanya 4% faktor yang menyebabkan penyajian kembali laporan keuangan dari berubahnya kebijakan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (Ayu, 2023) menyatakan bahwa saat kondisi ekonomi mengalami penurunan maka perusahaan cenderung menentukan kebijakan konservatif sebagaimana membuat cadangan kerugian untuk merespon ketidakpastian atau mengevaluasi kembali aset mereka. Sebaliknya, ketika kondisi perekonomian mengalami pertumbuhan maka perusahaan memilih kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pembayaran deviden atau investasi.

14.2.3 Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan beberapa hal berikut jika penerapan awal PSAK berdampak dalam periode kini, masa lalu, atau masa depan:

1. Judul PSAK
2. Akuntansi dilaksanakan sesuai ketentuan transisi perubahan kebijakan; tentang perubahan kebijakan akuntansi
3. Sifat perubahan kebijakan akuntansi
4. Ketentuan transisi yang dapat berdampak terhadap periode mendatang
5. Penjelasan mengenai ketentuan transisi, saat bisa dilaksanakan
6. Pada setiap periode sebelumnya atau periode berjalan; jumlah penyesuaian (i) untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh dan (ii) laba per saham dan dilusian jika PSAK 233 (Laba per Saham) diterapkan
7. Jumlah penyesuaian yang berkaitan periode-periode sebelumnya (sepanjang praktis)

Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

Entitas harus mengungkapkan hal berikut sehubungan dengan perubahan prinsip akuntansi secara sukarela (tidak disyaratkan oleh Pernyataan ini):

1. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi
2. Alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru dapat menyajikan informasi yang lebih relevan serta andal
3. Jumlah penyesuaian pada periode berjalan serta di setiap periode sebelumnya: (i) penyesuaian di setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan (ii) penyesuaian laba per saham dan dilusian bilamana PSAK 233 diterapkan
4. Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan periode sebelumnya
5. Keadaan yang melatarbelakangi kondisi tersebut beserta penjelasan tentang sejak kapan dan bagaimana perubahan kebijakan akuntansi dilaksanakan.

Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

Apabila suatu perusahaan diketahui belum menerapkan PSAK baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku, maka perusahaan tersebut harus memberikan informasi sebagai berikut:

1. Fakta tersebut
2. Informasi relevan telah diketahui atau yang bisa diestimasi dengan wajar guna menilai dampak-dampak diterapkannya penerapan PSAK baru pada laporan keuangan pada periode awal

Selain pengungkapan di atas, perusahaan juga harus mempertimbangkan pengungkapan berikut:

1. Judul PSAK baru
2. Sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi
3. Tanggal diterapkannya PSAK disyaratkan
4. Tanggal di mana entitas berencana menerapkan PSAK untuk pertama kalinya, dan

5. Apakah (i) suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan; atau (ii) jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar.

14.3 Estimasi Akuntansi

Kebijakan akuntansi sering membutuhkan estimasi karena ada akun yang tidak dapat diukur langsung dalam jumlah moneter. Estimasi akuntansi adalah nilai moneter dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam pengukuran. Estimasi digunakan untuk mencerminkan nilai yang paling mungkin atau yang paling sesuai dengan keadaan yang ada (DSAK IAI, 2024). Estimasi dibutuhkan karena ada faktor-faktor yang tidak dapat diukur secara tepat dan karena ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis. Dalam penyusunan laporan keuangan, penting untuk menggunakan estimasi yang adil dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sambil tetap memastikan keandalannya. Estimasi harus direvisi jika terjadi perubahan dalam kondisi yang menjadi dasar estimasi, atau jika ada informasi baru atau pengalaman tambahan yang relevan.

14.3.1 Perubahan Estimasi Akuntansi

Dampak dari perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laba rugi pada :

1. Periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode tersebut
2. Periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya

Perubahan estimasi akuntansi terjadi ketika informasi baru memengaruhi perkiraan sebelumnya terkait jumlah tercatat dari aset, liabilitas, atau ekuitas. Standar Akuntansi Keuangan menegaskan bahwa perubahan ini diakui secara prospektif, artinya hanya mempengaruhi periode saat perubahan terjadi dan setelahnya, tanpa memengaruhi laporan keuangan periode sebelumnya (DSAK IAI, 2024).

Untuk lebih memahami mengenai perubahan estimasi akuntansi, perhatikan ilustrasi-ilustrasi berikut.

Ilustrasi 1

PT Hidayah membeli peralatan pada tanggal 3 Januari 2021 dengan harga Rp 480.000.000, awalnya diestimasikan untuk disusutkan selama 8 tahun tanpa nilai sisa. Seiring berjalannya waktu, peralatan tersebut terjaga dengan baik melalui pemeliharaan yang rutin, dan pada awal tahun 2025, manajemen perusahaan menilai ulang kondisi peralatan tersebut. Berdasarkan kondisi peralatan yang masih sangat baik, manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa manfaat peralatan menjadi total 10 tahun dari tanggal perolehan.

Beban penyusutan awal saat perolehan tahun 2021 adalah $480.000.000/8 = 60.000.000$ per tahun

Akumulasi penyusutan sampai awal tahun 2025 = 4 tahun x Rp 60.000.000 = Rp 240.000.000

Beban penyusutan setelah perubahan estimasi = Nilai buku sampai dengan akhir 2024 (Harga Perolehan – Akumulasi Penyusutan 4 tahun) dibagi dengan sisa masa manfaat peralatan = $(480.000.000 - 240.000.000) / 6 = Rp$

Akibat perubahan estimasi tersebut, beban penyusutan tahun 2025 harus dihitung ulang.

Tabel 14.1. Perbandingan nilai Akumulasi dan Beban Penyusutan

	2025 Estimasi Baru	2024	2025 Estimasi Lama
Peralatan	480.000.000	480.000.000	480.000.000
Akumulasi penyusutan	280.000.000	240.000.000	300.000.000
Peralatan-net	200.000.000	240.000.000	180.000.000
Beban Penyusutan	40.000.000	60.000.000	60.000.000

Sumber : (Martani *et al.*, 2012)

Ilustrasi 2

PT Cahaya Bersinar yang pada tahun 2020 membeli sebuah mesin senilai Rp 500.000.000 dengan estimasi umur manfaat 10 tahun dan nilai sisa Rp 5.000.000. Namun, pada awal tahun 2022, manajemen perusahaan tersebut mengubah estimasi menjadi umur manfaat 8 tahun dengan nilai sisa Rp 2.000.000 (Kartikahadi *et al.*, 2019).

Harga perolehan	500.000.000	
Nilai sisa	(5.000.000)	
Dasar penyusutan	495.000.000	
Penyusutan per tahun	49.500.000*	*495.000.000/10

Ayat jurnal penyusutan tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Beban penyusutan	49.500.000	
Akumulasi penyusutan		49.500.000

Penyusutan selama tahun 2020 dan 2021 adalah $49.500.000 \times 2$ tahun = 99.000.000.

Nilai tercatat mesin per 31 Desember 2021 adalah $500.000.000 - 99.000.000 = 401.000.000$

Nilai tercatat mesin per 31 Desember 2021	401.000.000
Nilai sisa (estimasi baru)	<u>(2.000.000)</u>
Dasar penyusutan	<u>399.000.000</u>

Penyusutan per tahun (sisa umur 6 tahun) 66.500.000

Ayat jurnal penyusutan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Beban penyusutan	66.500.000	
		Akumulasi penyusutan
		66.500.000

**399.000.000/6

Sisa umur 6 tahun karena awalnya sudah dipakai selama 2 tahun, sehingga saat perubahan estimasi umur manfaat menjadi 8 tahun tidak dihitung 8 tahun namun 8 dikurangi dengan 2 (yang sudah terpakai).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. and Kristanto, A. B. (2019) 'Penentu Pilihan Kebijakan Akuntansi Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), p. 72. doi: 10.23887/jish-undiksha.v8i1.21356.
- Ayu, J. (2023) 'Pengaruh kondisi ekonomi terhadap praktik akuntansi dan pelaporan keuangan tinjauan pustaka', 2(11), pp. 1–19.
- DSAK IAI (2016) *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 1st edn. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Available at: https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal/list_content/QWkxbXpNSTkwdUVnYXgvUFh3M0tsZz09.
- DSAK IAI (2024) *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia PSAK 208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. 1st edn. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A. and Purwanti, D. (2019) 'Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten', *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(3), pp. 198–214. doi: 10.31092/kuat.v1i3.634.
- Kartikahadi, H. *et al.* (2019) *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 2*. 1st edn. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Martani, D. *et al.* (2012) *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Jakarta.
- Setijaningsih, H. T. (2020) 'Setijaningsih: Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi', *Jurnal Akuntansi*, XVI(03), pp. 427–438.
- Sulistiawan, D. (2009) 'Studi Eksperimen Tentang Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Kebijakan AKuntansi', *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 4(2), pp. 31–40.

Wulanditya, P. (2022) 'Kajian Empiris Financial Restatements Akibat Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), pp. 313–325. doi: 10.24034/jiaku.v1i3.5603.

BAB 15

ISU-ISU DI SEPUTAR AKUNTANSI KEUANGAN

Oleh Denara Akmal

Pada bab sebelumnya, telah dibahas mengenai masing-masing komponen yang ada pada akuntansi keuangan. Di dalam bab ini, pembahasan akan berkaitan tentang urgensi akuntansi keuangan, isu kontemporer akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan dan akuntansi keuangan di masa depan.

15.1 Urgensi Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan salah satu jenis akuntansi paling vital di perusahaan. Tiap usaha dan bisnis baik itu sektor kecil hingga besar membutuhkan akuntansi keuangan. Ketika suatu bisnis tidak melakukan pembukuan atas kegiatan operasional perusahaan, perusahaan seperti akan kehilangan arah. Akuntansi keuangan dapat menunjukkan posisi laba, modal, utang, dan komponen keuangan lainnya. Dengan adanya akuntansi keuangan, perusahaan dapat memprediksi bagaimana keberlangsungan usaha di kemudian hari. Tidak hanya itu, akuntansi keuangan juga menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama ini.

Proses akuntansi keuangan tentunya diakhiri dengan terbitnya suatu laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi-informasi keuangan yang penting dan merupakan puncak penyajian informasi keuangan yang telah diolah. Informasi yang diperoleh dari akuntansi keuangan ini berkaitan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan dalam proses pengambilan keputusannya. Akuntansi keuangan dapat membantu perusahaan mengelola operasional bisnisnya hingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat.

Informasi yang disajikan dalam akuntansi keuangan dicantumkan beserta dampaknya kepada *stakeholders*.

Stakeholders membutuhkan pemahaman komprehensif dalam pelaporan keuangan suatu entitas, sehingga akuntansi keuangan akan selalu memegang peran yang krusial dalam menjamin keefektifan pengambilan keputusan. Boynton (2006) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang kreatif, karena informasi akuntansi harus handal dan relevan agar para pemangku kepentingan tidak salah dalam proses pengambilan keputusannya. Beberapa akademisi menemukan bahwa informasi akuntansi keuangan juga mampu memprediksi kebangkrutan suatu entitas.

Menurut Warren (2005), akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memproses data aktivitas bisnis menjadi informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Data dari aktivitas bisnis perusahaan tersebut harus akurat perhitungannya. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Akuntansi keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan transparansi dunia usaha dan bisnis.

Hariyana (2016) mendefinisikan peranan akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang diharapkan mampu memberikan informasi yang handal dan akurat dalam pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Akuntansi keuangan juga dapat menjadi suatu alat pengendalian dan evaluasi bagi manajemen terkait bisnisnya. Evaluasi kinerja perusahaan secara berkala dapat mendorong kepercayaan *stakeholders* dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menentukan rencana-rencana dan kebijakan yang akan diambil atas informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan.

Pentingnya akuntansi keuangan tidak hanya dapat diterapkan pada perusahaan skala besar saja. Namun, skala terkecil seperti rumah tangga juga dapat menerapkan akuntansi keuangan khususnya pada aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan. Lembaga pendidikan yang sudah diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan juga masih membutuhkan laporan keuangan dalam menilai kondisi

keuangannya. Melalui informasi keuangan, berbagai lembaga dapat menjamin transparansi atas operasionalnya.

Dari berbagai jenis akuntansi, akuntansi keuangan dapat berkaitan dengan akuntansi manajemen, akuntansi publik, hingga akuntansi keprilakuan. Jenis akuntansi tersebut seluruhnya membutuhkan informasi keuangan dari bidang akuntansi keuangan untuk menganalisis dampak akuntansi lainnya. Dalam bab sebelumnya perhitungan, pengukuran, sampai penyajian akuntansi keuangan telah dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi lainnya tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya informasi keuangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan memiliki tujuan yang berbeda dan banyak. Diantaranya dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan, menilai kondisi keuangan perusahaan, sebagai bahan evaluasi manajemen, meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan, hingga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Dengan adanya berbagai tujuan tersebut, sudah sepatutnya seorang akuntan di perusahaan mematuhi kode etik akuntan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yang memproses data keuangan menjadi informasi keuangan memiliki banyak area yang dengan mudah dimanipulasi bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. Kode Etik Profesi Akuntan wajib dipatuhi oleh seluruh akuntan khususnya dalam penerapan standar perilaku pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Menjaga kerahasiaan, integritas, objektif, prinsip kehati-hatian dan profesional merupakan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh bagi tiap akuntan.

15.2 Isu Kontemporer Akuntansi Keuangan

Isu kontemporer dalam bab ini akan membahas terkait topik-topik khusus di bidang praktik akuntansi keuangan. Salah satu praktik yang cukup hangat terjadi saat ini dalam konteks akuntansi keuangan adalah *Sustainability Accounting*. Praktik ini biasanya dikenal dengan akuntansi keberlanjutan dan pelaporannya. Dalam praktik pelaporan akuntansi

keberlanjutan, perusahaan dituntut untuk memberikan pelaporan keuangan sekaligus dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Isu ini menjadi semakin penting dari tahun ke tahun karena banyak pemangku kepentingan yang sudah mulai *aware* terhadap dampak buruk akibat operasional suatu perusahaan. Berbagai kerangka dan pedoman perusahaan dalam membuat pelaporan keberlanjutan mengacu pada *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, *Global Reporting Initiative (GRI)*, dan *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)*.

Praktik pelaporan keberlanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor untuk berinvestasi, dan meningkatkan praktik keberlanjutan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan suatu perusahaan akan semakin meningkat juga karena perusahaan tidak hanya berfokus memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan pemegang saham saja.

Pergeseran pandangan masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan perusahaan mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pola pergeseran tersebut. Kaitan antara akuntansi keuangan, laporan tahunan, hingga pelaporan keberlanjutan menjadi satu kesatuan yang dinamakan pelaporan yang terintegrasi. Tidak hanya itu, bagi para auditor atau pemeriksa, dengan adanya pelaporan berkelanjutan juga memudahkan auditor dalam pemeriksaan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dicanangkan perusahaan. Namun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, laporan berkelanjutan ini dapat disusun secara terpisah dari laporan tahunan.

Sifat dan penerapan standar akuntansi biasanya berubah seiring perkembangan masa akuntansi dan riset dalam akuntansi keuangan. Seperti halnya pada masa pandemi Covid-19, ketidakpastian pada pandemi ini dapat mempengaruhi pertimbangan entitas secara signifikan dalam penyusunan laporan keuangannya. Contohnya, dalam PSAK 68 Pengukuran

Nilai Wajar, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan *Press Release* terhadap penerapan PSAK 68 di masa pandemi Covid-19. PSAK ini sebagai petunjuk bagi entitas dalam pengaplikasian SAK. Akibat volatilitas dan volume transaksi di bursa efek, hal ini juga berpengaruh pada penetapan harga transaksi teratur pelaku pasar di tanggal pengukuran. Berbagai ketidakcukupan informasi yang diperoleh perusahaan pada saat pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan tidak dapat menyimpulkan transaksi teratur itu sendiri.

Selain itu, contoh isu kontemporer lainnya di bidang akuntansi keuangan berkaitan dengan penerapan PSAK 71 yang berlaku efektif pada tahun 2020 masa pandemi Covid-19. Standar yang diadopsi dari IFRS 9 ini dapat dikatakan menyesuaikan dengan perkembangan dan keadaan masa akuntansi. Meskipun terkadang berbagai regulasi akuntansi berubah-ubah, hal ini semestinya mendorong para akuntan untuk selalu *update* terkait regulasi dan sistem akuntansi yang berlaku saat pelaporan keuangan akan dilakukan.

15.3 Standar Akuntansi Keuangan

Seorang pebisnis atau pengusaha wajib melakukan pencatatan atas bisnis yang telah dijalankan. Pencatatan bisnis tersebut tentunya memerlukan suatu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di bidang pelaporan keuangan. Standar ini menjadi pedoman bagi pengusaha, agar informasi keuangan yang disajikan terjamin kualitasnya, objektif, dan transparan. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan menjadi acuan bagi lembaga, perusahaan, instansi, dan swasta lainnya. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diatur berbagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Seorang akuntan di suatu lembaga harus mematuhi regulasi dan peraturan agar laporan keuangan yang dihasilkan terjamin informasi keuangannya dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan industri sejenis.

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku saat ini mengacu pada *International Financial Reporting Standards*

(IFRS). Secara garis besar, SAK dan IFRS tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena sama-sama menjadi acuan bagi akuntan dalam menyajikan laporan keuangan. Hanya saja perbedaannya bahwa IFRS merupakan standar Internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Dalam praktiknya, Indonesia mengadopsi standar internasional tersebut sejak tahun 2012. Penerapan standar internasional dapat menunjukkan bahwa sebuah entitas maju dan berani untuk bersaing secara Internasional.

Pada tahun 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan suatu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terbaru yaitu SAK EP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. SAK ini menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Standar ini juga merupakan adopsi dari IFRS untuk UMKM yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2025. Standar ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Entitas Privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik ini biasanya menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi para pengguna eksternal.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EP yang terbaru ini wajib diketahui oleh akademisi, praktisi keuangan, hingga pengusaha. Standar tersebut menghilangkan topik yang sudah tidak lagi relevan bagi entitas privat. Seperti yang kita ketahui, IFRS *for SMEs* yang pada tahun 2017 berlaku efektif di Indonesia merupakan Standar Akuntansi Keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ukuran entitas seperti UMKM tidak relevan lagi jika masih diatur standar mengenai laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi. Selain itu, SAK EP juga dilakukan dengan tujuan menyederhanakan opsi yang ada pada kebijakan akuntansi tunggal untuk transaksinya. Begitu pun juga dengan prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan keadaan Entitas Privat itu sendiri. SAK EP juga memiliki perbedaan dari sisi penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penggunaan nilai wajar untuk properti investasi, penggunaan konsep penghasilan

komprehensif lain, kombinasi bisnis, *goodwill*, pajak tangguhan, dll.

Hingga saat ini, Indonesia menjadikan IFRS sebagai acuan dalam sistem akuntansi. Konvergensi dari PSAK menuju IFRS telah diimplementasikan pada tahun 2012. Dengan adanya konvergensi ini, kualitas standar akuntansi keuangan di Indonesia tentu setidaknya akan sama dengan perusahaan skala Internasional lainnya. Selain itu, pendanaan Internasional juga akan lebih terbuka di Indonesia atas konvergensi tersebut.

15.4 Akuntansi Keuangan di Masa Depan

Perkembangan teknologi saat ini sudah mengubah tatanan hidup masyarakat. Dahulunya seorang kasir masih menghitung uang secara manual, namun saat ini sudah ada beberapa supermarket yang tidak lagi memiliki kasir. Di satu sisi memang fenomena tersebut mempermudah hidup masyarakat menjadi lebih praktis. Sementara itu, di sisi lainnya terdapat sekelompok orang yang terpaksa pengangguran akibat disrupsi teknologi.

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*, yang biasa kita sebut dengan AI juga sudah memasuki ranah akuntansi keuangan. Tidak hanya perusahaan besar, melainkan pebisnis yang memiliki usaha kecil saat ini sudah mulai mengadopsi kemudahan teknologi yang ada. Beberapa bagian yang tidak terlewatkan dari kemajuan teknologi maupun AI ini dalam akuntansi keuangan berkaitan dengan analisis laporan keuangan, keputusan investasi dan pendanaan, pengukuran nilai perusahaan, manajemen resiko, investasi keuangan, hingga kejahatan dan kecurangan dalam keuangan.

Pertama, dalam proses analisis laporan keuangan, pemangku kepentingan internal dan eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan internal dan eksternal membutuhkan pemahaman mendalam terkait posisi keuangan, hasil operasional, dan informasi keuangan lainnya. Dari sisi auditor, seorang auditor akan melakukan penilaian atas akurasi informasi akuntansi suatu entitas. Bagi investor, informasi

keuangan menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan mereka. Investor juga menggunakan informasi non keuangan yang dicantumkan guna mendukung mereka dalam memitigasi asimetri informasi karena permasalahan agensi. Rasio-rasio keuangan saat ini dianggap menjadi alat pengambilan keputusan yang tradisional karena terkadang memperlambat pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Saat ini, rasio-rasio keuangan yang dianggap tradisional tadi sudah tergantikan dengan AI. Para pemangku kepentingan dapat secara efektif mengambil keputusan tanpa harus menghitung atau mengukur rasio yang diperlukan secara manual lagi.

Kedua, dari sisi keputusan investasi dan pendanaan entitas, akuntansi keuangan menjadi faktor penting dalam menilai potensi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Peramalan aliran kas perusahaan (*forecasting*) menjadi salah satu alat yang banyak digunakan perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi maupun pendanaannya. Namun, penggunaan peramalan aliran kas dinilai sangat subjektif karena banyaknya pengaruh para pengambil kebijakan di perusahaan. Peramalan tersebut banyak dipengaruhi oleh pengalaman individu, industri, dan tren masa lalu. Untuk mengatasi kelemahan peramalan aliran kas tadi, ke depannya perusahaan akan mengadopsi teknologi yang mendukung pengambilan keputusan investasi dan pendanaan.

Ketiga, dalam proses pengukuran nilai perusahaan, komponen ini ditentukan oleh indikator akuntansi keuangannya. Model statistik ARIMA acapkali digunakan oleh manajemen untuk mengukur nilai perusahaan. Namun, model tersebut dinilai kurang akurat dalam pengukuran nilai perusahaan. Perkembangan AI menjawab keterbatasan berbagai model statistik yang ada.

Keempat, manajemen resiko keuangan merupakan salah satu resiko yang cukup sulit untuk dimitigasi oleh institusi keuangan. Resiko pasar dan resiko kredit menjadi tantangan bagi institusi karena memerlukan pengolahan data yang banyak jumlahnya. Kemungkinan terjadinya kecurangan keuangan di institusi keuangan juga sangat tinggi apabila masih

menggunakan metode tradisional. Dengan bantuan AI, resiko pasar dapat diminimalisir dengan estimasi penentuan kategori resiko kecil, sedang, dan tinggi dengan alat bantu AI yang dimiliki perusahaan.

Kelima, dalam investasi keuangan, seorang investor akan mengoptimalkan portofolio investasinya dengan menggunakan metode *hedging*. Metode ini dikenal sebagai metode lindung nilai atas investasi keuangan. Salah satu model yang banyak digunakan investor adalah *The Markowitz Model*. Model ini bertujuan untuk meminimalisir varian dari portofolio investasi. Namun dalam praktiknya, model tersebut tidak mampu lagi menunjukkan keadaan sebenarnya dalam investasi keuangan. Para akademisi memprediksi di masa depan metode algoritma *Integrated Firefly* dapat menjadi alat bantu akuntan dan investor dalam mengoptimalkan portofolio investasi. Algoritma tersebut juga mendukung keseimbangan keadaan sebenarnya dalam investasi keuangan (Ziwei, 2023).

Terakhir, dalam pendeteksian kejahatan dan kecurangan keuangan, dahulunya informasi akuntansi keuangan bergantung pada pendapat auditor dan rasio keuangan. Namun, auditor tidak cukup mampu lagi dalam memprediksi resiko yang signifikan. Lebih lanjut lagi, proses audit terkadang juga memakan waktu yang lama, biaya yang besar, dan tidak akurat. Dengan bantuan metode teknologi AI, pendeteksian kecurangan keuangan lebih cepat dan akurat dibanding dengan pendapat auditor.

Dari berbagai penjelasan di atas, meskipun akuntansi keuangan di masa depan membutuhkan AI sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pemangku kepentingan, peluang seorang akuntan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri juga lebih banyak. Para akuntan di masa depan dituntut untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang akuntansi keuangan yang berbasis teknologi. Apalagi dengan adanya *big data* dalam akuntansi, kemungkinan permasalahan keamanan data di masa depan juga menjadi antisipasi yang harus disiapkan oleh akuntan dan manajemen perusahaan. Eksekutif perusahaan dapat melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga karena tuntutan teknologi saat ini. Dengan adanya

integrasi ini, teknologi dan sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan dapat mengatasi permasalahan akuntansi tradisional dan keamanan data keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). 2017. Syari'ah Standards. Dipublikasikan secara online di website <https://aaoifi.com>
- Berdiyeva, O., Islam, M., & Saeedi, M. 2021. Artificial Intelligence in Accounting and Finance: Meta Analysis. *Volume 3, Issue 1*. <https://doi.org/10.37435/nbr21032502>
- Boynton, William C. dan Johnson, Raymond N. 2006. *Modern Auditing: Assurance Services and The Integrity of Financial Reporting (8th Edition)*. New York: John Wiley & Sons.
- Hariyana, Diyah Santi. 2016. *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK)*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2021. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat*. Jakarta.
- Lamberton, G., 2005. Sustainability Accounting—A Brief History and Conceptual Framework. *Accounting Forum*, 29, pp. 26 – 7.
<https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.11.001>.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Khaddafi, Muammar, dkk. 2016. *Akuntansi Syariah*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 29 – 40.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 / POJK.03 / 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Musfiroh, Luluk., Dwi Suhartini & Lina Dwi Mayasari. 2021. *Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau Dari*

- Perspektif Islam*. BAJ: *Behavioral Accounting Journal*, 4(1), 259-275. <https://dx.doi.org/10.33005/baj.v4i1.135>
- Schaltegger, S., S., Álvarez-Etxeberria, I., & Ortas, E., 2017. Innovating Corporate Accounting and Reporting for Sustainability. *Sustainability Development*, 25. <https://doi.org/10.1002/SD.1666>.
- Trisnawati, L., Nawangsari, L., Lo, S., Zainal, V., & Irmaningsih, E., 2022. Literature Review of Corporate Sustainability in Practices (The Implementation of Green Accounting in Modern Industries). *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i11-48>
- Wang, X., 2023. Algorithms and Research in Accounting Application Based on Artificial Intelligence. Proceedings of the 2nd International Conference on Financial Innovation, FinTech, and Information Technology, FFIT 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.7-7-2023.2338051>
- Warren, dkk. 2005. *Prinsip-prinsip Akuntansi (Edisi 21)*. Jakarta: Erlangga.
- Ziwei, Yi. 2023. Artificial Intelligence in Accounting and Finance: Challenges and Opportunities. *Volume XX*. DOI 10.1109/ACCESS.2023.3333389

BIODATA PENULIS



Novia Rizki, S.E., M. Ak., Ak., CA
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Selong tanggal 13 November 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Mataram dan melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi sekaligus Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan audit.

BIODATA PENULIS



Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang, 01 April 1990. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi lulus tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) lulus tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Pendidikan S2 Akuntansi lulus tahun 2015 di Universitas Muslim Indonesia. Memperoleh sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai dosen profesional pada bidang ilmu akuntansi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 2020. Memperoleh sertifikat kompetensi bagian pembukuan pada bidang pekerjaan manajemen keuangan dari BNSP pada tahun 2020 dan sertifikat kompetensi pada bidang teknisi akuntansi dengan kualifikasi/kompetensi teknisi akuntansi madya dari BNSP pada tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Ika Wulandari, S.E., M.Ak

Dosen Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Politeknik LP3I Kampus Pekanbaru

Penulis lahir di kota Pekanbaru tanggal 21 Agustus 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Komputerisasi Akuntansi pada Politeknik LP3I Kampus Pekanbaru. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Riau (UIR) pada jurusan Akuntansi lulusan tahun 2002 dan melanjutkan S2 di Universitas Riau (UNRI) jurusan Akuntansi Konsentrasi Audit lulusan tahun 2017. Alamat surel yang bisa dihubungi melalui ikawulandari@plb.ac.id

BIODATA PENULIS



Reny Dany Merliyana, S.Pd., M.Ak.
Dosen Program Studi Akuntansi S1
Fakultas Ekonomi, Universitas Garut
Email: renydany@uniga.ac.id

Penulis lahir di Bandung. Penulis seorang dosen tetap pada Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, kemudian melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi Universitas Widyatama Bandung.

Selain menjadi dosen tetap, dan sebagai tutor untuk kegiatan tutorial online (Tuton) Universitas Terbuka, penulis juga merupakan seorang wirausahawan di bidang kuliner. Memiliki hobi memasak dan *travelling*. Penulis juga aktif sebagai anggota dan pengurus dari Ikatan Cendekiawan Akuntansi (ICMA).

BIODATA PENULIS



Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak., Akt., C.A.
Dosen Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani

Penulis lahir di Cirebon dan saat ini masih aktif mengajar pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani. Penulis mengampu beberapa mata kuliah seperti Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Syariah, Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, dan Laboratorium Perpajakan. Selain aktif mengajar, penulis juga menjalankan tugas struktural sebagai Ketua STIE Al-Madani untuk periode 2023-2027. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Pendidikan Profesi Akuntansi dan Pendidikan S2 pada Jurusan Master Ilmu Akuntansi. Ketiga pendidikan tersebut ditempuh di Penulis menekuni bidang Akuntansi keuangan, Akuntansi Syariah, dan Akuntansi Sektor Publik. Saat ini penulis sedang menjalankan tugas belajar pada Program Doktorat Ilmu Akuntansi di Almamater yang sama

BIODATA PENULIS



Fitri Ayu Wulandari, S.Ak., M.Acc.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Palu tanggal 03 Januari 1996. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Tadulako dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat. Penulis mengampuh mata kuliah akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan. Aktif menulis artikel ilmiah dengan fokus tulisan terkait akuntansi keuangan, akuntansi keuangan syariah, serta akuntansi sektor publik.

BIODATA PENULIS



Sev Rahmiyanti, S.E., M. Ak

Dosen tetap Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Banten Jaya

Tempat tanggal lahir, Jakarta tanggal 12 Januari, merupakan dosen tetap Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Banten Jaya. Sarjana S1 Program Studi Akuntansi Universitas Gunadarma, meneruskan pendidikan S2 Program Studi Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sedang kuliah Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Menjabat sebagai ketua Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Banten Jaya, Pengurus Bidang Akuntan Sektor Bisnis pada Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Banten periode 2023-2026, Pengurus Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) Provinsi Banten periode 2023-2028, Pengurus sebagai Bendahara pada Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) periode 2020-2024, dan Pengurus Wakil Bendahara II pada Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Banten Periode 2018-2022.

Memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Akuntansi Manajemen dan Kewirausahaan. Aktif mengajar pada mata kuliah: Pengantar Akuntansi, Akuntansi Manajemen, *Budgeting*, Studi Kelayakan Bisnis, juga aktif sebagai peneliti dan pengabdian di bidang kepakaran tersebut. Ini adalah karya ketujuh penulis.

BIODATA PENULIS



H. Muhammad Fahmi, SE., MM.
Dosen Prodi Manajemen Bisnis
Asmi Citra Nusantara Banjarmasin

H. Muhammad Fahmi, SE., MM. lahir di Banjarmasin. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, SMP serta SMK Jurusan Akuntansi, penulis meneruskan Pendidikan Sarjana di STIE Nasional Banjarmasin Jurusan Akuntansi, diteruskan kependidikan program

Magister Management dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan pada Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini aktif sebagai Dosen Manajemen di ASMI Citra Nusantara serta menjadi pengurus perguruan tinggi sebagai Ketua Unit Penjamin Mutu. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Head Of Finance pada LP3I Banjarmasin dan turut aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah baik sebagai peserta maupun pembicara.

BIODATA PENULIS



Rizal Zaelani, SE., MM.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI
Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Akuntansi, Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia. Penulis menekuni bidang Menulis, Sejak perkuliahan aktif dalam penelitian-penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Salah satunya adalah mendapatkan hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI. pada tahun 2020 dengan judul *Public Perceptions in Analyzing the Differences Between Cooperatives and Bank Emok in Sukabumi*, selanjutnya mendapatkan hibah penelitian pada tahun 2022 dengan judul *The Influence of Islamic Financial Literacy, Innovation and the Government on the Sustainability of MSMEs in Sukabumi City*.

Kegiatan penelitian dan penulisan juga masih tetap dilaksanakan sebagai pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dengan menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah, diktat ajar seperti Berlatih Akuntansi Manajemen, dan saat ini Buku **Akuntansi Keuangan Menengah** tahun 2024 hingga saat ini.

BIODATA PENULIS



Wedia Hastuti S.E., M.M.

Dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan

Penulis lahir di Makassar tanggal 5 Juli 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Keuangan di Magister Manajemen Universitas Indonesia.

Pengalaman kerja, selama 8 tahun bekerja di Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dari tahun 1998-2006, kemudian 8 tahun di PT Earindo Consulting (Untuk project FSSC-PT Unilever Indonesia) 2006-2014, kemudian resign mendirikan usaha pribadi di bidang fashion busana wanita dan pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai dosen ilmu ekonomi manajemen di STIE Bhakti Pembangunan.

BIODATA PENULIS



Sabarudin, S.E., M.M., Ak
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Tobimeita tanggal 29 Maret 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen keuangan sambil kuliah Pendidikan Profesi Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Frisky Jeremy Kasingku, M.Sc
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Klabat

Penulis lahir di Sulawesi Utara tanggal 1 Februari 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Klabat. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada jurusan Magister sains Akuntansi. Penulis menekuni bidang menulis dalam bidang ilmu Akuntansi dan bisnis.

BIODATA PENULIS



Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA

Dosen Program Studi S1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Penulis lahir di Surabaya tanggal 15 Agustus 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004 dan S2 pada Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Auditing, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008. Kemudian menempuh Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) untuk mendapat gelar Akuntan (Ak.) di Universitas Airlangga pada tahun 2009. Sebelum menjadi dosen, penulis adalah staf auditor di Kantor Akuntan Publik mulai tahun 2007. Beberapa buku penulis yang telah terbit adalah buku Praktikum Pengauditan Pemrosesan Data Elektronik (PDE) Kasus: PT Nur Tahmida, Praktikum PDE Kasus: PT Central Kurma Indonesia, Praktikum PDE berbasis excel ATLAS Kasus : PT Rumah Sehat (RS) Al Afiyah, Praktikum PDE Kasus: PT Assakinah, buku (*Chapter book*) Akuntan Publik: Audit Laporan Keuangan, buku (*Chapter book*) Dasar-dasar Akuntansi, buku (*Chapter book*) Character Building for Professional: Karakter Penunjang Kesuksesan Profesional, buku (*Chapter book*) Sistem Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Denara Akmal, M.Acc.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten

Penulis lahir di Padang, tanggal 04 Agustus 1995. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang Akuntansi, khususnya bidang Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syariah, dan Pengauditan. Selain itu, Penulis juga pernah bekerja di salah satu E-Commerce terbesar di Indonesia asal Singapura. Tidak hanya itu, di samping pekerjaan Penulis sebagai dosen tetap, Penulis juga aktif sebagai seorang tutor dan *Master of Ceremony* (MC) dalam berbagai acara internal maupun eksternal Universitas.